

**KESENJANAGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM
MADRASAH SWASTA
(Studi Multi Kasus Di MI Ma'arif Mojorejo dan
MI Ma'arif Polorejo Ponorogo)**

TESIS



**SUNANDAR
NIM : 505230026**

**PROGRAM MAGISTER
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAR ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO
2026**

**KESENJANAGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM
MADRASAH SWASTA**

**(Studi Multi Kasus Di MI Ma'arif Mojorejo dan
MI Ma'arif Polorejo Ponorogo)**

TESIS

**Diajukan Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai
Ageng Muhammad Besari Ponorogo Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2) Program
Studi Pendidikan Agama Islam**



**Oleh :
SUNANDAR
505230026**

**PROGRAM MAGISTER
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
2026**

PERYATAAN KESLIAN TULISAN

Dengan ini, saya, **Sunandar, NIM 505230026, Program Magister Progam Studi Pendidikan Agama Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: “**Kesenjangan Implementasi Kurikulum Madrasah (Studi Multi Situs Di MI Ma’arif Mojorejo dan MI Ma’arif Polorejo Ponorogo)**” ini merupakan hasil karya madiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik da secara hukum.

Ponorogo, 12 Februari 2026

Saya membuat pernyataan



Sunandar
NIM. 505230026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memulai pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **SUNANDAR, NIM 505230025** yang berjudul: “**Kesenjangan Implementasi Kurikulum Madrasah Swasta (Studi Multi Kasus di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'rif Polorejo Ponorogo)**” maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqahah Tesis.

Ponorogo, 12 Februari 2026

Pembimbing I.



Prof. Dr. Hj. Rvi Muafiah, M.Ag.
NIP. 19740909200122001

Pembimbing II.



Dr. Iswahyudi, M.Ag.
NIP. 197903072003121003

Mengetahui Kaprodi
Magister Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Negeri Ponorogo



Dr. Mambaul Ngadhimah, M.Ag.
NIP. 197402041998032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
Alamat : Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Suman, Ponorogo 61471 Website:
<https://pascasarjanaiponorogo.ac.id> Email: pascasarjanaiponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Sunandar, NIM 505230026, Program Magister Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan judul: "*Kesenjangan Implementasi Kurikulum Madrasah Swasta (Studi Multi Situs di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo)*" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Munāqashah Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada Hari Senin, tanggal 6 April 2026 dan dinyatakan LULUS.

DEWAN PENGUJI

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Mambaul Ngadhimah, M.Ag. NIP 197402041998032009 Ketua Sidang		21/5-2026.
2	Prof. Dr. Mukhibat, M.Ag. NIP 197311062006041017 Penguji Utama		21/05 2026
3	Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. NIP 19740909200122001 Penguji 2		19 mei 2026
4	Dr. Iswahyudi, M.Ag. NIP 197903072003121003 Sekretaris		21 Mei 2026.

Ponorogo, 20 April 2026

Dekan Pascasarjana,



Agus Purnomo, M.Ag.
NIP 197308011998031001

KATA PENGANTAR

Bismillahir-rahmani-rahim, Dengan memanjatkan puji Syukur ke hadirat Allah swt atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : ***"Kesenjangan Implementasi Kurikulum Madrasah Swasta (Studi Multi Situs Di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo Ponorogo)"***

Tesis ini di tulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama Islam (M.Pd) pada Program Magister Program Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponrogo. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan bayak ribuan terima kasih kepda kedua orang tua yang selama ini telah memberikan support, do'a, dan

dukungannya. Terima kasih juga di sampaikan kepada para pembimbing tesis , yaitu Ibu Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag dan Bapak Dr. Iswahyudi, M.Ag. yang telah mengarahkan dan mengingatkan kelalian penulis selama penyusunan tesis sejak dari awal hingga selesai.

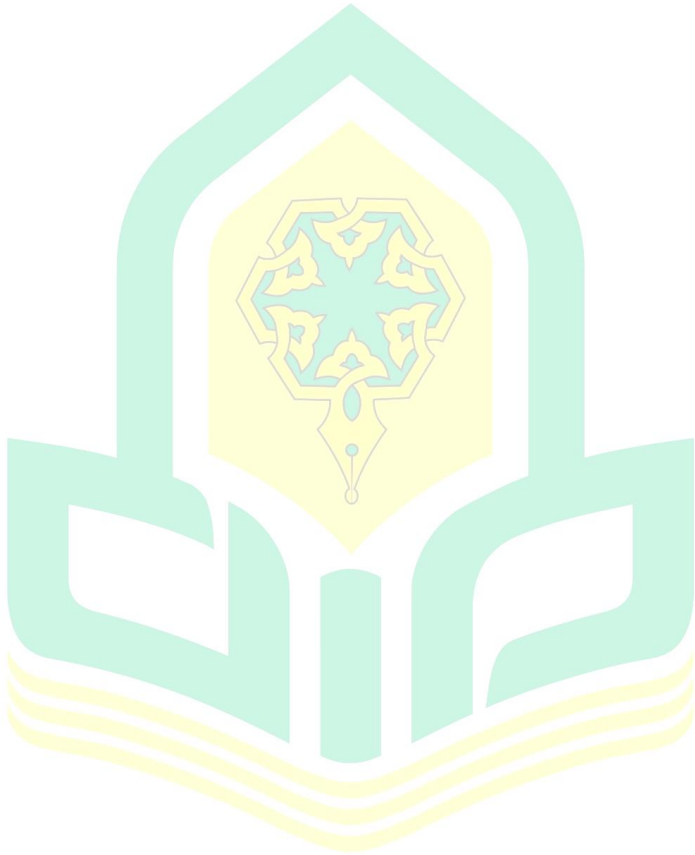
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorobro Ibu Prof. Dr. Hj. Evi Mufiah, M.Ag Diraktur Pascasarjana Bapak Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag dan Wakil Direktur Bapak Dr. Sugiyar, M. Ag Ketua Program Studi Dr. Mambaul Ngadhimah, M. Ag. Beserta jajaran yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi. Tak lupa pula, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf Administrasi UIN Ponorogo dan perpustakaan, termasuk rekan-rekan sejawat yang

mearuh perhatian dan bantuan kepada penulis sehingga terselesaia tesis ini.

Akhirnya, Penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca semoga menjadi amal jariah penulis yang dinilai saleh disisi Allah Swt,. Dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapka muncul penilaian serupa yang memperdalam dan mengemangkan wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat dan Masyarakat bangsa. amin

Ponorogo, 12 Februari 2026
Penulis

S u n a n d a r
NIM : 505230026



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNANDAR
NIM : 505230026
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Magister Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi/Tesis : KESENJANAGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM
MADRASAH SWASTA (Studi Multi Kasus di MI Ma'arif
Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 September 2026

Penulis,



(SUNANDAR)

ABSTRAK

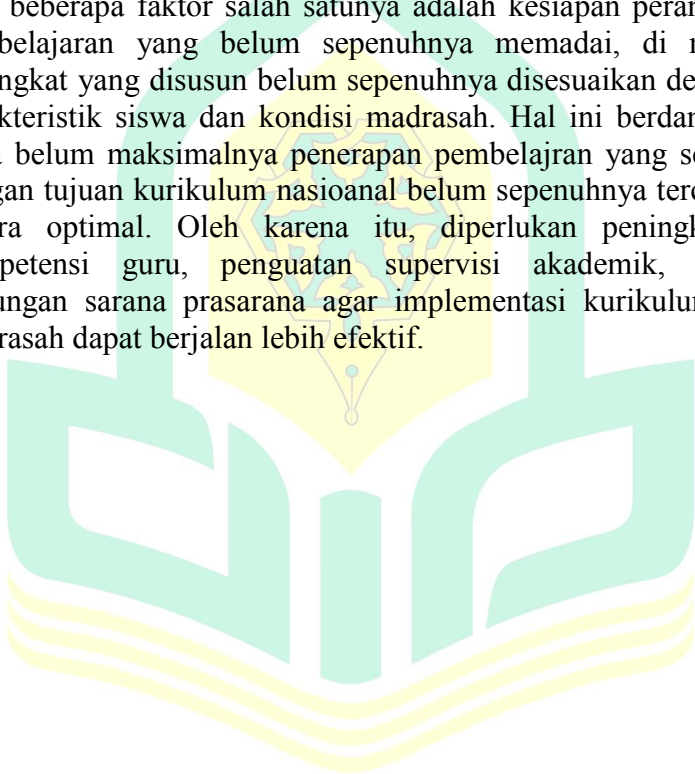
Sunandar, 2026. Kesenjangan Implementasi Kurikulum Madrasah Swasta (Studi Multi Situs di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo). **Tesis.** Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., Pembimbing II : Dr. Iswahyudi, M.Ag.

Kata Kunci : Kurikulum, Kesenjangan, Implementasi, Madrasah Ibtidayah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan implementasi kurikulum pada madrasah swasta serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dinamika perubahan kebijakan kurikulum, seperti Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka dan Kurikulum Berbasis Cinta, yang menuntut kesiapan madrasah dalam menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi multi situs. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Kepala Madrasah, guru, serta pihak yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum di kedua Madrasah telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun masih terdapat kesenjangan antara perencanaan kurikulum dan praktik pembelajaran di kelas. Kesenjangan implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah kesiapan perangkat pembelajaran yang belum sepenuhnya memadai, di mana perangkat yang disusun belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kondisi madrasah. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya penerapan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum nasional belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi guru, penguatan supervisi akademik, serta dukungan sarana prasarana agar implementasi kurikulum di madrasah dapat berjalan lebih efektif.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar *International Arabic Romanization*. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib mengacu dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan harus ditulis miring (*italic*). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukan transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap ke dalam kamus bahasa Indonesia.

A. Penyesuaian Perubahan Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ع	Aa	سأل	<i>Sa'ala</i>

ب	Bb	بدل	<i>Badala</i>
ت	Tt	تمر	<i>Tarm</i>
ث	Th th	ثورة	<i>Thawrah</i>
ج	Jj	جمال	<i>Jamāl</i>
ح	H h	حديث	<i>ḥadīth</i>
خ	Kh kh	خالد	<i>Khālīd</i>
د	Dd	ديوان	<i>Dīwān</i>
ذ	Dh dh	مذهب	<i>Madhhab</i>
ر	Rr	رحمن	<i>raḥmān</i>
ز	Zz	زمزم	<i>Zamzam</i>
س	Ss	سلام	<i>Salām</i>
ش	Sh sh	شمس	<i>Shams</i>
ص	Ş ş	صبر	<i>şabr</i>
ض	Ḍ ḍ	ضمير	<i>ḍamīr</i>
ط	Ṭ ṭ	طاهر	<i>ṭāhir</i>
ظ	Ẓ ẓ	ظهر	<i>ẓuhr</i>

ع	‘	عبد	<i>‘abd</i>
غ	Gh gh	غيب	<i>Ghayb</i>
ف	Ff	فقه	<i>Fiqh</i>
ق	Qq	قاضي	<i>Qādī</i>
ك	Kk	كأس	<i>Ka’s</i>
ل	Ll	لين	<i>Laban</i>
م	Mm	مزمار	<i>Mizmār</i>
ن	Nn	نوم	<i>Nawn</i>
ه	Hh	هبط	<i>habaṭa</i>
و	Ww	وصل	<i>waṣala</i>
ي	Yy	يسار	<i>Yasār</i>

B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
َ	A		<i>fa‘ala</i>

	I		<i>Hasiba</i>
◌ِ	U		<i>Kutiba</i>

C. Vokal Panjang

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ا, ي	Ā	كاتب، قضي	<i>kātib, qaḍā</i>
ي	Ī	كريم	<i>Karīm</i>
و	Ū	حروف	<i>ḥurūf</i>

D. Diftong

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
و	<i>Aw</i>	قول	<i>Qawl</i>
ي	<i>Ay</i>	سيف	<i>Say</i>
ي	<i>Iyy (Sdiddah)</i>	غني	<i>Ghaniyy</i>
و	<i>Uww (Shidah)</i>	عدو	<i>‘aduww</i>

ي	<i>Ī (nisbah)</i>	الغزالي	<i>Ghazālī</i>
---	-------------------	---------	----------------

E. Pengecualian

1. Huruf Arab ء (*hamzah*) pada awal kata ditransliterasi-kan menjadi a, bukan 'a. Contoh: أكبر , transliterasinya: *akbar*, bukan ' *akbar*.

2. Huruf Arab (*tā' marbūṭah*) pada kata tanpa (*al*) yang bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi 't'. Contoh: وزارة التعليم , transliterasinya:

Wizārat al-Ta'lim, bukan *Wizārah al-Ta'lim*. Namun, jika ada kata yang menggunakan (*al*) pada perkataan tunggal atau perkataan terakhir, *tā' marbūṭah* ditransliterasikan pada 'h', contoh:

a	المكتبة المنيرية	<i>al-Maktabah Munīriyyah</i>
b	قلعة	<i>qal'ah</i>
c	دار وهبة	<i>Dār Wahbah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERYATAAN PUBLIKASI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	ivx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Penelitian Terdahulu	19
F. Definisi Operasional	27
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II KAJIAN TEORITIK.....	33
A. Kesenjangan Implementasi	33
1. Pengertian.....	33
2. Karakteristik Lokal	62

3. Faktor Eksternal	67
B. Implementasi Kurikulum.....	69
1. Faktor Guru.....	77
2. Faktor Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah	80
3. Faktor Pelatihan dan Pengembangan Profesional	81
4. Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya.....	84
C. Macam-macam Kurikulum	87
1. Kurikulum 2013	89
a. Dasar Normatif Kurikulum 2013	89
b. Aturan Implementatif.....	93
c. Strategi Penerapan	95
d. Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum 2013	97
2. Kurikulum Merdeka.....	100
a. Dasar Normatif Kurikulum Merdeka...	100
b. Aturan Implementatif.....	106
c. Strategi Penerapan	110
d. Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum Merdeka	114
3. Kurikulum Berbasis Cinta KBC	116
a. Dasar Normatif KBC	116
b. Aturan Implementatif.....	118
c. Strategi Penerapan	120
d. Kelebihan dan Kekurangan KBC	123
D. Implikasi Kesenjangan Implementasi Kurikulum.....	128

E. Telaah Pustaka.....	131
BAB III METODE PENELITIAN	144
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	144
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	146
C. Data dan Sumber Data	148
1. Data Primer.....	148
2. Data Sekunder.....	149
D. Metode Pengumpulan data.....	153
1. Wawancara.....	151
2. Observasi	153
3. Dokumentasi	154
E. Teknik Pengambilan Sampel	155
1. Purposive Sampling.....	156
2. Snowball Sampling.....	157
F. Teknik Analisis Data.....	158
1. Kondensasi Data	159
2. Penarikan dan Verifikasi Simpulan	161
G. Pengecekan Keabsahan Temuan	164
1. Perpanjangan Kehadiran Peneliti	165
2. Observasi Lebih Mendalam.....	166
3. Triangulasi/Gabungan.....	166
H. Tahapan-Tahapan Penelitian	170
1. Tahap Pra Lapangan.....	171
2. Tahap Lapangan.....	172
BAB IV KEBIJAKAN PENERAPAN KURIKULUM	
DI MI MA'ARIF MOJOREJO DAN MI MA'ARIF	
POLOREJO	173

1.Kebijakan Penerapan Kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo.....	173
2.Kebijakan Penerapan Kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Polorejo.....	202
BAB V FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESENJANGAN KURIKULUM DI MI MA'ARIF MOJOREJO DAN MI MA'ARIF POLOREJO 229	
1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kesenjangan kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo.....	227
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan kurikulum di MI Ma'arif Polorejo	246
BAB VI IMPLIKASI KESENJANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MADRASAH SWASTA DI MI MA'ARIF MOJOREJO DAN POLOREJO.....	
BAB VII PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	277
B. Saran	277
Daftar Pustaka	282
Lampiran	288

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Di Indonesia, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran yang signifikan dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Selain itu kurikulum yang diterapkan di madrasah negeri dan swasta juga sangat berperan sebagai fondasi utama dalam menentukan arah, mutu, dan relevansi pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Dasar normatif pentingnya penerapan kurikulum di madrasah negeri dan swasta didasarkan pada beberapa regulasi dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pendidikan di Indonesia, khususnya di lingkungan madrasah.

Terdapat didalam UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional yang mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan nasional secara terpadu, termasuk madrasah sebagai satuan pendidikan formal yang setara dengan sekolah umum.¹

Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum-13 pada Madrasah yang memberikan panduan teknis dan standarisasi pelaksanaan kurikulum di madrasah negeri dan swasta, implementasi kurikulum di MI dapat dilakukan antara lain : Menambahkan beban belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu, Merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” Pub. L. No. 20 (2003), <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>.

tertentu untuk mata pelajaran lainnya sebanyak-banyaknya 6 jam pelajaran untuk keseluruhan relokasi, menyelenggarakan pembelajaran terpadu (*integrated learning*) dengan pendekatan kolaboratif.²

*J. Galen Saylor and William Alexander in his book Curriculum Planning for Better Teaching and Learning The sum total of the school's efforts to influence learning, whether in the classroom, on the playground, or out of school. Whether the efforts result in the learnings that teachers desire depends on the many factors which affect the individual pupil's interaction with the situations arranged. Whether the experiences had correlated or conflict with those that pupils have outside the school must also be answered for each individual. The significant conclusion for the teachers is that everything they do to stimulate and direct pupils' experience and subsequent learning must be considered in curriculum planning.*³

² “Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pada Madrasah,” Pub. L. No. 184 (2019), <https://www.mtsypkpsentani.sch.id/read/5/kma-184-tahun-2019-pedoman-implementasi-kurikulum-pada-madrasah>.

³ William M. Alexander and J Galen Saylor, *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1954), 5.

J. Galen Saylor dan William Alexander dalam bukunya *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning* menyatakan bahwa kurikulum merupakan keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi proses belajar, baik di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah. Apakah usaha tersebut menghasilkan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan guru sangat bergantung pada banyak faktor yang mempengaruhi interaksi peserta didik dengan situasi yang diatur. Apakah pengalaman belajar tersebut selaras atau justru bertentangan dengan pengalaman yang dimiliki peserta didik di luar sekolah juga harus dijawab secara individual. Kesimpulan penting bagi guru adalah bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan untuk merangsang dan mengarahkan pengalaman serta pembelajaran peserta didik

selanjutnya harus dipertimbangkan dalam perencanaan kurikulum.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Permendikbud No.81A/2013 mengatur tahap pelaksanaan Kurikulum 2013 secara nasional dan memuat pedoman implementasi, termasuk lampiran-lampiran yang berisi: pedoman penyusunan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pedoman pengembangan muatan lokal, pedoman kegiatan ekstrakurikuler, pedoman umum pembelajaran, dan pedoman evaluasi kurikulum. Ketentuan ini penting karena memberikan panduan praktis

pelaksanaan K-13 di lapangan dan mengatur pelaksanaan bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014.⁴

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Permendikbud No.67/2013 memberikan pedoman teknis bagi penyusunan Kurikulum 2013 pada tingkat SD/MI. Dokumen ini menjabarkan landasan filosofis, sosiologis, psiko pedagogis, serta struktur kurikulum (misalnya: kompetensi inti, kompetensi dasar, mata pelajaran, muatan lokal, dan beban belajar). Bagi MI, Permendikbud ini menjadi acuan utama dalam merancang struktur kurikulum

⁴ Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013, 2013, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud81A-2013ImplementasiK13Lengkap.pdf>.

tingkat satuan pendidikan sambil mempertimbangkan karakteristik madrasah.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 merupakan dua regulasi penting yang saling melengkapi dalam implementasi Kurikulum 2013 di tingkat Sekolah Dasar maupun Madrasah Ibtidaiyah. Permendikbud No.67/2013 memberikan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang mencakup landasan filosofis, sosiologis, serta psiko pedagogis, termasuk rumusan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan struktur mata pelajaran.⁶ Sementara itu, Permendikbud

⁵ Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013, 2013, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud67-2013KD-StrukturKurikulum-SD-MI.pdf>.

⁶ *Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013*, 2013, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud67-2013KD-StrukturKurikulum-SD-MI.pdf>.

No.81A/2013 berfungsi sebagai pedoman implementatif yang mengatur tahapan pelaksanaan kurikulum, pengembangan muatan lokal, kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran, serta evaluasi. Dengan demikian, kedua regulasi tersebut bersama-sama menjadi dasar yang utuh bagi satuan pendidikan, khususnya Madrasah Ibtidaiyah, untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Kurikulum 2013 sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan madrasah.⁷

Kesenjangan implementasi kurikulum pada madrasah swasta terjadi ketika terdapat perbedaan yang signifikan antara kebijakan kurikulum yang dirumuskan secara formal oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan dengan praktik pelaksanaannya di tingkat satuan

⁷ *Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013, 2013,*
<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud81A-2013ImplementasiK13Lengkap.pdf>.

pendidikan. Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya kesenjangan tersebut adalah banyaknya titik pengambilan keputusan serta aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan kurikulum, baik di tingkat pusat, daerah, maupun madrasah.

Semakin banyak pihak yang terlibat, seperti pengawas madrasah, kepala madrasah, guru, komite, dan lembaga pengelola di bawah LP Ma'arif NU, maka semakin besar pula potensi terjadinya hambatan koordinasi, perbedaan pemahaman terhadap substansi kurikulum, serta resistensi terhadap perubahan. Kondisi tersebut berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan kurikulum sebagaimana yang telah dirancang, baik dalam aspek peningkatan mutu pembelajaran maupun penguatan karakter Islami.

Fenomena ini tampak pada pelaksanaan kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo Ponorogo,

yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan formal dan praktik implementasinya di lapangan.⁸

Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kesenjangan dalam implementasi kurikulum antara madrasah swasta. Kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada kualitas pembelajaran, tetapi juga berpengaruh terhadap mutu lulusan dan pencapaian tujuan pendidikan. Beberapa madrasah swasta mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan kurikulum ke dalam kegiatan belajar mengajar yang sesuai standar, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.

Penelitian ini difokuskan pada kedua madrasah ibtdaiyah yakni MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif

⁸ Jeffrey L. Pressman and Aaron Wildavsky, *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland* (Los Angeles: Universitas Of California Press, 1984), 88.

Polorejo , MI Ma'arif Mojorejo yang merupakan pendidikan Islam swasta yang berada dalam naungan Yayasan Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (BPPPMNU) Cabang Ponorogo yang memiliki visi : Terwujudnya madrasah yang islami, berprestasi, berbasis iptek, berlandaskan imtaq yang sesuai dengan dinamika Pendidikan.

Juga memiliki misi : meningkatkan prestasi akademik dan nonakademik, meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta didik dalam menghadapi tantangan zaman serta mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan ideal, mengoptimalkan pengamalan ajaran agama menuju anak soleh secara ketat dan berkelanjutan, mampu memahami syariat Islam dan giat beramal sholeh, berkepribadian Iman dan Taqwa dan berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki lingkungan

nyaman dan kondusif untuk belajar. Di MI Ma'arif Mojorejo ini memiliki persentase kelulusan yang cukup baik karena bisa dikalkulasikan hampir 90% lulusan MI Ma'arif Mojorejo ini bisa diterima di SMP/MTs/Pondok Pesantren favorit di wilayah kabupaten ponorogo disekitarnya.⁹

Demikian juga untuk MI Ma'arif Polorejo yang merupakan pendidikan Islam swasta yang berada dalam naungan Yayasan Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (BPPPMNU) Cabang Ponorogo yang memiliki visi Terwujudnya madrasah Al-Qur'an, Inovatif, Kompetitif, dan Berbudaya dan memiliki misi Membentuk muslim taat beribadah, berakhlak mulia, sholih dan sholihah, Meningkatkan kualitas belajar, terampil, dan mandiri, Mengoptimalkan kompetensi dan

⁹. Hasil wawancara dengan kepala sekolah MI Ma'arif Mojorejo pada 25 November 2024 pukul 09.30

daya saing Pendidikan, dan Mengembangkan seni budaya dan religi dalam membentuk karakter generasi bangsa yang maju dan bermartabat. Di MI Ma'arif Polorejo ini memiliki persentase kelulusan yang cukup baik.¹⁰

Penelitian ini memiliki keunikan yang berfokus pada kesenjangan implementasi kurikulum di dua madrasah swasta tingkat dasar, yaitu MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo Ponorogo. Selama ini, kajian tentang implementasi kurikulum lebih banyak diarahkan pada madrasah negeri atau sekolah umum, sehingga penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana madrasah swasta dengan kondisi sumber daya terbatas mengadaptasi kebijakan kurikulum nasional. Keunikan lainnya terletak pada pendekatan multi-kasus yang

¹⁰ Ahmad Suyono, "MI Ma'arif Polorejo," 2022, <https://mipolorejo.maarifponorogo.sch.id/>. Diakses pada tanggal 06-Oktober-2025 jam 10.15

digunakan, sehingga dapat menggambarkan perbedaan nyata dalam praktik kurikulum antara dua madrasah yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan religius berbeda. Selain itu, penelitian ini menekankan pada integrasi muatan keagamaan, seperti tahfidz dan pendidikan karakter Islami, yang seringkali tidak mendapat perhatian dalam studi kurikulum umum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur tentang implementasi kurikulum di madrasah swasta, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang relevan bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam di tingkat lokal.

Berdasarkan deskripsi diatas bahwa kesenjangan implementasi kurikulum madrasah swasta memiliki keunikan dalam menyoroti kesenjangan implementasi kurikulum di madrasah swasta dengan menggunakan

pendekatan multi-kasus. Fokus pada adaptasi kurikulum nasional, keterbatasan sumber daya, serta integrasi nilai-nilai keagamaan menjadikan penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah tentang kurikulum di madrasah swasta sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kelembagaan dan dukungan eksternal sangat menentukan kualitas pembelajaran, namun komitmen internal madrasah swasta juga berperan penting dalam menjaga mutu lulusan. Oleh karena itu, penulis berminat melakukan penelitian dengan judul **Kesenjangan Implementasi Kurikulum Madrasah Swasta : Studi Multi Kasus di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo Ponorogo.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan penerapan kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo ?
3. Bagaimana implikasi kesenjangan implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kebijakan penerapan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang dilaksanakan di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kesenjangan implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka antara MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo

3. Mengeksplorasi sikap kepala madrasah terhadap kesenjangan implementasi kurikulum 2013 dalam upaya yang dilakukan dalam mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai kesenjangan implementasi kurikulum madrasah negeri dan swasta : studi kasus di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo guna untuk mendongkrak kurikulum yang telah ada agar lebih baik lagi kedepannya.

2. Bagi Peneliti

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti dapat menambah wawasan yang baru dan bisa mengetahui lebih dalam mengenai kesenjangan implementasi kurikulum madrasah

negeri dan swasta : studi multi kasus di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo.

b. Bagi Sekolah

Penelitian ini semoga bisa bermanfaat untuk memberi acuan atau masukan bagi MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo yang berguna untuk menyelesaikan tugas atau menyusun kurikulum bagi kedua sekolahan tersebut agar lebih baik kedepannya.

c. Bagi Guru

Memberikan masukan kepada guru supaya lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan atau keputusan mengenai kurikulum yang beredar di kedua sekolah tersebut.

d. Bagi Pembaca

Semoga bisa menambah pengetahuan dari berbagai sumber yang kami susun jadi satu dengan pemilihan kata-kata yang bisa diterima oleh para pembaca dan semoga bisa bermanfaat bagi kalangan pembaca baik itu masyarakat atau petinggi publik yang terhormat.

E. Penelitian Terdahulu

Menurut Machi and McEvoy penelitian terdahulu merupakan argumen tertulis yang mendukung suatu posisi tesis dengan didasarkan pada bukti-bukti kredibel dari hasil penelitian sebelumnya. Tinjauan ini memberikan konteks dan latar belakang terhadap pengetahuan terkini mengenai topik yang dikaji, serta menyusun argumentasi logis untuk mempertahankan kesimpulan yang diambil. Secara umum, tinjauan pustaka dapat didefinisikan sebagai dokumen ilmiah yang menyajikan argumentasi logis

berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap kondisi aktual pengetahuan dalam suatu bidang studi, sehingga membentuk tesis yang meyakinkan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian.¹¹ Penelitian mengenai kesenjangan implementasi kurikulum madrasah swasta : studi multi kasus di MI Ma'arif Mojorejo, Jetis dan MI Ma'arif Polorejo sudah sering kali dikaji oleh beberapa penelitian terdahulu. Untuk menghindari adanya asumsi plagiasi penelitian, maka perlu adanya pengkajian terhadap penelitian terdahulu yang telah mengkaji dengan topik yang serupa. Dibawah ini peneliti sajikan telaah hasil penelitian terdahulu, yang mana sebagai berikut

1. Penelitian jurnal dari Masruhin dengan judul Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah

¹¹ Lawrence A. Machi and Brenda T. McEvoy, *The Literature Review 3 Rd Ed.* (California: Corwin A SAGE Company, 2016), 28.

Kabupaten Semarang dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, dalam pelaksanaan di MI Tarbiyatul Aulad Jombor menggunakan pembelajaran aktif dan kreatif dengan pendekatan tematik integratif, saintifik, serta penilaian situasional. Kedua, di MI Ma'arif Rowosari implementasi dilakukan bertahap sejak tahun ajaran 2017–2018, dimulai pada kelas I dan IV, kemudian kelas II dan V pada 2018–2019, serta kelas III dan VI pada 2019. Ketiga, faktor pendukung meliputi buku pedoman, arahan pengawas, sarana prasarana, dan sosialisasi. Adapun kendala yang dihadapi adalah kemampuan dasar siswa kelas I yang masih rendah, beban materi yang padat dalam satu tema, serta tingginya tuntutan administrasi.¹²

¹² Seorang Masruhin, "Implementasi Kurikulum 2013 Di Madrasah

2. Penelitian jurnal dari Dwi Ummul Hasanah, Miladina Nur Khasanah, dan Desty Putri Hanifah dengan judul Analisis Tantangan dan Hambatan Penerapan Kurikulum 2013 di MI Ma'arif Budiluhur Kertek dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam implementasi kurikulum 2013 di MI Ma'arif Budiluhur menghadapi berbagai permasalahan, seperti kondisi kelas yang kurang kondusif, jumlah siswa yang berlebihan, kompetensi guru yang tidak linier, serta kalender akademik yang padat. Selain itu, hambatan utama meliputi kesulitan guru dalam mengintegrasikan materi, keterbatasan keterampilan teknologi informasi, keterlambatan distribusi buku panduan, dan tuntutan

untuk membuat media pembelajaran secara mandiri. Temuan ini menegaskan bahwa tantangan utama terletak pada peningkatan kemampuan dan kemauan guru dalam memanfaatkan teknologi serta penguasaan materi Kurikulum 2013.¹³

3. Penelitian Tesis dari Laeli Mubarak yang berjudul Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Di MI Ma'arif NU Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas menghasilkan temuan dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa: penyusunan instrumen penilaian pada semua kompetensi menghadapi kendala, terutama karena keberagaman karakteristik peserta didik dan belum adanya format

¹³ Dwi Umul Hasanah, Miladina Nur Khasanah, and Desty Putri Hanifah, "Analisis Tantangan Dan Hambatan Penerapan Kurikulum 2013 Di MI Ma'arif Budiluhur Kertek," *Waspada : Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan* Vol 11 No (2023): 23–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.61689/waspada.v11i1.404>.

skala penilaian yang baku. Akibatnya, guru menyusun skala penilaian secara mandiri sehingga tujuan penilaian, khususnya sikap, menjadi tidak seragam. Dalam pelaksanaan, guru mengalami kesulitan menilai seluruh aspek, terutama aspek afektif yang menuntut penilaian menyeluruh terhadap sikap siswa. Selain itu, pelaporan hasil penilaian juga bermasalah karena guru belum mampu mengolah nilai sikap, belum tersedia rekap khusus, dan tidak didukung oleh aplikasi rapor Kurikulum 2013.¹⁴

4. Penelitian Tesis dari Siti Khojanah dengan judul Analisis Swot Dalam Pembelajaran Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Di MI Ma'arif NU Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang

¹⁴ Laeli Mubarak, "Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Di Mi Maarif Nu Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas (Thesis, Master)" (Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2022).

menggunakan metode penelitian *field research* adalah penelitian deskriptif dengan hasil yang menunjukkan bahwa pembelajaran tematik terpadu dalam Kurikulum 2013 di MI Ma'arif NU Pandansari memiliki keunggulan utama pada penekanan pendidikan karakter siswa. Namun, kelemahannya terletak pada kesulitan guru dalam mengintegrasikan berbagai mata pelajaran yang menuntut kreativitas dan inovasi tinggi. Dari sisi peluang, guru dapat meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan berbagai pelatihan profesional. Sementara itu, tantangan yang dihadapi adalah pemanfaatan teknologi yang tidak tepat, yang berpotensi berdampak negatif terhadap prestasi belajar siswa jika tidak dikendalikan. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran sudah berjalan cukup baik,

meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek tertentu.¹⁵

5. Penelitian jurnal dari Anri Naldi, Neng Nurcahyati Sinulingga Putri, Handayani Lubis dengan judul Analisis Perkembangan Dan Pelaksanaan Kurikulum DI MIS Elsusi Medina Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak berdiri tahun 1991 perkembangan kurikulum berdasarkan perubahan kurikulum pendidikan, sejak kurikulum 1984, kurikulum 1994, KBK, KTSP dan kurikulum 2013 dan merdeka belajar. menunjukkan bahwa sejak berdiri tahun 1991, MIS Elsusi Medina mengalami perkembangan kurikulum yang mengikuti perubahan nasional, mulai dari kurikulum 1984, 1994, KBK, KTSP, Kurikulum 2013,

¹⁵ Siti Khojanah, "Analisis Swot Dalam Pembelajaran Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Di MI Ma'arif Nu Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga (Tesis, Master)" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

hingga Merdeka Belajar. Dalam pelaksanaannya, madrasah menerapkan Kurikulum 2013 yang dipadukan dengan nilai-nilai keislaman sesuai program lembaga. Hasilnya terlihat pada tiga aspek utama, yaitu penguatan sikap spiritual (afektif), penguasaan pengetahuan agama dan umum (kognitif), serta keterampilan melalui kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler (psikomotorik). Secara keseluruhan, perkembangan dan pelaksanaan kurikulum ini mampu menjadikan madrasah selaras dengan harapan orang tua, masyarakat, serta tuntutan bangsa dan negara.¹⁶

F. Definisi Operasional

1. Kesenjangan implementasi kurikulum adalah perbedaan antara rencana atau kebijakan kurikulum

¹⁶ Anri Naldi, Neng Nurcahyati Sinulingga Lubis, and Putri Handayani, "Analisis Perkembangan Dan Pelaksanaan Kurikulum Di Mis Elsusi Medina," *Paedagogia: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan* Vol 14 No (2023): 292–300, <https://doi.org/10.31764>.

madrasah yang tertulis dengan pelaksanaan nyata di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo. Indikator kesenjangan diamati melalui wawancara dengan fokus pada:

- a. Pemahaman guru terhadap isi dan tujuan kurikulum madrasah
 - b. Cara pengajaran dan metode pembelajaran sesuai dengan kurikulum
 - c. Ketersediaan dan penggunaan sumber belajar atau media pembelajaran
 - d. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan kurikulum
 - e. Evaluasi pelaksanaan kurikulum dari perspektif guru dan kepala madrasah
2. Kurikulum madrasah didefinisikan sebagai dokumen resmi yang berisi tujuan, materi, metode,

dan evaluasi pembelajaran yang digunakan di madrasah, yang merujuk pada standar nasional pendidikan dan nilai-nilai keagamaan Islam, dan menjadi pedoman dalam proses belajar mengajar di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I, Pada bagian bab ini akan membahas tentang pendahuluan, yaitu dimulai dari latar belakang penelitian yang diambil, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan, dan jadwal penelitian.

BAB II, Pada bagian bab ini akan membahas tentang kajian penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka berpikir yang mana dijadikan sebagai referensi, perbandingan, pondasi dan penguat dari penelitian yang akan dilaksanakan.

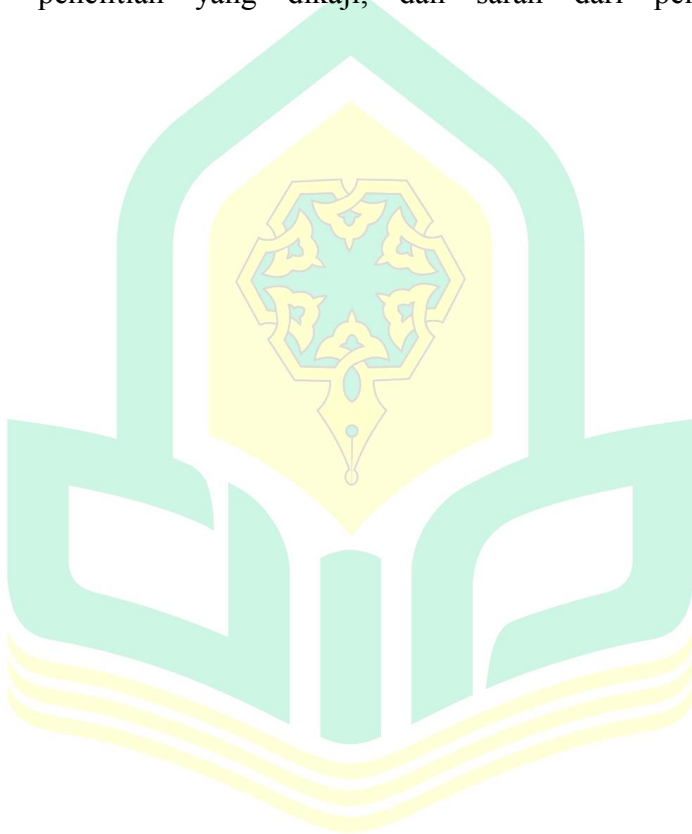
BAB III, Pada bagian bab ini akan membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan peneliti, menguraikan terkait lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan penelitian, dan tahap penelitian.

BAB IV, Pada bagian bab ini berisikan tentang hasil pengumpulan sumber-sumber data, pembahasan penelitian, yang mencakup mulai dari gambaran umum latar penelitian (lembaga yang diteliti), deskripsi data, dan pembahasan terkait rumusan masalah kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum madrasah di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo.

BAB V, Pada bagian bab ini berisikan tentang hasil pengumpulan sumber-sumber data, pembahasan penelitian, yang mencakup mulai dari gambaran umum latar penelitian (lembaga yang diteliti), deskripsi data, dan pembahasan terkait rumusan masalah ketua faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo.

BAB VI, Pada bagian bab ini berisikan tentang hasil pengumpulan sumber-sumber data, pembahasan penelitian, yang mencakup mulai dari gambaran umum latar penelitian (Lembaga yang diteliti), deskripsi data, dan pembahasan rumusan masalah ketiga yaitu dampak implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo

BAB VII, berisi tentang rangkuman penelitian dalam bentuk kesimpulan hasil dari seluruh pembahasan penelitian yang dikaji, dan saran dari peneliti.



BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kesenjangan Implementasi

1. Pengertian

Menurut Hill dan Hupe kesenjangan implementasi merupakan ketidaksesuaian antara apa yang dirumuskan dalam kebijakan dengan apa yang terjadi di tingkat pelaksanaan. Mereka menegaskan bahwa implementasi bukanlah proses mekanis, melainkan proses yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, interpretasi individu, dan kebebasan bertindak (*discretion*) para pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi memerlukan keterlibatan berbagai aktor, koordinasi yang kuat, serta desain kebijakan yang adaptif dan responsif

terhadap kondisi nyata di lapangan.¹⁷ Kemudian menurut Michael Fullan dalam bukunya *The New Meaning of Educational Change* Kesenjangan implementasi menjadi pijakan teoritis yang relevan dalam memahami fenomena perubahan pendidikan, khususnya dalam konteks implementasi kurikulum di tingkat sekolah.

Pemikiran ini memperkuat pandangan bahwa perubahan tidak hanya berkaitan dengan perumusan kebijakan, tetapi juga sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterjemahkan dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, teori perubahan Fullan menjadi salah satu kerangka utama dalam kajian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi

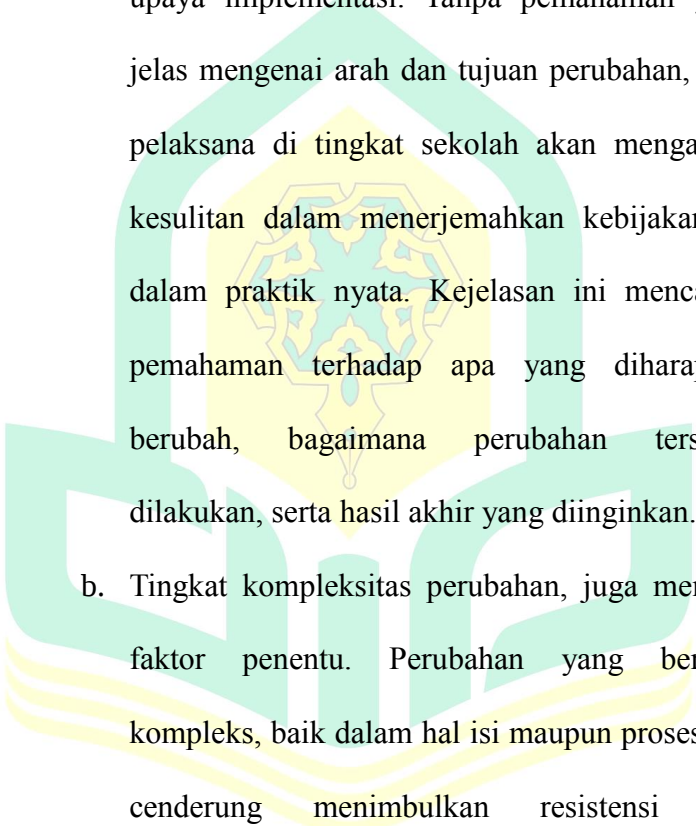
¹⁷ Michael Hill and Peter Hupe, *Implementing Public Policy* (California: SAGE Publications, 2002), 41-57.

keberhasilan implementasi kurikulum, khususnya dalam membandingkan praktik implementasi di madrasah swasta.¹⁸ Kemudian Fullan juga menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kejelasan tujuan perubahan, tingkat kompleksitas, ketersediaan sumber daya, dukungan dari kepala sekolah, serta keterlibatan dan kesiapan guru. Jika faktor-faktor ini diabaikan atau tidak dipenuhi, maka akan terjadi kesenjangan antara kebijakan dengan pelaksanaan, yang pada akhirnya membuat perubahan tersebut tidak berdampak nyata.¹⁹

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

¹⁸ Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change* (Columbia University, New York: Teachers College Press, 1991), 72.

¹⁹ Fullan, 86-90.

- 
- a. Kejelasan tujuan perubahan, merupakan elemen mendasar yang harus diperhatikan dalam setiap upaya implementasi. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai arah dan tujuan perubahan, para pelaksana di tingkat sekolah akan mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik nyata. Kejelasan ini mencakup pemahaman terhadap apa yang diharapkan berubah, bagaimana perubahan tersebut dilakukan, serta hasil akhir yang diinginkan.
- b. Tingkat kompleksitas perubahan, juga menjadi faktor penentu. Perubahan yang bersifat kompleks, baik dalam hal isi maupun prosesnya, cenderung menimbulkan resistensi dan kebingungan di kalangan guru dan pemangku kepentingan lainnya. Kompleksitas ini dapat

mencakup penggunaan pendekatan pedagogis baru, perubahan kurikulum, maupun penerapan teknologi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kompleksitas, semakin besar pula tantangan yang dihadapi dalam implementasi.

- c. Ketersediaan sumber daya, memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran proses implementasi. Sumber daya yang dimaksud meliputi fasilitas fisik, sarana dan prasarana, dukungan finansial, serta akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan signifikan yang mengurangi efektivitas penerapan kebijakan.

- d. Dukungan dari kepala sekolah, merupakan faktor kepemimpinan yang sangat berpengaruh. Kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pengelola administrasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong, memfasilitasi, dan memotivasi seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam implementasi. Kepemimpinan yang kuat dan visioner akan menciptakan iklim sekolah yang kondusif terhadap perubahan
- e. Keterlibatan dan kesiapan guru, menjadi aspek sentral dalam implementasi perubahan. Guru adalah pelaksana utama di lapangan, sehingga keterlibatan mereka dalam setiap tahapan proses sangat menentukan keberhasilan. Guru yang memiliki kesiapan baik dari segi pengetahuan,

keterampilan, maupun sikap akan lebih mampu mengadaptasi dan menjalankan perubahan dengan efektif.²⁰

Menurut Pressman dan Wildavsky Kesenjangan implementasi merupakan suatu kondisi di mana terdapat perbedaan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan pelaksanaannya di lapangan. dalam bukunya *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland* menegaskan bahwa kebijakan tidak akan bermakna tanpa adanya implementasi yang efektif. Mereka menyatakan bahwa “*implementation is the ability to forge subsequent links in the causal chain so as to obtain the desired results*” yang berarti keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan

²⁰ Fullan, 68-72.

setiap aktor yang terlibat dalam membangun mata rantai sebab-akibat sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai.

Dari kutipan diatas bisa dideskripsikan bahwasanya implementasi tidak sekadar memindahkan kebijakan atau program dari tingkat perencanaan ke tingkat pelaksanaan, tetapi lebih dari itu, implementasi merupakan kemampuan untuk menciptakan dan menjaga kesinambungan hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan agar tujuan atau hasil yang diharapkan dapat tercapai. Artinya, setiap tahapan dalam pelaksanaan kebijakan harus saling terhubung dan diperkuat agar dampaknya sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pressman dan Wildavsky juga menjelaskan bahwa semakin banyak titik keputusan (*decision*

points) dan aktor yang terlibat dalam proses implementasi, maka semakin besar pula potensi terjadinya kegagalan. Hal ini dinyatakan dalam kutipannya, *“the greater the number of decision points and actors, the greater the probability of failure”*, yang berarti Semakin banyak titik pengambilan keputusan dan aktor yang terlibat, semakin besar pula kemungkinan terjadinya kegagalan mengapa demikian karena dalam proses implementasi suatu kebijakan akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah titik pengambilan keputusan dan jumlah aktor yang terlibat di dalamnya. Semakin banyak pihak yang terlibat, maka akan semakin besar pula potensi munculnya perbedaan persepsi, kepentingan, dan cara bertindak yang dapat memicu terjadinya

hambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

Kesenjangan implementasi terjadi ketika terdapat perbedaan signifikan antara kebijakan yang dirumuskan (kebijakan formal) dengan praktek pelaksanaannya di lapangan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tersebut adalah banyaknya titik pengambilan keputusan dan aktor yang terlibat, sebagaimana dinyatakan dalam kutipan tersebut. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan, maka semakin besar potensi terjadinya hambatan, ketidaksesuaian pemahaman, hingga resistensi yang

berujung pada tidak tercapainya tujuan kebijakan sesuai yang dirancang.²¹

Kesenjangan implementasi kurikulum dalam penelitian ini terlihat dari adanya perbedaan antara standar yang ditetapkan dengan praktik nyata di kelas. Pada tahap perencanaan, guru telah menyusun RPP sebagai tuntutan kurikulum, namun belum mencantumkan media pembelajaran secara lengkap sehingga belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan. Pada tahap pelaksanaan, proses pembelajaran sudah berjalan komunikatif dan guru mampu mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, tetapi masih ditemukan kendala seperti rendahnya konsentrasi siswa,

²¹ Jeffrey L. Pressman and Aaron Wildavsky, *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland* (Los Angeles: Universitas Of California Press, 1984), 87-95.

kurangnya partisipasi aktif, serta penggunaan metode yang masih didominasi ceramah dan demonstrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran aktif belum diterapkan secara optimal. Sementara itu, pada tahap evaluasi, guru telah menggunakan penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik, namun pelaksanaannya belum konsisten, terutama dalam pengelolaan penilaian afektif dan penggunaan penilaian autentik yang masih terbatas pada bentuk lisan dan tulis sederhana.²²

Hal ini juga selaras yang menurut Denis Lawton kesenjangan implementasi kurikulum terjadi karena

²² Vicky Fitriani Herdiana and Evi Muafiah, “Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Kelas Iv Di Mi Al-Jihad Karanggebang, Jetis, Ponorogo,” *Jurnal Ilmiah Al-Thifl* Vol 2 No 1 (2022): 43–58, [https://repository.iainponorogo.ac.id/1362/1/972-Article Text-3278-1-10-20220825.pdf](https://repository.iainponorogo.ac.id/1362/1/972-Article%20Text-3278-1-10-20220825.pdf).

adanya perbedaan mendasar antara kurikulum sebagai rancangan normatif dan kurikulum sebagai praktik di lapangan. Implementasi kurikulum tidak hanya bergantung pada isi dokumen yang telah disusun, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik tempat kurikulum tersebut dijalankan. Ketidaksesuaian antara harapan yang dituangkan dalam kebijakan kurikulum dan kenyataan di ruang kelas menciptakan celah atau kesenjangan implementasi. Oleh karena itu, agar implementasi kurikulum dapat berjalan optimal, diperlukan kesesuaian antara teori dan praktik serta keterlibatan semua pihak terkait dalam proses implementasi.

Dalam hal ini disampaikan Lawton lewat kutipannya ``*Discusses the idea of curriculum and*

the need to remove the gap between theory and practice'' yang berarti Membahas konsep kurikulum serta pentingnya menghilangkan kesenjangan antara teori dan praktik dalam pelaksanaannya. Dari pernyataan diatas bisa dideskripsikan bahwasanya pentingnya upaya untuk menghilangkan kesenjangan antara teori dan praktik dalam implementasi kurikulum. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kurikulum tidak hanya bergantung pada rumusan teoritis semata, melainkan juga pada sejauh mana kurikulum tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pembelajaran nyata di lapangan.²³

J. Galen Saylor and William Alexander in his book Curriculum Planning for Better Teaching and Learning The curriculum is the sum total of the

²³ Denis Lawton et al., *Theory and Practice of Curriculum Studies* (London: Routledge & Kegan Paul, 1978), 176-186.

school's efforts to influence learning, whether in the classroom, on the playground, or out of school. Whether the efforts result in the learnings that teachers desire depends on the many factors which affect the individual pupil's interaction with the situations arranged. Whether the experiences had correlated or conflict with those that pupils have outside the school must also be answered for each individual. The significant conclusion for the teachers is that everything they do to stimulate and direct pupils' experience and subsequent learning must be considered in curriculum planning.

Kurikulum dipahami sebagai keseluruhan upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mempengaruhi proses belajar peserta didik, baik yang berlangsung di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun di luar lingkungan sekolah. Keberhasilan upaya tersebut dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi interaksi setiap individu peserta didik dengan situasi-situasi pembelajaran yang telah dirancang. Setiap pengalaman belajar yang

diperoleh peserta didik perlu dievaluasi apakah pengalaman tersebut selaras atau justru bertentangan dengan pengalaman yang mereka peroleh di luar sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas, interaksi, maupun situasi yang diciptakan oleh guru untuk merangsang dan mengarahkan pengalaman serta pembelajaran peserta didik harus dipertimbangkan secara menyeluruh dalam perencanaan kurikulum.²⁴

Dengan demikian, kurikulum tidak hanya mencakup materi ajar yang formal, tetapi juga meliputi berbagai pengalaman belajar yang mempengaruhi perkembangan peserta didik secara holistik. Tidak semua pakar kurikulum memiliki

²⁴ William M. Alexander and J Galen Saylor, *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1954), 5.

pandangan yang luas dan komprehensif mengenai hakikat kurikulum. Salah satu pakar yang memiliki pandangan berbeda adalah Hilda Taba, yang mendefinisikan kurikulum sebagai suatu cara untuk mempersiapkan anak agar mampu berprestasi dan berperan sebagai anggota masyarakat yang produktif. Dalam perspektif Taba, setiap kurikulum, apapun model dan polanya, senantiasa memiliki komponen-komponen tertentu yang menjadi elemen dasar dalam perancangannya. Komponen tersebut mencakup pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran pembelajaran, pemilihan dan pengorganisasian bahan ajar serta isi pelajaran, perancangan bentuk dan kegiatan belajar-mengajar, serta evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik.

Perbedaan antara kurikulum, pada dasarnya, terletak pada penekanan yang diberikan pada masing-masing unsur tersebut sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pendidikan yang diinginkan. Dengan demikian, kurikulum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat rencana dan aktivitas pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membentuk generasi yang mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

Kurikulum memiliki peranan penting dalam lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum memiliki posisi yang sentral dalam proses pendidikan serta kurikulum merupakan syarat mutlak dan bagian yang tidak

²⁵ S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 7.

terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Peranan kurikulum sangatlah penting bagi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, ada tiga peranan kurikulum yaitu;

Peranan konservatif Kurikulum memiliki tanggung jawab dalam mentransmisikan warisan sosial kepada generasi muda, Peranan kritis atau evaluatif Kurikulum ikut serta aktif berpartisipasi dalam mengontrol sosial dan menekankan unsur berpikir kritis yang mana lembaga pendidikan tidak hanya semata-mata mewariskan kebudayaan yang ada melainkan menilai dan memilih unsur budaya yang akan di wariskan, Peranan kreatif Kurikulum menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan pada masa sekarang dan yang akan

datang dalam masyarakat dengan cara menciptakan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan konstruktif.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat di deskripsikan bahwa kurikulum memiliki peran yang sangat vital dalam proses pendidikan, karena menjadi salah satu komponen utama yang menentukan arah, isi, dan tujuan pendidikan.

Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi juga memiliki tiga peranan strategis yang saling melengkapi. Pertama, peranan konservatif, di mana kurikulum berperan dalam mentransmisikan warisan sosial dan budaya kepada generasi muda sehingga identitas dan nilai-nilai masyarakat tetap

²⁶ Muhammad Nasir and Muhammad, “Analisis Perkembangan Kurikulum Di Indonesia : Masa Lalu, Kini, Dan Masa Depan,” *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* Vol 4 No 2 (2024): 228–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/learning.v4i2.2846>.

terjaga. Kedua, peranan kritis atau evaluatif, yaitu peran kurikulum dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik serta melakukan seleksi terhadap budaya yang layak diwariskan. Ketiga, peranan kreatif, yang menuntut kurikulum mampu berinovasi dan menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan serta tantangan zaman. Dengan demikian, kurikulum menjadi alat yang dinamis dalam mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi perkembangan dan perubahan sosial di masa depan.

Kurikulum merupakan pedoman mendasar dalam setiap pembelajaran. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya proses pendidikan, baik tidaknya siswa menyerap mata pelajaran, tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan tergantung dari

kurikulum yang digunakan. Peranan kurikulum dalam pendidikan formal sekolah atau lembaga pendidikan lainnya merupakan peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri, khususnya dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.²⁷ Ada tiga peran kurikulum yang dianggap sangat penting, yaitu :

a. Peranan Konservatif

Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial pada generasi muda. Dengan demikian, sekolah sebagai suatu Lembaga sosial dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku siswa sesuai dengan berbagai nilai sosial yang

²⁷ Farhany Zahra Qurrata Ainy and Anne Effane, "Peran Kurikulum Dan Fungsi Kurikulum," *Karimah Tauhid: Karya Ilmiah Mahasiswa Bertauhid* Vol 2 No 1 (2023): 153–156, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7712>.

ada dalam masyarakat, sejalan dengan peranan Pendidikan sebagai suatu proses sosial. Menurut Romine.

*In sense the conservative role provides what may be called 'social cement'. It contributes to like-mindedness and provides for behavior which is consistent with values already accepted. It deals with what is sometimes known as the core of 'relative universals' yang berarti dengan adanya peranan konservatif ini, maka sesungguhnya kurikulum itu berorientasi pada masa lampau. Meskipun demikian, peranan ini sangat mendasar sifatnya.*²⁸

b. Peranan Kritis atau Evaluatif

²⁸ Walter C. Romine, *Building the High School Curriculum* (New York: The Ronald Press Company, 1954), 17.

Kebudayaan senantiasa berubah dan bertambah. Sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai dan memilih berbagai unsur kebudayaan yang berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberi penekanan pada unsur berpikir kritis.

c. Peranan Kreatif

Kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif, dalam artian menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan mendatang. Untuk memantu setiap Individu dalam mengembangkan semua potensi yang ada padanya, maka dari itu kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir,

kemampuan, dan keterampilan yang baru, yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari ketiga peranan kurikulum tersebut harus berjalan secara seimbang, atau dengan kata lain terdapat keharmonisan di antara ketiga. Dengan demikian, kurikulum dapat memenuhi tuntutan waktu dan keadaan dalam membawa siswa menuju kebudayaan masa depan.²⁹

Menurut Michael Fullan terdapat sembilan faktor penting yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) karakteristik dari inovasi atau proyek perubahan, (2) peran lokal, dan (3) faktor eksternal berikut penjelasannya :

1. Karakteristik dari inovasi atau proyek perubahan.

²⁹ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, ed. Boyke Ramdhani (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 12-13.

a. *Kebutuhan (Need)* Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, banyak inovasi dicoba tanpa pemeriksaan yang cermat mengenai apakah inovasi tersebut memenuhi apa yang dianggap sebagai kebutuhan prioritas. Guru, misalnya, sering kali tidak melihat perlunya perubahan yang dianjurkan. Beberapa studi skala besar di Amerika Serikat menegaskan pentingnya menghubungkan kebutuhan dengan keputusan tentang inovasi atau arah perubahan.

b. *Kejelasan (Clarity)* Kejelasan (mengenai tujuan dan cara mencapainya) merupakan masalah yang terus-menerus muncul dalam proses perubahan. Bahkan ketika telah

tercapai kesepakatan bahwa suatu bentuk perubahan memang diperlukan seperti ketika para guru ingin meningkatkan salah satu aspek kurikulum atau memperbaiki kondisi sekolah secara keseluruhan perubahan yang diadopsi sering kali tidak menjelaskan secara jelas apa yang sebenarnya harus dilakukan secara berbeda oleh para guru.

- c. Kompleksitas (*Complexity*) Kompleksitas merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu inovasi atau perubahan dalam pendidikan. Kompleksitas merujuk pada tingkat kesulitan serta sejauh mana perubahan tersebut menuntut penyesuaian

dari individu yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, seperti guru atau tenaga kependidikan lainnya. Besarnya perubahan yang diperlukan tentu bervariasi, tergantung pada kondisi awal setiap individu atau kelompok. Namun demikian, secara umum setiap bentuk perubahan dapat dianalisis dari tiga aspek utama, yaitu tingkat kesulitan yang dihadapi, keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan perubahan tersebut, serta sejauh mana perubahan tersebut mengharuskan adanya penyesuaian terhadap keyakinan, strategi pembelajaran, dan penggunaan materi ajar.

d. Kualitas dan Kepraktisan Program Faktor terakhir yang secara langsung berkaitan dengan sifat perubahan adalah kualitas dan kepraktisan dari proyek perubahan tersebut apakah berupa kurikulum baru, kebijakan baru, atau restrukturisasi sekolah. Sejarah mengenai kualitas dari berbagai upaya perubahan jika dikaitkan dengan tiga variabel lainnya (kebutuhan, kejelasan, dan kompleksitas) memberikan gambaran yang signifikan. Mengatakan bahwa pentingnya kualitas suatu perubahan sudah jelas dengan sendirinya berarti meremehkan bagaimana keputusan untuk memulai suatu inovasi sebenarnya dibuat.³⁰

³⁰ Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change*

2. Karakteristik Lokal

Kondisi sosial suatu institusi pendidikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi perubahan. Fullan menjelaskan bahwa perubahan tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti organisasi tempat individu bekerja, serta peristiwa dan aktivitas baik yang direncanakan maupun yang tidak yang mempengaruhi produktivitas suatu upaya perubahan.

- a. Distrik Sekolah, Telah kita lihat bahwa keputusan adopsi sering kali dibuat tanpa tindak lanjut yang memadai, dan bahwa

berbagai kesulitan (realitas objektif) yang melekat dalam proses perubahan tidak dipahami dengan baik. Sebagian besar upaya perubahan kolektif dalam dunia pendidikan tampaknya mengalami kegagalan, dan kegagalan ini berarti kekecewaan, waktu yang terbuang, perasaan tidak mampu, kurangnya dukungan, serta rasa putus asa. Karena pengenalan inovasi sudah menjadi bagian dari kehidupan di sebagian besar sistem sekolah, maka distrik-distrik sekolah membangun rekam jejak dalam mengelola perubahan. Apa pun rekam jejak tersebut pada titik waktu tertentu, hal itu menjadi

prasyarat penting dalam kaitannya dengan inisiatif baru berikutnya.

- b. Karakteristik Dewan Sekolah dan Komunitas, Sangat sulit untuk menggeneralisasi peran komunitas dan dewan sekolah dalam kaitannya dengan implementasi. Smith dan Keith (1971) serta Gold dan Miles (1981) menceritakan kisah-kisah menyakitkan tentang apa yang terjadi ketika komunitas kelas menengah tidak menyukai inovasi yang mereka saksikan di sekolah-sekolah mereka. Dewan sekolah dapat mempengaruhi implementasi secara tidak langsung, misalnya melalui perekrutan atau pemberhentian kepala sekolah yang

berorientasi pada reformasi. Perubahan demografis juga seringkali memberikan tekanan yang semakin besar kepada sekolah untuk mengadopsi, meskipun belum tentu mengimplementasikan, kebijakan-kebijakan baru.

- c. Kepala Sekolah, keberhasilan implementasi perubahan di sekolah sangat bergantung pada peran aktif kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan. Dukungan kepala sekolah tidak hanya mempengaruhi legitimasi suatu program inovasi, tetapi juga berperan penting dalam memberikan motivasi, arahan, serta fasilitas yang diperlukan oleh guru dalam menjalankan perubahan. Oleh karena itu,

kepemimpinan kepala sekolah yang responsif dan partisipatif menjadi kunci utama dalam menjembatani kebijakan di tingkat atas dengan pelaksanaannya di tingkat satuan Pendidikan.

- d. Guru, Baik karakteristik guru secara individu maupun faktor kolektif dan kolegal berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi dan sejumlah peneliti lainnya menemukan bahwa kondisi psikologis seorang guru dapat membuatnya lebih atau kurang cenderung untuk mempertimbangkan serta mengambil tindakan terhadap suatu perbaikan. Beberapa guru, tergantung pada kepribadiannya, pengalaman sebelumnya,

serta tahapan dalam perjalanan kariernya, cenderung lebih mampu mengaktualisasikan diri dan memiliki rasa efikasi yang lebih tinggi. Hal ini mendorong mereka untuk bertindak dan terus berupaya dalam proses yang diperlukan guna mencapai keberhasilan implementasi.³¹

3. Faktor Eksternal

Kegagalan implementasi kebijakan pendidikan sering kali disebabkan oleh ketidakharmonisan antara pembuat kebijakan dan pelaksana di tingkat lokal. Ketimpangan ini muncul karena minimnya pemahaman dan komunikasi antara kedua belah pihak, yang

³¹ Fullan, 93-97

berasal dari perbedaan latar belakang, perspektif, dan kepentingan. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi pendidikan sangat bergantung pada kualitas hubungan dan kolaborasi yang dibangun antara lembaga pemerintah dan praktisi di lapangan, serta pentingnya mempertimbangkan aspek implementasi sejak tahap perencanaan kebijakan.³²

Menurut Marsh mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru, dan dukungan internal di dalam kelas. Dari berbagai faktor tersebut, guru merupakan faktor penentu

³² Fullan, 100.

utama. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah sangat ditentukan oleh faktor guru tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka implementasi kurikulum tidaklah akan berhasil.³³

B. Implementasi Kurikulum

Menurut Ornstein & Hunkins Implementasi kurikulum merupakan proses penerapan kurikulum yang telah dirancang ke dalam praktik pembelajaran di lapangan. Proses ini tidak hanya sebatas menjalankan rencana pembelajaran yang tertulis dalam dokumen kurikulum, tetapi juga mencakup bagaimana guru, sebagai pelaksana utama, menafsirkan dan menerjemahkan kurikulum tersebut dalam kegiatan

³³ Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, 239.

belajar mengajar. Keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keyakinan dan pandangan guru terhadap kurikulum, kondisi institusi atau sekolah tempat pelaksanaan berlangsung, serta harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor tersebut menjadi penting agar implementasi kurikulum dapat berjalan secara efektif dan mampu menghasilkan proses pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman.³⁴

Menurut Ralph W. Tyler dalam bukunya *Basic Principles of Curriculum and Instruction*, implementasi kurikulum berarti menerapkan tujuan pembelajaran

³⁴ Allan C. Ornstein and Francis P. Hunkins, *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues (7th Ed.)* (New York: Pearson, 2018), 34.

yang telah dirancang ke dalam kegiatan belajar yang nyata di kelas. Artinya, kurikulum tidak hanya berupa rencana atau dokumen, tetapi harus benar-benar dijalankan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Guru memiliki peran penting dalam hal ini, karena guru yang menentukan bagaimana tujuan pembelajaran bisa dicapai melalui kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tyler menekankan bahwa setiap kegiatan belajar harus dirancang agar membantu siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengalaman belajar yang diberikan perlu diatur secara terencana, dari yang mudah ke yang lebih sulit, agar siswa dapat berkembang secara bertahap. Ia juga menambahkan bahwa evaluasi harus dilakukan untuk melihat apakah kegiatan belajar tersebut benar-benar membantu siswa mencapai tujuan yang diinginkan.

Dengan demikian, implementasi kurikulum menurut Tyler adalah upaya nyata untuk mengubah rencana pendidikan menjadi pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa.³⁵

Implementasi kurikulum pada madrasah dalam penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Pada tahap perencanaan, madrasah melakukan identifikasi terhadap kondisi dan kebutuhan siswa serta melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan, peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Sementara itu, pada tahap evaluasi, guru

³⁵ Ralph W. Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction* (London: The University of Chicago Press, 1949), 61-62.

menyesuaikan bentuk penilaian, kompetensi, dan indikator pembelajaran dengan kemampuan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optima.³⁶

Implementasi kurikulum merupakan suatu proses yang bersifat dinamis, artinya pelaksanaannya tidak dapat dipandang sebagai kegiatan yang bersifat statis atau sekali selesai. Proses implementasi menuntut adanya penyesuaian (adaptasi) terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi praktik pendidikan, seperti karakteristik peserta didik, kemampuan guru, ketersediaan sumber daya, serta perubahan sosial dan budaya di lingkungan sekolah dalam konteks ini,

³⁶ Evi Muafiah, Ayunda Riska Puspita, and Vivi Vellanita Wanda Damayanti, "Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Pada Dua Sekolah Inklusi Di Ponorogo," *Musawa : Jurnal Gender Dan Islam* Vol 19 No (2021): 140–56, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/musawa.2020.192.141-156>.

adaptasi menjadi unsur penting karena kurikulum yang dirancang secara nasional belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal sekolah. Oleh karena itu, guru sebagai pelaksana utama kurikulum dituntut memiliki kemampuan reflektif untuk menyesuaikan strategi, metode, dan materi pembelajaran agar tetap relevan dengan situasi aktual di lapangan.

Selain adaptasi, implementasi kurikulum juga menuntut adanya perubahan berkelanjutan (*continuous improvement*). Hal ini sejalan dengan pandangan Carl dalam bukunya *Teacher Empowerment Through Curriculum Development: Theory into Practice* yang menyatakan bahwa implementasi kurikulum tidak berhenti pada tahap pelaksanaan, melainkan terus berkembang melalui proses evaluasi, revisi, dan inovasi

sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum harus dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang responsif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan tuntutan globalisasi.³⁷ Selain itu implementasi juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan implementasi kurikulum diantaranya sebagai berikut :

- a. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesenjangan Implementasi Kurikulum.

Menurut Posner faktor-faktor kontekstual yang berfungsi sebagai batasan atau kendala dalam proses pembelajaran, dan secara langsung berdampak terhadap implementasi kurikulum.

Faktor-faktor ini mencakup berbagai aspek

³⁷ Arend E. Carl, *Teacher Empowerment Through Curriculum Development: Theory into Practice* (Cape Town, Afrika Selatan: Juta & Co., Ltd, 1995), 165.

eksternal seperti sumber daya, sarana prasarana, waktu, kebijakan, dan kondisi sosial sekolah yang berada di luar kendali guru atau perancang kurikulum. Dalam contoh yang dikemukakan, Posner mengilustrasikan bahwa suatu kurikulum baru dalam mata pelajaran pendidikan jasmani yang menekankan aspek kebugaran mungkin memerlukan tambahan peralatan. Apabila sekolah tidak mampu menyediakan peralatan tersebut, maka implementasi kurikulum akan mengalami hambatan.

Secara konseptual, pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya ditentukan oleh kualitas rancangan kurikulumnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan lingkungan pendidikan

dalam menyediakan kondisi yang mendukung. Dengan demikian, kesenjangan antara kurikulum yang direncanakan (*intended curriculum*) dan kurikulum yang diimplementasikan (*implemented curriculum*) dapat disebabkan oleh keterbatasan faktor-faktor bingkai tersebut. Hal ini relevan untuk dianalisis dalam konteks evaluasi pelaksanaan kurikulum, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya Pendidikan.³⁸

Berikut adalah empat faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan implementasi kurikulum diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Guru

Guru adalah elemen kunci dalam implementasi kurikulum. Kompetensi

³⁸ George J. Posner, *Analyzing the Curriculum 2nd Ed* (New York: McGraw Hill, 1995), 193.

pedagogik, pemahaman terhadap isi kurikulum, serta sikap dan motivasi guru sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kurikulum.

- a. Kompetensi Pedagogik: Kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.
- b. Pemahaman terhadap Kurikulum: Pengetahuan guru mengenai tujuan, isi, dan metode kurikulum memungkinkan mereka untuk mengimplementasikan kurikulum dengan tepat.
- c. Sikap dan Motivasi: Sikap positif dan motivasi tinggi dari guru dapat

meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung perubahan kurikulum.³⁹

2. Faktor Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah

Kepemimpinan yang efektif dan manajemen sekolah yang baik sangat mempengaruhi implementasi kurikulum.

a. Kepemimpinan Kepala Sekolah: Kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan mampu mengarahkan serta memotivasi staf untuk melaksanakan kurikulum dengan baik.

b. Manajemen Sumber Daya: Pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif mendukung kelancaran implementasi kurikulum.

³⁹ Ornstein and Hunkins, *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues (7th Ed.)*, 213.

- c. Budaya Sekolah: Menciptakan budaya sekolah yang mendukung perubahan dan inovasi dalam pembelajaran.⁴⁰
3. Faktor Pelatihan dan Pengembangan Profesional
- Pelatihan dan pengembangan profesional guru merupakan komponen penting dalam peningkatan kompetensi serta efektivitas implementasi kurikulum. Melalui pelatihan yang terarah dan berkelanjutan, guru dapat memperkuat pengetahuan, keterampilan pedagogik, serta kemampuan adaptif terhadap perubahan kebijakan dan inovasi pendidikan. Secara umum, pelatihan dan pengembangan profesional mencakup tiga bentuk utama, yaitu

⁴⁰ George E. Hall and Susan M. Hord, *Change in Schools: Facilitating the Process* (New York: SUNY Press, 1987), 88

pelatihan awal, pelatihan berkelanjutan, serta *mentoring* dan *coaching*.

a. Pelatihan Awal

Pelatihan awal adalah pendidikan dan pelatihan yang diterima calon guru sebelum terjun ke dunia kerja. Program ini berfungsi membekali guru dengan pemahaman dasar tentang teori pendidikan, strategi pembelajaran, serta penerapan kurikulum. Pelatihan awal biasanya dilaksanakan melalui program pendidikan profesi guru (PPG) atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), dan menjadi dasar

bagi guru dalam mengelola pembelajaran secara efektif.⁴¹

b. Pelatihan Berkelanjutan

Pelatihan berkelanjutan merupakan kegiatan pengembangan profesional yang dilaksanakan selama masa kerja guru. Tujuannya adalah memperbarui kompetensi agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan peserta didik. Bentuknya dapat berupa workshop, seminar, pelatihan daring, atau kegiatan kolaboratif antar guru. Pelatihan ini membantu guru mengadopsi strategi

⁴¹ Fullan, *The New Meaning of Educational Change, Fourth Edition*, 264-265.

pembelajaran inovatif dan meningkatkan kualitas pengajaran.

c. *Mentoring dan Coaching*

Mentoring dan *coaching* adalah bentuk pendampingan profesional yang dilakukan oleh guru berpengalaman atau ahli untuk membantu guru lain menghadapi tantangan dalam praktik mengajar dan penerapan kurikulum. *Mentoring* menekankan pada transfer pengalaman dan bimbingan, sedangkan *coaching* lebih berfokus pada pemberian umpan balik konstruktif guna meningkatkan kinerja guru. Kedua pendekatan ini memperkuat kolaborasi,

refleksi, serta budaya belajar di lingkungan sekolah.⁴²

4. Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya

Lingkungan sosial dan budaya tempat sekolah berada sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Setiap sekolah berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki nilai, kebiasaan, dan pandangan tertentu terhadap pendidikan.

- a. Nilai dan norma masyarakat menentukan bagaimana warga memandang pendidikan. Bila nilai masyarakat sejalan dengan tujuan kurikulum, penerapannya akan lebih mudah. Namun, bila berbeda, bisa muncul penolakan terhadap perubahan.

⁴² Fullan, 266.

- b. Dukungan orang tua juga berperan besar.

Orang tua yang terlibat dalam kegiatan sekolah dan mendukung anaknya belajar membantu meningkatkan hasil belajar serta keberhasilan penerapan kurikulum.

- c. Keterbukaan terhadap perubahan memengaruhi seberapa cepat masyarakat menerima pembaruan pendidikan.

Masyarakat yang terbuka cenderung mendukung inovasi, sementara yang tertutup lebih lambat beradaptasi.⁴³

C. Macam-Macam Kurikulum

⁴³ Carl, *Teacher Empowerment Through Curriculum Development: Theory into Practice*, 260.

Kurikulum secara etimologis adalah tempat berlari dengan kata yang berasal dari Bahasa latin curir yaitu pelari, dan curere yang artinya tempat berlari.⁴⁴

Di dalam buku John Franklin Bobbitt (1918) yang berjudul *In The Curriculum* menyatakan bahwa *“The word curriculum is Latin for a race-course, or the race itself, a place of deeds, or a series of deeds. As applied to education, it is that series of things ‘which children and youth must do- and experience by way of developing abilities to do the things well that make up the affairs of adult life; and to be in all respects what adults should be’”* Kata curriculum berasal dari bahasa Latin yang berarti lintasan perlombaan, atau perlombaan itu sendiri sebuah tempat untuk berbuat, atau rangkaian perbuatan. Dalam konteks pendidikan,

⁴⁴ Oemar Hamalik, *Kurikulum Dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 16.

kurikulum adalah serangkaian hal yang harus dilakukan dan dialami oleh anak-anak dan remaja guna mengembangkan kemampuan untuk melakukan berbagai hal dengan baik yang merupakan bagian dari kehidupan orang dewasa, serta menjadi pribadi yang sepenuhnya mencerminkan apa yang seharusnya dimiliki oleh orang dewasa.⁴⁵

Dari deskripsi diatas bahwa Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik, namun berbeda dalam pendekatan implementasinya. Kurikulum 2013 cenderung menggunakan sistem yang lebih terstruktur dan berorientasi pada pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan, sedangkan Kurikulum Merdeka

⁴⁵ John Franklin Bobbitt, *In The Curriculum* (New York: Houghton Mifflin Company, 1981), 42.

memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga lebih adaptif terhadap kebutuhan, potensi, dan perkembangan peserta didik. Kurikulum 2013 juga dirancang dengan penekanan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar, integrasi pendidikan karakter, serta penguatan pendekatan saintifik dalam pembelajaran.⁴⁶ Kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka akan dijelaskan dibawah ini :

1. Kurikulum 2013

a. Dasar Normatif Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 memiliki dasar normatif yang kuat, baik secara konstitusional maupun regulatif. Kurikulum 2013 memiliki landasan

⁴⁶ Hamdan Syukril Imama et al., “Perbandingan Kurikulum Di Indonesia: Kurikulum 2013 (K13) Dengan Kurikulum Merdeka,” *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* Vol 1 No 3 (2025): 141–67, <https://ejournal.merivamedia.com/index.php/meriva/article/view/62/60>.

konstitusional yang kuat, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan semua itu diatur oleh undang-undang.⁴⁷

Serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur berbagai aspek penting dalam sistem pendidikan di Indonesia, termasuk dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah; jalur, jenjang, dan jenis

⁴⁷ MPR RI, *UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945* (Jakarta: Setjen MPR RI, 2020).

pendidikan; serta berbagai aspek lainnya terkait penyelenggaraan Pendidikan.⁴⁸ Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 adalah perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini mengubah dan menambah beberapa definisi serta lingkup standar nasional pendidikan, dan menetapkan standar kompetensi lulusan sebagai acuan pengembangan standar Pendidikan.⁴⁹

Implementasi teknis Kurikulum 2013 diatur melalui berbagai Permendikbud, seperti Permendikbud Nomor 67 sampai dengan 71

⁴⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” Pub. L. No. 20 (2003), <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>.

⁴⁹ *Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*, 2013, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5364/pp-no-32-tahun-2013>.

Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI. Namun, dalam rentang nomor yang Anda sebutkan, tidak ada Permendikbud yang spesifik mengatur kurikulum secara umum untuk semua tingkatan pendidikan. Untuk implementasi Kurikulum 2013, yang menjadi panduan utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.⁵⁰

b. Aturan Implementatif

Aturan implementatif Kurikulum 2013 tertuang dalam berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan

⁵⁰ *Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013.*

Kebudayaan. Regulasi tersebut antara lain Permendikbud Nomor 67 tahun 2013 adalah peraturan tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Peraturan ini berisi landasan filosofis, sosiologis, psiko pedagogis, dan yuridis yang menjadi acuan pengembangan kurikulum untuk tingkat nasional dan daerah, serta pedoman pengembangan kurikulum di jenjang SD/MI.⁵¹

Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013, Tentang peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, yang bertujuan untuk mengatur dan menetapkan buku-buku yang layak untuk

⁵¹ *Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013.*

digunakan dalam pembelajaran di jenjang tersebut. kompetensi inti, serta kompetensi dasar di setiap jenjang pendidikan.⁵² Selanjutnya, penyempurnaan implementasi Kurikulum 2013 diperkuat melalui Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang peraturan pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013, yang memungkinkan sekolah dasar dan menengah kembali menerapkan Kurikulum 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015.⁵³

c. Strategi Penerapan

Strategi penerapan Kurikulum 2013 dilakukan melalui langkah-langkah sistematis

⁵² *Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013*, 2013, http://repository.unand.ac.id/20955/1/permen_tahun2013_nomor71.pdf.

⁵³ *Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014*, 2014, Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006.pdf.

yang melibatkan berbagai aspek pendidikan. Pertama, penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan menjadi fokus utama melalui pelatihan, pendampingan, serta pengembangan komunitas belajar. Hal ini bertujuan agar guru mampu memahami dan mengimplementasikan pendekatan saintifik, pembelajaran berbasis aktivitas, serta penilaian autentik sesuai tuntutan kurikulum. Kedua, pemerintah menyediakan sarana dan sumber belajar, termasuk buku teks pelajaran dan panduan guru, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Ketiga, penerapan Kurikulum 2013 dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan satuan pendidikan, sebagaimana diatur dalam Permendikbud

Nomor 160 Tahun 2014 yang memberikan fleksibilitas penggunaan kurikulum.⁵⁴

Selain permendikbud Nomor 160 tahun 2003 penerapan Kurikulum 2013 memiliki dasar hukum yang jelas. Secara khusus, pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi payung hukum seluruh kebijakan kurikulum di Indonesia. Aturan tersebut kemudian dijabarkan lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta diperkuat oleh Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, sehingga pelaksanaan Kurikulum

⁵⁴ *Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014.*

2013 memiliki legitimasi yang kuat baik secara normatif maupun praktis.⁵⁵

d. Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan menekankan pada pendekatan ilmiah (*scientific approach*), penguatan pendidikan karakter, serta penilaian autentik yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Kelebihan

⁵⁵ MPR RI, *UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*.

- a. Siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah.
- b. Adanya penilaian dari semua pihak penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja tetapi juga dapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap dan lain-lain
- c. Standar penilaian mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi.

2. Kekurangan

- a. Banyak guru salah memahami Kurikulum 2013 karena menganggap guru tidak perlu menjelaskan materi di kelas, padahal beberapa mata pelajaran tetap membutuhkan penjelasan dari guru.

- b. Kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan scientific.
- c. Beban belajar siswa dan termasuk guru terlalu berat, sehingga waktu belajar disekolah terlalu lama.⁵⁶

2. Kurikulum Merdeka

a. Dasar Normatif

Kurikulum Merdeka memiliki landasan normatif yang kuat sebagai acuan legal dalam penyusunan dan pelaksanaannya di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Dasar hukum utama dari

⁵⁶ Imas Kurniasih and Berlin Sani, *Implementasi Kurikulum 2013 Konsep & Penerapan* (Surabaya: Kata Pena, 2014), 40-42.

kurikulum ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Pasal 36 ayat (2), yang menyatakan bahwa kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip diversifikasi sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, serta kebutuhan peserta didik. Ketentuan ini memberikan pijakan hukum yang jelas bagi fleksibilitas.⁵⁷

Kurikulum Merdeka, sehingga memungkinkan implementasinya menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan tanpa mengabaikan tujuan pendidikan nasional secara menyeluruh. Selain Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, legitimasi pelaksanaan

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kurikulum Merdeka juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah, yang berarti pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.⁵⁸

Dari sisi operasional, kerangka kurikulum dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 yang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

ini menegaskan bahwa kerangka dan struktur kurikulum bersifat nasional, namun tetap memberi ruang bagi inovasi di tingkat satuan pendidikan, termasuk dalam penerapan Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel, kontekstual, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Implementasi Kurikulum Merdeka secara resmi diperkuat melalui terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga jenjang pendidikan menengah.

Regulasi ini menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum satuan pendidikan, di mana setiap satuan pendidikan diberi

kewenangan untuk menetapkan kurikulum yang akan digunakan secara mandiri.⁵⁹ Kurikulum ini menekankan pada materi-materi esensial, pengembangan kompetensi dasar peserta didik, serta penguatan karakter melalui internalisasi nilai-nilai dalam Profil Pelajar Pancasila. Permendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024 mulai berlaku sejak tanggal 26 Maret 2024, dan turut mengatur masa transisi dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka yang direncanakan berlangsung hingga tahun ajaran 2026/2027, atau sampai tahun ajaran 2027/2028 bagi daerah tertinggal. Ketentuan ini

⁵⁹ Permendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024 Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/281847/permendikbudristek-no-12-tahun-2024>.

memberikan kepastian hukum sekaligus arah kebijakan yang jelas dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka secara bertahap dan terencana.⁶⁰

Istilah merdeka belajar telah disampaikan dan didefinisikan oleh para ahli,⁶¹ salah satunya adalah Menurut Carl Rogers dalam bukunya yang berjudul *Freedom to Learn*. “*I am talking about the student who says, “I am discovering, drawing in from the outside, and making that which is drawn in a real part of me”*” Siswa yang berkata, 'Saya sedang menemukan, menyerap dari luar, dan

⁶⁰ Permendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024 Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.

⁶¹ Alrizka Hairi Dilfa et al., *Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum Merdeka* (Malang: Litmus, 2023), 13.

menjadikan apa yang saya serap itu sebagai bagian nyata dari diri saya, dari Pernyataan tersebut menekankan bahwa proses belajar yang sejati terjadi ketika siswa secara aktif terlibat dalam menemukan dan menyerap pengetahuan, serta menginternalisasikannya.⁶²

b. Aturan Implementatif

Kurikulum Merdeka merupakan salah satu bentuk inovasi pendidikan yang dirancang oleh pemerintah untuk menjawab tantangan perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, serta dampak dari krisis pembelajaran pasca pandemi. Implementasi Kurikulum Merdeka secara nasional didasarkan pada Permendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang

⁶² Carl Rogers, *Freedom to Learn* (California: Printed in the United States of America, 1969), 3.

Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah. Peraturan ini menjadi dasar hukum utama yang menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum operasional yang dapat diterapkan oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas pembelajaran, penyederhanaan materi, serta penguatan karakter melalui pengembangan Profil Pelajar Pancasila.⁶³

Selain itu, implementasi teknis Kurikulum Merdeka diperkuat oleh Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen

⁶³ *Permendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024 Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.*

Pendidikan (BSKAP) Nomor 033/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran. Capaian pembelajaran ini menggantikan struktur Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD) pada kurikulum sebelumnya, dan menjadi rujukan dalam penyusunan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran (ATP). Sementara itu, struktur kurikulum secara keseluruhan diatur dalam Keputusan Kepala BSKAP Nomor 010/H/KR/2022, yang memuat pembagian alokasi waktu dan mata pelajaran serta porsi pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Dalam mendukung pelaksanaannya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga menyediakan berbagai panduan dan platform pendukung, seperti

Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan buku teks Kurikulum Merdeka.⁶⁴

Dengan adanya dasar hukum dan perangkat implementatif yang jelas, Kurikulum Merdeka diharapkan dapat dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur di seluruh satuan pendidikan. Khusus untuk madrasah, implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan melalui pendekatan bertahap oleh Kementerian Agama, dengan tetap memperhatikan prinsip dasar kurikulum nasional dan penguatan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, pelaksanaan Kurikulum Merdeka tidak hanya bertumpu pada inovasi kebijakan, tetapi juga ditopang oleh

⁶⁴ *Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan (BSKAP)*
Nomor 033/H/KR/2022, 2022,
https://kurikulum.kemdikbud.go.id/file/1692927593_manage_file.pdf.

regulasi dan dukungan teknis yang komprehensif.

c. Strategi Penerapan

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, pemerintah memberikan tiga opsi penerapan yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan sesuai dengan kesiapan dan kapasitas masing-masing, yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Pertama, Mandiri Belajar, satuan pendidikan masih menggunakan struktur Kurikulum 2013 (atau Kurikulum Darurat), namun mulai mengadopsi prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka, seperti pembelajaran berdiferensiasi, penguatan literasi dan numerasi, serta pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Pada tahap ini, guru tetap

dapat menggunakan perangkat ajar yang sudah dimiliki, namun didorong untuk mulai berinovasi dalam proses pembelajaran.⁶⁵

Kedua, Mandiri Berubah, sekolah mulai menerapkan struktur Kurikulum Merdeka secara penuh, termasuk penggunaan capaian pembelajaran (CP) sebagai pengganti Kompetensi Dasar (KD), serta mengintegrasikan modul ajar dan perangkat pembelajaran yang telah disediakan pemerintah melalui Platform Merdeka Mengajar. Terakhir, Mandiri Berbagi merupakan tahap lanjutan bagi sekolah yang telah matang dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Sekolah pada tahap ini

⁶⁵ Anindito Aditomo, *Panduan Pembelajaran Dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Menengah* (Jakarta: BSKAP, 2022), <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/06/Panduan-Pembelajaran-dan-Asesmen.pdf>.

tidak hanya mengembangkan perangkat ajar secara mandiri sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal, tetapi juga berperan aktif dalam membagikan praktik baik dan hasil pengembangannya kepada satuan pendidikan lain. Ketiga opsi ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka dirancang dengan prinsip fleksibilitas dan kemandirian, sehingga memberikan ruang bagi setiap sekolah untuk berkembang sesuai dengan tingkat kesiapan mereka para siswa.⁶⁶

Secara konseptual, Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, menekankan pada pengembangan potensi siswa, serta mendorong guru untuk

⁶⁶ Aditomo.

berperan sebagai fasilitator yang kreatif dan inovatif. Kurikulum ini juga menuntut perubahan paradigma, dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik. Namun dalam praktiknya, implementasi belum berjalan optimal karena berbagai kendala yang muncul. Salah satu kesenjangan utama terletak pada aspek kesiapan guru, di mana masih banyak guru yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep dan teknis pelaksanaan. Kurikulum Merdeka akibat kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang merata. Perubahan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka menjadi tantangan karena guru masih terbiasa

dengan pola pembelajaran lama yang administratif dan berorientasi pada materi.⁶⁷

d. Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum Merdeka

Setiap kurikulum yang diterapkan di Indonesia memiliki kelebihan dan juga kekurangan, jika dibandingkan dengan Kurikulum 2013, maka ada beberapa kelebihan yang dimiliki Kurikulum Merdeka, di antaranya ialah:

1. Kelebihan Kurikulum Merdeka

- a. Kurikulum lebih sederhana, meskipun sederhana namun kurikulum ini cukup mendalam.

⁶⁷ Andreas Fredyansa Harwisaputra et al., “Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka Di SMAN 2 Ponorogo,” *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* Vol 4 No 2 (2023): 149–64, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i2.206>.

b. Pembelajaran lebih bermakna, tidak tergesa-gesa atau terkesan menuntaskan materi, pembelajaran lebih terasa menyenangkan.

c. Kelebihan Kurikulum Merdeka bagi guru ialah pada saat kegiatan belajar mengajar guru dapat melaksanakan pengajaran sesuai penilaian terhadap jenjang capaian dan perkembangan peserta didik.

2. Kekurangan Kurikulum Merdeka

a. Dari segi implementasinya Kurikulum Merdeka masih kurang matang.

b. Sistem pendidikan dan pengajaran yang dirancang belum terealisasi dengan baik.

c. Kurangnya sumber daya manusia (SDM), serta sistem yang belum terstruktur.⁶⁸

3. Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

a. Dasar Normatif KBC

Kurikulum Berbasis Cinta memiliki landasan normatif yang berasal dari kebijakan resmi pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 mengenai Panduan Penerapan Kurikulum di Madrasah. Kebijakan ini ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai upaya untuk memperkuat pelaksanaan kurikulum yang tidak hanya fokus

⁶⁸ Ahmad Almarisi, “Kelebihan Dan Kekurangan Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Sejarah Dalam Perspektif Historis,” *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 7 No 1 (2023): 111–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6291>.

pada pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa. Kurikulum ini menekankan pentingnya penggabungan nilai kasih sayang, empati, toleransi, dan penghormatan terhadap orang lain dalam proses belajar di madrasah⁶⁹. Selain itu, Kurikulum Berbasis Cinta juga sejalan dengan Kep Dirjen Pendis No. 6077 Tahun 2025 Keputusan ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pedoman implementasi Kurikulum Berbasis Cinta pada satuan pendidikan madrasah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa proses pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada penguatan nilai spiritual, moral,

⁶⁹ “Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2025” (2025), <https://drive.google.com/file/d/1riDufa6xek73ZGgQv52pTTwG9FVf6vwu/view?usp=sharing>.

dan sosial melalui penanaman nilai kasih sayang, empati, serta tanggung jawab sosial dalam pembelajaran.⁷⁰

b. Aturan Implementatif

Aturan Implementatif Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) di madrasah berlandaskan Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTS, MA, dan MAK. Keputusan ini menjadi dasar bagi satuan pendidikan madrasah dalam melaksanakan kurikulum yang menekankan pada Pembelajaran Mendalam dan Kurikulum Berbasis Cinta, sebagai penyempurnaan terhadap

⁷⁰ Suyitno, “Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6077 Tahun 2025” (2025), <https://ntt.kemenag.go.id/file/file/panduan-kurikulum-berbasis-cinta.pdf>.

implementasi kurikulum sebelumnya.⁷¹ dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6077 Tahun 2025 tentang Panduan Kurikulum Berbasis Cinta di Madrasah. Keputusan ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai panduan teknis dalam menerapkan nilai-nilai Kurikulum Berbasis Cinta selama proses belajar mengajar.⁷²

Aturan ini mengatur prinsip-prinsip dalam pembelajaran yang mengedepankan pengintegrasian nilai-nilai kasih sayang, empati, toleransi, serta penghargaan terhadap orang lain

⁷¹ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2025.

⁷² Suyitno, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6077 Tahun 2025.

dalam kerangka pendidikan. Selain itu, ketentuan ini juga menguraikan cara penerapan nilai cinta dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di madrasah, sehingga pembelajaran tidak hanya fokus pada penguasaan materi, tetapi juga berorientasi pada pengembangan karakter spiritual, moral, dan sosial peserta didik. Dengan cara ini, regulasi ini berfungsi sebagai panduan operasional untuk para guru dan madrasah dalam menggabungkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam praktik pembelajaran.

c. Strategi Penerapan

Strategi penerapan Kurikulum Berbasis Cinta juga dapat dikaitkan dengan berbagai regulasi pendidikan yang menjadi dasar pelaksanaan kurikulum serta pembentukan karakter siswa. Salah

satu regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 mengenai Standar Nasional Pendidikan yang menekankan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan kompetensi siswa secara menyeluruh, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Prinsip ini menjadi dasar dalam melaksanakan pembelajaran yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter serta nilai-nilai kemanusiaan.⁷³

Di samping itu, strategi penerapan nilai dalam proses belajar juga sejalan dengan kebijakan dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang

⁷³ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan” (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73167/perpres-no-57-tahun-2021>.

mengeksplorasi integrasi nilai-nilai religius, nasionalisme, kemandirian, kerja sama, dan integritas dalam kegiatan pendidikan. Kebijakan ini mendorong lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam aktivitas intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Oleh karena itu, penerapan Kurikulum Berbasis Cinta di madrasah dapat dilakukan melalui penguatan budaya sekolah, pembelajaran yang lebih manusiawi, serta pembiasaan sikap empati dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan pendidikan.⁷⁴

d. Kelebihan dan Kekurangan KBC

⁷⁴ “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” (2017), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73167/perpres-no-87-tahun-2017>.

a. Kelebihan KBC

1. Menumbuhkan karakter humanis dan empati siswa

KBC menekankan nilai kasih sayang, empati, dan kepedulian sosial dalam proses pembelajaran sehingga mampu membentuk karakter siswa yang humanis dan religius.⁷⁵

2. Mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan spiritual

KBC tidak hanya fokus pada pengetahuan akademik, tetapi juga

⁷⁵ Nangimatul Mukaromah et al., “Permasalahan Dan Tantangan Penerapan Kurikulum Berbasis Cinta Di Madrasah Ibtidaiyah,” *Jurnal Basicedu* Vol 9 No 5 (2025): 1633–1641, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i5.10765>.

mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritual peserta didik.⁷⁶

3. Menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan.

Pendekatan pembelajaran berbasis kasih sayang membuat proses belajar lebih humanis dan tidak menekan siswa.⁷⁷

4. Memperkuat pendidikan karakter di madrasah

KBC hadir sebagai respon terhadap masalah degradasi moral dan rendahnya

⁷⁶ Akhmad Sahrandi, "Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah," *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* vol 9 No 2 (2024): 306–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.55102/alyasini.v9i2.6835>.

⁷⁷ Suyitno, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6077 Tahun 2025, 14.

empati di kalangan peserta didik.⁷⁸

b. Kekurangan KBC

1. Pemahaman guru terhadap konsep KBC belum merata.

Banyak guru masih belum memahami konsep dan implementasi KBC secara menyeluruh.

2. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi

Implementasi KBC masih menghadapi kendala karena belum adanya pelatihan yang sistematis bagi guru.

⁷⁸ Khairunnisa Khairunnisa, Miftahul Jannah, and Ayu Tri Dharma Ramadhani, "Analisis Teoritis Kurikulum Cinta Berbasis Multiple Intelligences Dalam Membentuk Karakter Humanis Siswa Madrasah Ibtidaiyah," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 10 No (2026): 2046–2055, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.36360>.

3. Penerapan nilai cinta sering tidak konsisten

Dalam praktik pembelajaran, nilai-nilai yang menjadi dasar KBC belum selalu diterapkan secara konsisten.⁷⁹

4. Membutuhkan perubahan paradigma guru.

KBC menuntut guru mengubah pendekatan mengajar dari yang berorientasi materi menuju pembelajaran yang menekankan nilai dan hubungan emosional.⁸⁰

⁷⁹ Mukaromah et al., “Permasalahan Dan Tantangan Penerapan Kurikulum Berbasis Cinta Di Madrasah Ibtidaiyah.”

⁸⁰ Kementerian Agama RI, “Kemenag Uji Publik Kurikulum Berbasis Cinta, Siap Diterapkan Tahun Ajaran 2025/2026,” Direktorat KSKK Madrasah, 2025, https://pendis.kemenag.go.id/direktorat-kskk-madrasah/kemenag-uji-publik-kurikulum-berbasis-cinta-siap-diterapkan-tahun-ajaran-20252026?utm_source=chatgpt.com.

Berdasarkan uraian diatas bahwasannya Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, dan Kurikulum Berbasis Cinta memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan kompetensi siswa yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sambil juga menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pembelajaran yang aktif. Namun, masing-masing kurikulum memiliki fokus yang berbeda dalam pendekatan pembelajarannya. Kurtilas lebih menekankan pada pendekatan berbasis sains dengan kegiatan mengamati, bertanya, bereksperimen, berpikir kritis, dan berkomunikasi. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan bagi guru untuk

menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa.

Di sisi lain, KBC lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai kasih sayang terhadap Tuhan, sesama manusia, pengetahuan, serta lingkungan dalam proses pendidikan.

D. Implikasi Kesenjangan Implementasi Kurikulum

Menurut John I. Goodlad dalam karyanya *Curriculum Inquiry: The Study of Curriculum Practice*, kesenjangan antara kurikulum yang direncanakan dan yang dilaksanakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku dan hasil belajar siswa. Goodlad menjelaskan bahwa ketika guru tidak menerapkan strategi pembelajaran sebagaimana yang telah dirancang dalam kurikulum, maka proses pembelajaran akan kehilangan arah dan tujuan utamanya. Kondisi tersebut menyebabkan

siswa kurang aktif dalam mengikuti kegiatan belajar, mengalami penurunan motivasi, serta tidak mampu mencapai kompetensi yang diharapkan.⁸¹

Lebih lanjut, Goodlad menegaskan bahwa efektivitas kurikulum tidak hanya terletak pada rancangan tertulis, melainkan pada sejauh mana kurikulum tersebut dapat diterapkan secara konsisten di dalam kelas. Ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akan mengakibatkan siswa tidak memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan terarah. Akibatnya, hasil belajar menjadi tidak optimal dan mutu pembelajaran menurun. Dengan demikian, Goodlad memandang bahwa kesenjangan implementasi kurikulum berdampak langsung pada

⁸¹ John I. Goodlad, *Curriculum Inquiry: The Study of Curriculum Practice* (New York: McGraw-Hill, 1979), 55.

rendahnya motivasi belajar, partisipasi aktif siswa, serta ketimpangan hasil belajar antar satuan pendidikan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum agar setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang efektif, bermakna, dan berkualitas.⁸²

Dalam konteks penelitian ini, pandangan Goodlad sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di MI Ma'arif Mojorejo Jetis dan MI Ma'arif Polorejo Ponorogo. Berdasarkan hasil pengamatan awal, ditemukan adanya kesenjangan antara kurikulum yang dirumuskan di tingkat madrasah dengan pelaksanaan di ruang kelas. Beberapa guru belum sepenuhnya memahami prinsip dan langkah implementasi

⁸² John I. Goodlad, *Curriculum Inquiry: The Study of Curriculum Practice* (New York: McGraw-Hill, 1979), 60-62.

Kurikulum 2013, sehingga pembelajaran masih berfokus pada penyampaian materi dibandingkan pada pengembangan kompetensi siswa secara holistik. Akibatnya, siswa tidak memperoleh pengalaman belajar yang bermakna sebagaimana yang diamanatkan dalam kurikulum.

E. Telaah Pustaka

1. Konsep Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum merupakan proses penerapan kurikulum yang telah dirancang ke dalam praktik pembelajaran di satuan pendidikan. Implementasi ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan rencana pembelajaran yang tertulis dalam dokumen kurikulum, tetapi juga mencakup bagaimana guru sebagai pelaksana utama

menafsirkan dan menerjemahkan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.

Menurut Ralph W. Tyler, implementasi kurikulum merupakan upaya menerapkan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan ke dalam pengalaman belajar yang nyata bagi peserta didik. Artinya, kurikulum tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi harus diwujudkan dalam proses pembelajaran yang sistematis sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif.

Sementara itu, Ornstein dan Hunkins menyatakan bahwa implementasi kurikulum merupakan proses dinamis yang melibatkan berbagai faktor seperti keyakinan guru terhadap kurikulum, kondisi lembaga pendidikan, serta tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Oleh karena itu,

keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya ditentukan oleh kualitas rancangan kurikulum, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan lingkungan pendidikan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kurikulum.

Keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal sekolah. Marsh mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru, dan dukungan internal di dalam kelas.

Selain itu, Posner menjelaskan bahwa implementasi kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor kontekstual yang berfungsi sebagai batasan

atau kendala dalam proses pembelajaran. Faktor-faktor tersebut meliputi ketersediaan sarana prasarana, kebijakan pendidikan, waktu pembelajaran, serta kondisi sosial sekolah

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum antara lain:

a. Faktor Guru

Guru merupakan aktor utama dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah. Kompetensi pedagogik, pemahaman terhadap kurikulum, serta sikap dan motivasi guru sangat menentukan keberhasilan implementasi kurikulum.

b. Faktor Kepemimpinan Sekolah

Kepala sekolah memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum. Kepemimpinan yang

efektif mampu menciptakan budaya sekolah yang mendukung inovasi dan perubahan dalam pembelajaran.

c. Faktor Pelatihan dan Pengembangan Profesional

Pelatihan dan pengembangan profesional guru menjadi sarana penting dalam meningkatkan kompetensi guru dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum.

d. Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya

Lingkungan masyarakat juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kurikulum. Dukungan orang tua dan masyarakat dapat memperkuat pelaksanaan program pendidikan di sekolah.

3. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kompetensi peserta didik secara holistik yang mencakup aspek sikap, pengetahuan.

a. Dasar Hukum Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 memiliki landasan yuridis yang kuat, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI
4. Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum

5. Permendikbud Nomor 71 tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Kma 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah

Kurikulum ini dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pendekatan ilmiah (*scientific approach*) serta penguatan pendidikan karakter.

b. Karakteristik Kurikulum 2013

Beberapa karakteristik utama Kurikulum 2013 antara lain:

1. Pembelajaran berbasis kompetensi
2. Pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran
3. Penilaian autentik yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan

4. Penguatan pendidikan karakter

c. Kelebihan Kurikulum 2013

1. Mendorong siswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam pembelajaran.
2. Penilaian tidak hanya berdasarkan ujian, tetapi juga mencakup sikap dan keterampilan.
3. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran.

d. Kekurangan Kurikulum 2013

1. Sebagian guru masih kurang memahami konsep pendekatan saintifik.
2. Beban administrasi guru cukup tinggi.
3. Proses pembelajaran sering dianggap terlalu kompleks oleh sebagian guru.

4. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum terbaru yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya transformasi pendidikan nasional. Kurikulum ini menekankan

pada pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, serta memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah dalam mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa.

a. Dasar Hukum Kurikulum Merdeka

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. KMA Nomor 450 Tahun 2022 tentang Penetapan Madrasah Pelaksana Kurikulum Merdeka.
4. Keputusan Menteri Pendidikan tentang Kurikulum Merdeka dalam program Merdeka Belajar

b. Karakteristik Kurikulum Merdeka

Beberapa karakteristik utama Kurikulum Merdeka yaitu:

1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik.
2. Struktur kurikulum lebih fleksibel
3. Fokus pada pengembangan kompetensi dan karakter
4. Adanya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

c. Kelebihan Kurikulum Merdeka

1. Memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang pembelajaran.
2. Menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa.

3. Mengurangi beban administrasi guru dibanding kurikulum sebelumnya.

d. Kekurangan Kurikulum Merdeka

1. Tidak semua guru siap dengan perubahan kurikulum yang cepat.
2. Keterbatasan pelatihan bagi guru di beberapa daerah.

5. Kurikulum Berbasis Cinta

Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) merupakan pendekatan pendidikan yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memperkuat pembentukan karakter peserta didik melalui penanaman nilai-nilai kasih sayang, empati, dan kepedulian dalam proses pembelajaran di madrasah.

a. Dasar Hukum KBC

1. KMA Nomor 1503 Tahun 2025

Implementasi kurikulum pada madrasah yang menyesuaikan perkembangan kebijakan kurikulum merdeka dan penguatan nilai karakter termasuk pendekatan kurikulum berbasis cinta (kbc).

2. Kepdirjen Pendis No. 6077 Tahun

2025 tentang Panduan Kurikulum Berbasis Cinta.

b. Karakteristik KBC

Kurikulum Berbasis Cinta memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain:

1. **Pembelajaran berorientasi pada nilai kasih sayang**

Proses pembelajaran menanamkan nilai empati, kepedulian, dan penghargaan terhadap sesama.

2. Mengintegrasikan nilai - nilai keagamaan dan kemanusiaan

Nilai-nilai spiritual dan moral menjadi bagian penting dalam kegiatan pembelajaran.

3. Pembelajaran yang humanis dan inklusif

Guru menciptakan suasana belajar yang menghargai perbedaan dan mendorong kerja sama antar peserta didik.

c. Kelebihan KBC

1. Menciptakan suasana pembelajaran yang lebih humanis dan menyenangkan.
2. Mendorong hubungan yang lebih harmonis antara guru dan peserta didik.
3. Membantu membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik.

d. Kekurangan KBC

1. Masih tergolong konsep baru, sehingga belum semua guru memahami implementasinya secara optimal.

2. Membutuhkan pelatihan guru agar dapat mengintegrasikan nilai-nilai cinta dalam proses pembelajaran.
3. Belum memiliki panduan teknis yang sepenuhnya seragam di semua madrasah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi multi kasus yang dilaksanakan di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo Ponorogo. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengungkap secara mendalam fenomena implementasi kurikulum dalam konteks alami di masing-masing madrasah.

Menurut Sugiyono “metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi,

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.” Dengan menggunakan desain multikasus, peneliti dapat membandingkan implementasi kurikulum antara madrasah negeri dan swasta serta menemukan pola-pola kesenjangan yang terjadi. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif terhadap dinamika pelaksanaan kurikulum secara kontekstual, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan implementasi di masing-masing satuan pendidikan.⁸³

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif Dan Konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2022), 15.

Penelitian ini menekankan pada proses yang fleksibel, di mana pertanyaan dan prosedur berkembang seiring berjalannya penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lingkungan alami partisipan, sementara analisis data disusun secara induktif, dimulai dari temuan-temuan khusus hingga membentuk tema-tema umum. Dalam proses ini, peneliti berperan aktif dalam menginterpretasikan makna yang terkandung dalam data secara mendalam dan kontekstual.⁸⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2025/2026. Sedangkan tempat pertama yang digunakan sebagai penelitian oleh peneliti adalah MI

⁸⁴ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches* (California: SAGE Publications, 2007), 37.

Ma'arif Mojorejo Kec.Jetis Kab.Ponorogo Pemilihan tempat kedua penelitian di MI Ma'arif Polorejo Kec.Babadan Kab.Ponorogo hal ini didasari atas pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kedua madrasah memiliki karakteristik pembelajaran yang relevan dengan fokus kajian penelitian sehingga memungkinkan diperolehnya data yang akurat dan representatif.
- b. Ketersediaan subjek penelitian yang sesuai serta dukungan pihak sekolah memudahkan proses pengumpulan data.
- c. Akses lokasi yang mudah dijangkau oleh peneliti turut mendukung efektivitas pelaksanaan penelitian.
- d. Kedua lembaga memiliki lingkungan belajar yang dinamis dan program pendidikan yang dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk

analisis penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua madrasah dalam peningkatan kualitas pembelajaran.

C. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui interaksi langsung dengan sumber data. Data ini sering disebut sebagai data asli atau data baru karena sifatnya yang terkini. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti harus terlibat langsung di lapangan dan mengumpulkan informasi secara langsung dari sumbernya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah bidang Kurikulum, dan guru mata Pelajaran di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada. Data ini juga dapat diperoleh dari dokumentasi kegiatan yang mendukung kesetaraan pendidikan dan nilai-nilai sosial. Sumber-sumber tersebut termasuk seperti jurnal, Keputusan Menteri Agama (KMA), laporan, dan buku.⁸⁵

Dengan mengetahui dan memahami sumber data yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian, maka peneliti dapat menentukan landasan teknik pengumpulan data yang akan menghasilkan data.⁸⁶

⁸⁵ James Edward Burt, Gerald Michael Barber, and David Leslie Rigby, *Elementary Statistics for Geographers* (New York, USA: The Guilford Press, 2009), 18.

⁸⁶ Salim and Haidar, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), 103.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, pengamatan dan dokumentasi.⁸⁷ Metode-metode yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸⁷ Ahmad Nizar Rangkti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan*, ed. Mara Samin Lubis (Bandung: Citra Pustaka Media, 2016), 143.

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.⁸⁸

⁸⁸ Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal* (Yogyakarta: LP2M UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 89.

Wawancara awal dilakukan secara terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh keterangan secara rinci dan mendalam mengenai pandangan informan tentang Kesenjangan Implementasi Kurikulum Madrasah Swasta : Studi Multi Kasus di MI Ma'arif dan MI Ma'arif Polorejo Adapun dalam penelitian ini sumber informan meliputi beberapa orang yang berkaitan langsung dengan fenomena tersebut, antara lain sebagai berikut: *Pertama*, Kepala MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo atau Waka MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo selaku perancang dan pelaksana kurikulum yang ada di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo dan yang kedua, peserta didik, MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo untuk mendapatkan informasi terkait kesenjangan implementasi

kurikulum madrasah negeri dan swasta : studi multi kasus di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo.

b. Observasi

Menurut Moleong Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek di lapangan. Observasi dilakukan secara terencana dan terarah untuk mengidentifikasi perilaku, peristiwa, atau situasi tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat faktual dan kontekstual, karena diperoleh langsung dari kondisi nyata yang sedang diteliti.⁸⁹ Pengamatan yang

⁸⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 61.

dilakukan oleh peneliti dilakukan di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo. Peneliti dalam penelitian ini mengamati hal-hal yang berkaitan dengan kesenjangan implementasi apa yang terjadi di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan berbagai dokumen lain yang relevan. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta memberikan

gambaran faktual mengenai kondisi, peristiwa, atau aktivitas yang telah terjadi.⁹⁰

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel merupakan metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memilih individu atau elemen dari populasi agar menjadi bagian dari sampel. Teknik ini memegang peran penting dalam menjamin sejauh mana sampel tersebut dapat merepresentasikan populasi secara valid, akurat, dan tidak bias.

Teknik pengambilan sampel secara umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu *Purposive sampling*, dan *snowball sampling*.⁹¹

⁹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 27.

a. Purposive Sampling

Purposive sampling adalah teknik penentuan sumber data yang dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih informan yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dengan fenomena yang diteliti sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.⁹²

Kelebihan *purposive sampling* terletak pada kemampuannya menghasilkan data yang mendalam karena informan dipilih secara sengaja berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka terhadap masalah penelitian. Teknik ini membuat pemilihan

⁹¹ Dika Raihan Batara et al., “Langkah-Langkah Menentukan Populasi Dan Sampel Yang Tepat Dalam Penelitian,” *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* Vol 4 No 2 (2025): 682 – 689, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpion.v4i2.457>.

⁹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 60.

sampel menjadi lebih tepat sasaran sehingga informasi yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, proses pengumpulan data menjadi lebih efisien karena peneliti tidak perlu melibatkan banyak responden, melainkan cukup memilih informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan secara komprehensif.

b. Snowbaal Sampling

Snowball Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar, hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar,

seperti bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar.⁹³

F. Teknik Analisis Data

Ada berbagai cara untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana mengungkapkan bahwasanya proses analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga selesai, tuntas, dan data jenuh. Data jenuh berarti tidak ada lagi data yang dapat digali atau diperoleh, meskipun proses pencarian data telah diulang berulang kali. Setelah proses pengumpulan data, analisis data mencakup data

⁹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 300.

condensation, data display, dan drawing dan verifikasi conclusions.⁹⁴ Terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Kondensasi Data

Kondensasi data terjadi secara berkesinambungan dalam kehidupan selama berorientasi pada beberapa proyek/penelitian kualitatif. Bahkan sebelum data sebenarnya dikumpulkan, antisipasi kondensasi data sebagai seorang peneliti secara tidak sadar sering menarik sebuah kesimpulan dapat berupa kerangka kerja konseptual, kasus, pertanyaan penelitian, dan pengumpulan data yang dianggap mendekati untuk dipilih. Sebagai hasil pengumpulan data, lebih lanjut kondensasi data terjadi: menulis ringkasan,

⁹⁴ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (United States of America: SAGE Publications, 2014), 31-33.

pengkodean, mengembangkan kategori, menghasilkan kategori, dan penulisan memo analisis.⁹⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data (data display) adalah proses menyusun informasi yang telah dikondensasi ke dalam bentuk yang sistematis dan terorganisir, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami makna dari data tersebut dan untuk menarik kesimpulan. Tujuan dari penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.⁹⁶

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang

⁹⁵ Huberman.

⁹⁶ Eko Haryono, “Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,” *Jurnal Ilmiah An-Nuur* Vol 13 No (2023): 1–6, <https://doi.org/https://doi.org/10.58403/annuur.v13i2.301>.

terorganisir dan dipadatkan, yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan melakukan tindakan.⁹⁷

c. Penarikan dan Verifikasi Simpulan

Penarikan dan verifikasi kesimpulan merupakan proses untuk menafsirkan makna data yang telah disajikan, menemukan pola atau hubungan sebab-akibat, dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan awal yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus melalui proses pengecekan ulang data, membandingkan antara-sumber, serta melakukan triangulasi untuk memastikan validitas dan keandalan temuan.

Ketiga proses tersebut dilakukan secara interaktif dan berulang selama penelitian berlangsung. Artinya,

⁹⁷ Huberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*,

sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir analisis, peneliti terus melakukan kondensasi, penyajian, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara simultan. Dengan demikian, hasil analisis yang diperoleh dapat menggambarkan fenomena secara mendalam dan kredibel.⁹⁸

Penarikan kesimpulan dalam fase ini hanya sementara dan dapat berubah jika tanpa bukti kuat. Namun, jika fase pertama sudah ditemukan bukti yang valid, maka kesimpulan yang diuraikan dari hasil upaya penarikan kesimpulan bisa dikatakan kredibel atau asli.⁹⁹

Menurut Bogdan dan Biklen Analisis data merupakan proses pencarian dan penataan secara

⁹⁸ Huberman, 14.

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif Dan Konstruktif)*, 141.

sistematis terhadap transkrip wawancara, catatan lapangan, serta berbagai bahan lain yang dikumpulkan peneliti. Tujuan dari proses ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data yang telah diperoleh serta memungkinkan peneliti menyajikan temuan yang ditemukan kepada orang lain. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa analisis data tidak hanya berfokus pada kegiatan teknis dalam mengelola data, tetapi juga menuntut kemampuan peneliti dalam menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, analisis data bersifat reflektif dan interpretatif, karena peneliti dituntut untuk menemukan pola, makna, serta hubungan antarunsur dalam data yang dikumpulkan. Melalui proses ini,

peneliti dapat menyusun hasil temuan yang bermakna dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹⁰⁰

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan merupakan suatu penelitian yang sangat penting untuk menilai dari penelitian tersebut. Keabsahan ini mencakup upaya membangun: kredibilitas (sepadan dengan validitas internal), transferability (sepadan dengan validitas eksternal), dependability (sepadan dengan reliabilitas), dan confirmability (sepadan dengan objektivitas). Teknik-teknik untuk menjamin keabsahan meliputi keterlibatan yang lama, pengamatan yang terus-menerus, triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat, analisis kasus negatif, kecukupan referensial, dan pemeriksaan oleh

¹⁰⁰ Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods (2nd Ed.)* (Boston: Allyn and Bacon, 1992), 153.

anggota (*member check*).¹⁰¹ Oleh karena itu, peneliti harus menggunakan cara atau teknik dalam melakukan pengecekan keabsahan data temuan tersebut diantaranya adalah :

a. Perpanjang Kehadiran Peneliti

Peneliti kualitatif harus membangun kredibilitas data dengan cara seperti keterlibatan jangka panjang di lapangan (*prolonged engagement*), observasi terus-menerus, (*persistent observation*), triangulasi, dan wawancara kepada lembaga yang bersangkutan secara terus-menerus supaya kredibilitas data dapat dipertanggung jawabkan.¹⁰²

¹⁰¹ Yvonna S. Lincoln and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Newbury Park: SAGE Publications, 1985), 289-290.

¹⁰² J. David Creswell Creswell, John W, *Qualitative Inquiry Quantitative, and Research Design Choosing Among Five Approaches. 3rd Ed* (California: SAGE Publications, 2016), 37.

b. Observasi Lebih Mendalam

Observasi mendalam dilakukan untuk menggali data yang tersembunyi, bukan yang langsung tampak. Peneliti harus dapat membedakan data yang relevan dan tidak, serta mampu mengeksplorasi makna yang terkandung di dalamnya.¹⁰³

c. Triangulasi/Gabungan

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data

¹⁰³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 369.

dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.¹⁰⁴

Triangulasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menghilangkan keraguan, walaupun tidak sedikit yang masih belum mengetahui makna sesungguhnya dan apa tujuan dari triangulasi di dalam sebuah perikatan. Disebabkan oleh kurangnya tentang pemahaman tersebut. Karena itu, triangulasi merupakan usaha untuk mengecek keabsahan data atau informasi dari sudut pandang yang berbeda-beda terhadap apa yang telah dilakukan oleh periset, caranya adalah dengan sebanyak mungkin mengurangi ketidakjelasan dan makna ganda yang terjadi ketika

¹⁰⁴ Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Dasar*, ed. Lubna (Mataram: Sanabil, 2020), 101.

data dikumpulkan dan dianalisis.¹⁰⁵ Ada 3 macam triangulasi data diantaranya:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dapat mempertajam daya dapat dipercaya data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama persetan melalui beberapa sumber atau informan (Sugiyono, 2017, 2016). Dengan menggunakan teknik yang sama peneliti dapat melakukan pengumpulan data terhadap beberapa sumber perikatan (informan), misalnya ketika seorang periset ingin mengumpulkan data

¹⁰⁵ Wanda Vera Nur Fajriani et al., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol 10 No 1 (2024): 826–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.

mengenai tata tertib yang ada di sekolah maka triangulasi bisa dilakukan dengan cara mewawancarai kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru mata pelajaran, dan guru BK.¹⁰⁶

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Periset menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Andarusni Alfansyur and Mariyani Mariyani, “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial,” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* Vol 5 No 2 (2020): 146–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3432>.

¹⁰⁷ Alfansyur and Mariyani.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda-beda, dengan tujuan untuk melihat apakah informasi yang diperoleh konsisten atau mengalami perubahan. Dengan cara ini, dapat diketahui apakah suatu data tetap atau berubah sesuai konteks waktunya.¹⁰⁸

H. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan langkah-langkah yang sistematis dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data, menganalisisnya, dan menyimpulkan hasil guna menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan masalah yang akan dikaji. Tahapan ini penting untuk menjaga keilmiahan, konsistensi, dan keabsahan penelitian.

¹⁰⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331.

Menurut Suharsimi Arikunto tahapan penelitian merupakan suatu proses yang harus dilalui peneliti untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.¹⁰⁹ Ada 3 tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap pra lapangan ini ada 6 tahapan yang bisa mempermudah peneliti dalam perjalanan penelitiannya :

1. Menentukan masalah/Fokus Penelitian
2. Menentukan lokasi penelitian
3. Mengurus Perizinan
4. Memilih Informan
5. Menyiapkan Instrumen

¹⁰⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 17.

6. Menyusun strategi lapangan

b. Tahap Lapangan

Ada dua tahapan lapangan yang perlu diperhatikan peneliti :

1. Peneliti harus mengenal konteks terlebih dahulu sebelum melakukan persiapan yang diperlukan saat penelitian
2. Peneliti ikut dan terlibat langsung dalam kegiatan pengumpulan data berlangsung.

3. Tahapan Pengolahan Data

Dalam hal ini peneliti diharapkan terjun langsung di lapangan dan mengumpulkan data penelitian kemudian untuk langkah seterusnya untuk mengelola dan menganalisis data.

BAB IV
KEBIJAKAN PENERAPAN KURIKULUM
DI MI MA'ARIF MOJOREJO DAN MI MA'ARIF
POLOREJO

1. Kebijakan Penerapan Kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo

Kebijakan kepala madrasah MI Ma'arif Mojorejo, Ibu Jamilatun, S.Pd, dalam menerapkan kurikulum 2013 mengacu pada KMA No 184 Tahun 2019 sebagai pedoman resmi implementasi kurikulum di madrasah. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penyesuaian kurikulum di madrasah, penguatan perencanaan pembelajaran berbasis RPP, serta penerapan autentik yang menilai aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pembaruan kebijakan kemudian diperkuat melalui KMA Nomor 450 Tahun 2024 untuk menyesuaikan implementasi dengan perkembangan kebijakan nasional. Kurikulum 2013

berorientasi pada pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar dengan RPP sebagai dokumen perencanaan utama, sehingga pelaksanaan cenderung terstruktur dan berbasis standar yang jelas.

Sementara itu, penerapan kurikulum merdeka pada madrasah MI Ma'arif Mojorejo telah diatur melalui KMA Nomor 347 Tahun 2022 yang memberi ruang implementasi secara bertahap sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan. Ketentuan ini diperjelas melalui KMA no 1503 Tahun 2025 yang menerapkan struktur kurikulum dan capaian pembelajaran sebagai acuan utama. Kurikulum merdeka menekankan fleksibilitas, penggunaan Modul Ajar, pembelajaran berbasis proyek, serta penerapan diferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Hal ini dapat terlihat pada proses penerapan kurikulum madrasah di MI Ma'arif Mojorejo dalam hal ini disampaikan oleh kepala sekolah MI Ma'arif Mojorejo Ibu Jamilatun, S.Pd ia menyampaikan bahwa :

“MI Ma'arif Mojorejo ini masih menerapkan Kurikulum 2013 dari tahun 2015/2016 belum sepenuhnya berjalan ketika pemerintah mulai memberlakukan Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan 2022/2023 Demikian pula, Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya diterapkan ketika muncul pula di tahun 2025/2026 Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Kondisi perubahan kurikulum yang cepat ini menyebabkan guru bingung dalam menentukan arah penerapan, karena kurikulum lama belum sepenuhnya dijalankan tetapi kurikulum baru sudah muncul kemudian untuk menyikapi hal tersebut, guru menerapkan strategi fleksibel dalam pembelajaran. Guru mengkombinasikan komponen kurikulum lama dan baru, misalnya menggunakan prinsip K-13 yang sudah familiar, kemudian menyisipkan elemen KBC dan pendekatan *deep learning*. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi perpaduan antara kurikulum lama dan baru, sehingga guru tetap dapat menyampaikan materi secara efektif sambil

menyesuaikan diri dengan kebijakan kurikulum yang terus berubah”¹¹⁰

Kebijakan kurikulum di MI Ma’arif Mojorejo dilaksanakan secara bertahap dan berlangsung dengan cepat. Hal ini berdampak pada cara pembelajaran diterapkan di madrasah ini, karena setiap kebijakan kurikulum memiliki ciri khas dan alat pembelajaran yang berbeda. Kepala madrasah menyatakan bahwa awalnya madrasah menerapkan Kurikulum 2013 sebagai panduan untuk proses pembelajaran. Kebijakan ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019. Dalam kurikulum tersebut, guru melaksanakan pembelajaran dengan metode saintifik yang mencakup aktivitas mengamati, bertanya, bereksperimen, berpikir, dan berkomunikasi. Selain itu,

¹¹⁰. Lihat Transkrip Wawancara, Nomor 01/W/MIS/20-XI/2025.

guru juga membuat materi pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, serta melakukan penilaian autentik yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Dalam wawancara kami dengan kepala madrasah Ibu Jamilatun, S.Pd mengungkapkan bahwa Pada tahap awal, madrasah masih menerapkan Kurikulum 2013 dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta melaksanakan pembelajaran tematik sesuai dengan pedoman yang berlaku. Namun demikian, implementasi Kurikulum 2013 di madrasah belum sepenuhnya berjalan secara optimal ketika pemerintah mulai memperkenalkan Kurikulum Merdeka. Kebijakan ini mulai diberlakukan di madrasah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 pada saat

Kurikulum 2013 masih dilaksanakan, pemerintah memperkenalkan Kurikulum Merdeka. Kemudian, para guru mulai menyesuaikan alat pembelajaran, karena dalam Kurikulum Merdeka tidak lagi menggunakan RPP seperti sebelumnya, melainkan modul ajar dan Alur Tujuan Pembelajaran. Kepala madrasah juga mengungkapkan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak kebebasan kepada guru dalam merancang pembelajaran. Pendekatan pembelajaran lebih difokuskan pada kegiatan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan karakter siswa.¹¹¹

¹¹¹ “Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 Tentang Implementasi Kurikulum Pada RA, MI, MTs, MA, Dan MAK” (2024), <https://mapendakuningan.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/pedoman-implementasi-kurikulum-pd-ra-mi-mts-ma-dan-mak.pdf>.

Selanjutnya, ketika madrasah mulai beradaptasi dengan penerapan Kurikulum Merdeka, muncullah kebijakan baru yang menekankan pentingnya nilai dalam proses belajar, yaitu Kurikulum Berbasis Cinta. Kebijakan ini didukung oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025. Kepala madrasah menjelaskan situasi tersebut dalam wawancara berikut: “Perubahan kurikulum terjadi dengan sangat cepat. Kurikulum 2013 belum sepenuhnya diterapkan, lalu muncul Kurikulum Merdeka. Setelah itu, diperkenalkan lagi penguatan Kurikulum Berbasis Cinta yang fokus pada nilai kasih sayang dan karakter dalam proses pembelajaran. Kepala madrasah menyatakan bahwa perubahan kebijakan kurikulum yang cepat ini menyebabkan guru mengalami kebingungan dalam menentukan arah penerapan pembelajaran yang

mengharuskan para guru untuk melakukan penyesuaian secara bertahap. Para guru perlu memahami alat-alat pembelajaran yang baru dan tetap menjalankan proses pembelajaran dengan secara efektif.¹¹²

Dalam merespons situasi tersebut, kepala madrasah mengungkapkan bahwa para pengajar di madrasah menggunakan metode pengajaran yang lebih fleksibel. Mereka masih memanfaatkan beberapa elemen dari Kurikulum 2013 yang telah mereka kuasai, sekaligus menggabungkan pendekatan dari Kurikulum Merdeka seperti pembelajaran berbasis proyek dan penyesuaian dalam pembelajaran. Di samping itu, nilai-nilai yang ditekankan dalam Kurikulum Berbasis Cinta juga dihadirkan dalam proses belajar mengajar melalui

¹¹² “Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum RA, MI, MTs, MA, Dan MAK” (2025), https://jdih.kemenag.go.id/yzxkthpo/regulation/keputusan-menteri-agama-1503-2025_251202.pdf.

pengembangan karakter, sikap saling menghormati, dan kepedulian sosial.

Dengan cara tersebut, proses pembelajaran di madrasah tetap berjalan meskipun terjadi perubahan kebijakan kurikulum secara bertahap. Dalam strategi fleksibel ini membantu guru tetap dapat mengajar dengan percaya diri sambil menyesuaikan diri dengan tuntutan kurikulum baru. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Ria Widayanti beliau merupakan wakil kepala madrasah bidang kurikulum yang menyatakan :

“Perubahan kurikulum yang terjadi secara berulang menimbulkan kebingungan bagi guru dalam proses perencanaan pembelajaran. Meskipun Kurikulum Merdeka telah berjalan selama dua tahun dan memasuki tahun ketiga implementasi, kebijakan tersebut kembali mengalami penyesuaian melalui pengenalan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) dengan model pembelajaran *deep learning*. Walaupun perubahan tersebut tidak bersifat substitusi penuh, guru tetap harus menyisipkan elemen KBC dan pendekatan *deep learning* ke dalam kurikulum yang sudah dirancang

sebelumnya. Hal ini semakin kompleks karena madrasah memiliki dokumen kurikulum tersendiri, yaitu Kurikulum Madrasah yang mencakup struktur kurikulum dan komponen perencanaan lainnya. Akibatnya, pada tahap penyusunan kurikulum, guru menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam menyesuaikan materi dan perangkat pembelajaran agar selaras dengan kebijakan baru”¹¹³

Berdasarkan wawancara kami dengan waka kurikulum MI Ma’arif mojorejo Ibu Ema Fatmawati,S.Pd bahwasanya guru di MI Ma’arif Mojorejo, diketahui bahwa perubahan kebijakan kurikulum yang terjadi secara berulang menimbulkan kebingungan dalam proses perencanaan pembelajaran.

Waka kurikulum menyatakan bahwa setiap perubahan kebijakan membawa penyesuaian baru terhadap perangkat pembelajaran yang telah disusun

¹¹³. Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W/MIS/20-XI/2025.

sebelumnya. Waka kurikulum menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka sejatinya sudah diterapkan selama dua tahun dan kini memasuki tahun ketiga pelaksanaannya. Namun, ketika para guru mulai memahami dan menyesuaikan alat pembelajaran mereka dengan kurikulum tersebut, muncullah kebijakan baru yang memperkenalkan nilai-nilai positif melalui Kurikulum Berbasis Cinta dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Situasi ini mengharuskan para guru untuk kembali menyesuaikan rencana pembelajaran yang sudah mereka buat. Waka kurikulum menyatakan dalam sebuah wawancara seperti berikut:

“Ketika kami mulai familiar dengan Kurikulum Merdeka, kemudian muncul penguatan dari Kurikulum Berbasis Cinta.

Meskipun tidak menggantikan kurikulum yang sudah ada, kami harus tetap menyesuaikan alat-alat pembelajaran agar mencakup nilai-nilai cinta dan pendekatan pembelajaran mendalam.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa kebingungan yang dialami oleh guru disebabkan oleh beberapa aspek. Pertama, perubahan pada kebijakan kurikulum terjadi dalam waktu yang cukup cepat, sehingga para guru belum sepenuhnya menguasai penerapan kurikulum yang lama. Kedua, setiap kebijakan kurikulum memiliki alat bantu belajar yang berbeda, sehingga guru perlu melakukan penyesuaian terhadap rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Ketiga, madrasah memiliki dokumen Kurikulum Madrasah yang mencakup struktur kurikulum serta berbagai elemen

rencana pembelajaran. Ketika muncul kebijakan baru, guru harus memperbarui dokumen tersebut agar tetap sesuai dengan kebijakan pendidikan yang ada. Kondisi ini membuat proses penyusunan modul ajar menjadi lebih rumit di samping itu guru perlu menyesuaikan konten, metode pembelajaran, serta alat perencanaan seperti modul ajar dan Alur Tujuan Pembelajaran agar sesuai dengan kebijakan terbaru.

Perubahan kurikulum yang berlangsung terlalu cepat menimbulkan tantangan tersendiri bagi guru dalam proses perencanaan dan penyesuaian pembelajaran. Ketika Kurikulum Merdeka baru berjalan selama dua tahun dan sedang memasuki tahun ketiga implementasi, muncul kembali kebijakan baru berupa Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) dengan penekanan pada model pembelajaran *deep learning*.

“Meskipun perubahan kebijakan tidak menggantikan Kurikulum Merdeka secara keseluruhan, dokumen pembelajaran dianalisis untuk melihat bagaimana guru menyisipkan elemen KBC dan pendekatan *deep learning* ke dalam perencanaan pembelajaran. Selain itu, kajian dokumentasi juga mencakup struktur kurikulum, tujuan pembelajaran, serta perencanaan program sekolah sebagai bentuk penyesuaian kurikulum di madrasah”.¹¹⁴

Dari data diatas dapat diperoleh dari berbagai jenis dokumen akademis yang digunakan dalam proses pendidikan di madrasah. Dokumen-dokumen tersebut mencakup susunan kurikulum madrasah, Modul ajar, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang masih diterapkan pada beberapa mata pelajaran, serta dokumen-dokumen program madrasah seperti rencana kerja tahunan dan program penguatan karakter. Analisis dokumen dilakukan guna mengetahui cara guru

¹¹⁴ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 02/D/MIS/15-XII/2025

menyesuaikan pelaksanaan Kurikulum Merdeka dengan pengintegrasian elemen Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) dan pendekatan pembelajaran mendalam dalam perencanaan proses belajar mengajar.

Berdasarkan dokumen mengenai struktur kurikulum, madrasah masih menggunakan kerangka dari Kurikulum Merdeka sebagai landasan untuk melaksanakan pembelajaran. Struktur kurikulum ini mencakup pembagian mata pelajaran, alokasi waktu untuk belajar, serta penguatan kegiatan proyek yang mendukung profil pelajar. Namun, pada beberapa dokumen program madrasah, terdapat penyesuaian yang menekankan pentingnya nilai-nilai karakter, empati, dan kepedulian sosial sebagai bagian dari penerapan prinsip Kurikulum Berbasis Cinta. Penyesuaian ini tercermin dalam program-program

madrasah yang meliputi pembiasaan sikap religius, kegiatan sosial, serta model pembelajaran yang mengutamakan sikap saling menghormati.

Pada dokumen modul ajar dan RPP, tampak bahwa guru mulai menyesuaikan metode pengajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Kegiatan belajar tidak hanya terpusat pada penyampaian informasi, tetapi juga mendorong siswa untuk berdiskusi, merenung, serta menyelesaikan masalah ringan.¹¹⁵

Dalam sejumlah modul pengajaran juga terdapat kegiatan proyek kecil yang mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Ini menunjukkan adanya usaha dari guru untuk mendorong pembelajaran yang lebih bermakna dan mendalam. Selain itu,

¹¹⁵ Ference Marton, Noel Hounsell, and Noel Entwistle, *The Experience of Learning* (Skotlandia.: Scottish Academic Press, 1997), 52-54.

dokumen perencanaan program madrasah menunjukkan adanya penggabungan kegiatan pembelajaran dengan program pembentukan karakter. Program ini mencakup aktivitas literasi, kebiasaan beribadah secara bersama, kegiatan sosial, serta kerja sama antar siswa. Program ini menjadi bagian dari strategi madrasah untuk menyemai nilai-nilai kepedulian, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai yang sesuai dengan prinsip Kurikulum Berbasis Cinta.

Jadi secara keseluruhan, data dokumentasi mengindikasikan bahwa madrasah tidak sepenuhnya mengubah struktur Kurikulum Merdeka. Para guru tetap menggunakan alat pembelajaran yang mengikuti kurikulum tersebut. Namun, dalam pelaksanaan perencanaan pembelajaran, ada penyesuaian yang dilakukan dengan menambah nilai karakter,

menyelenggarakan kegiatan refleksi, serta mengenakan metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa. Penyesuaian ini menjadi bentuk integrasi antara Kurikulum Merdeka dan elemen Kurikulum Berbasis Cinta serta pendekatan deep learning dalam proses pengajaran di madrasah.

Meskipun kebijakan baru tidak menggantikan Kurikulum Merdeka secara keseluruhan, analisis dokumen menunjukkan bahwa guru telah menyesuaikan perangkat pembelajaran dengan menyisipkan elemen KBC dan pendekatan *deep learning*. Penyesuaian ini terlihat dalam struktur kurikulum, tujuan pembelajaran, dan perencanaan program sekolah, yang menunjukkan bahwa implementasi kurikulum dilakukan secara adaptif dan kontekstual sesuai kondisi madrasah, sejalan dengan

pandangan Fullan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi kemampuan sekolah dan guru dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan karakteristik lembaga Pendidikan.

Oleh karena itu, guru mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dokumen kurikulum yang sudah ada dengan tuntutan kebijakan baru. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum yang tidak stabil dapat mempengaruhi efektivitas perencanaan pembelajaran dan menambah beban adaptasi bagi guru tetapi dengan berjalannya waktu di MI Ma'arif Mojorejo ini sudah sepenuhnya menggunakan kurikulum Merdeka Sebagaimana yang disampaikan oleh Khoirul Muntari.

“Bahwasanya untuk perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2025/2026 MI Ma'arif Mojorejo sudah sepenuhnya menggunakan kurikulum Merdeka pada seluruh jenjang kelas. Penerapan kurikulum tersebut tidak dilakukan secara langsung pada

semua kelas, melainkan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun ajaran sebelumnya, implementasi Kurikulum Merdeka dimulai pada kelas III hingga kelas VI. lalu 2 tahun berikutnya dilanjutkan untuk kelas I hingga kala III Seiring dengan evaluasi dan kesiapan satuan pendidikan, pada tahun ajaran 2026/2027 Kurikulum Merdeka telah diberlakukan secara merata di seluruh kelas”.¹¹⁶

Berdasarkan dari analisis terhadap dokumen pembelajaran di madrasah, terungkap bahwa format utama yang diterapkan oleh para guru masih berpedoman pada Kurikulum Merdeka. Hal ini dapat dilihat dari dokumen perencanaan pengajaran yang masih menggunakan alat seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/modul ajar, serta dokumen evaluasi yang disusun sesuai dengan struktur kurikulum tersebut. Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa madrasah tidak melakukan perubahan secara

¹¹⁶.Lihat Transkrip Nomor 01/W/MIS/15-XII/2025.

keseluruhan pada struktur kurikulumnya, melainkan tetap mempertahankan sistem yang sudah ada.

Namun, dari beberapa dokumen juga menunjukkan adanya modifikasi dalam perencanaan pendidikan. Modifikasi tersebut terlihat dari dimasukkannya nilai-nilai karakter dalam tujuan dan aktivitas pembelajaran. Para guru menyertakan nilai-nilai seperti kepedulian, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai dalam kegiatan belajar. Di samping itu, dalam modul pembelajaran juga terdapat kegiatan refleksi yang diletakkan di akhir proses belajar. Refleksi ini bertujuan untuk membantu siswa memahami pengalaman belajar yang telah mereka jalani.

Dokumentasi pembelajaran pun mengungkapkan penggunaan metode yang mendorong partisipasi aktif siswa. Dalam sejumlah modul pembelajaran, terdapat

kegiatan diskusi kelompok, tanya jawab, dan aktivitas berbasis tugas yang mengharuskan siswa terlibat langsung dalam proses pengajaran. Pola aktivitas ini mencerminkan usaha guru untuk menciptakan proses belajar yang lebih melibatkan semua peserta didik.¹¹⁷

Pada tahun ajaran 2026/2027, madrasah ini telah sepenuhnya menerapkan Kurikulum Merdeka pada seluruh jenjang kelas. Penerapan kurikulum tersebut dilakukan secara bertahap, yang pada tahun ajaran sebelumnya dimulai dari kelas III hingga kelas VI lalu setelah beberapa tahun kemudian baru kelas I hingga kelas III dari Pola implementasi bertahap ini sejalan dengan teori *Diffusion of Innovation* yang dikemukakan oleh Rogers, yang menekankan bahwa adopsi suatu inovasi pendidikan memerlukan proses bertahap agar

¹¹⁷ Lev Vygotsky, *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes* (Cambridge: Harvard University Press, 1978), 88.

dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif oleh seluruh warga sekolah.¹¹⁸ Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Fullan, keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh kesiapan institusi, termasuk aspek sumber daya manusia, budaya sekolah, dan evaluasi berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan Kurikulum Merdeka secara merata pada tahun ajaran 2026/2027 mencerminkan kesiapan madrasah dalam mengelola perubahan kurikulum secara sistematis dan berkelanjutan.¹¹⁹

Namun, dalam konteks pelaksanaan kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah (MI Ma'arif Mojorejo), masih dijumpai sejumlah Kendala utama dalam pelaksanaan

¹¹⁸ Everett M Rogers, *Diffusion of Innovations (5th Ed.)*. (New York: Free Press, 2003), 48

¹¹⁹ Fullan, *The New Meaning of Educational Change, Fourth Edition*, 60.

kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah terletak pada aspek modul ajar hal ini disampaikan langsung oleh ibu Jamilatun, yaitu :

“Modul ajar yang tersedia belum sepenuhnya tertata secara sistematis, sehingga kurikulum belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, kebijakan kurikulum yang kerap mengalami perubahan menyebabkan ketidakstabilan dalam implementasi di lapangan. Kondisi yang berubah-ubah tersebut berdampak pada kurang maksimalnya penerapan kurikulum di sekolah. Hingga saat ini, kurikulum masih berada dalam tahap penyempurnaan; bahkan ketika baru memasuki tahun kedua implementasi, telah muncul kebijakan baru yang berbeda dari sebelumnya. Akibatnya, guru sering kali berada pada posisi yang sulit dalam menentukan acuan yang harus digunakan, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan pembelajaran di kelas.”¹²⁰

Dari data diatas Pelaksanaan kurikulum di madrasah masih kurang optimal. Hal ini disampaikan oleh Ibu

¹²⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/MIS/15-XII/2025

Jamilatun, S.Pd. menyebutkan bahwa salah satu hambatan utama adalah kurangnya modul ajar yang terorganisir dengan baik. Modul ajar yang tersedia belum disusun dengan cara yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan pengajaran. Hal ini menyulitkan para guru dalam merancang perencanaan pembelajaran yang sejalan dengan tujuan kurikulum. Selain itu, beliau juga menekankan bahwa kebijakan kurikulum sering berubah. Perubahan ini menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan di sekolah. Guru perlu menyesuaikan kembali alat dan bahan ajar setiap kali ada perubahan kebijakan. Proses penyesuaian ini membutuhkan waktu dan pemahaman baru, sehingga penerapan kurikulum tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Ibu Jamilatun kembali menambahkan bahwa kurikulum yang sedang diterapkan masih berada pada tahap penyempurnaan. Bahkan ketika implementasi baru berjalan sekitar dua tahun, telah muncul kebijakan baru yang berbeda dari kebijakan sebelumnya. Situasi ini membuat guru berada pada posisi yang sulit dalam menentukan acuan pembelajaran yang harus digunakan. Akibatnya, guru sering mengalami kebingungan dalam menyelaraskan perencanaan pembelajaran dengan kebijakan kurikulum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa ketidakteraturan modul ajar serta perubahan kebijakan kurikulum yang cukup sering menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kurikulum di sekolah. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan

pembelajaran di kelas karena guru harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang terjadi.

Dalam konteks penelitian kualitatif, bahwa proses adaptasi guru terhadap perubahan kurikulum merupakan salah satu aspek utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Implementasi kurikulum yang berlangsung tidak hanya berfokus pada kesesuaian dengan dokumen kurikulum, tetapi juga pada kemampuan guru dalam menafsirkan, menyesuaikan, dan mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Selain itu kesiapan perangkat ajar dan stabilitas kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan implementasi kurikulum. Ditemukan adanya ketidakteraturan dan ketidaksetaraan dalam penyediaan modul ajar, serta

perubahan kebijakan yang terjadi secara berulang. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan pembelajaran yang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.¹²¹

Untuk memastikan validitas temuan tersebut, keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil wawancara dengan guru mengenai pemahaman dan penerapan KBC serta pendekatan *deep learning* dibandingkan dengan hasil observasi proses pembelajaran di kelas dan hasil analisis dokumen berupa perangkat pembelajaran serta dokumen Kurikulum Madrasah. Triangulasi ini dilakukan untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan

¹²¹ Lihat Transkrip Observasi Nomor 03/O/MIS/15-XII/2025

keandalan data yang diperoleh, sehingga analisis terhadap implementasi kurikulum dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara menyeluruh.

Dengan demikian, implementasi kurikulum 2013, kurikulum merdeka, dan KBC di MI Ma'arif Mojorejo menunjukkan adanya kesenjangan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia serta belum optimalnya fungsi supervisi madrasah. Oleh karena itu kesenjangan implementasi Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, dan KBC di MI Ma'arif Mojorejo tampak pada ketidaksesuaian antara standar kurikulum dan praktik pembelajaran, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi,

serta dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan madrasah.

Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia. Para guru di MI Ma'arif Mojorejo memiliki pemahaman yang cukup baik tentang Kurikulum 2013 dan mulai beradaptasi dengan Kurmer, namun mereka belum sepenuhnya mampu menjalankan pembelajaran diferensiatif dengan konsisten. Pemahaman mengenai konsep KBC juga masih bersifat umum dan belum terintegrasi dalam praktik pembelajaran secara sistematis.

2. Kebijakan Penerapan Kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Polorejo

Kebijakan kepala madrasah MI Ma'arif Polorejo, Bapak Ahmad Suyono, S.Pd dalam menerapkan kurikulum Merdeka mengacu pada KMA Nomor 450

Tahun 2024 tentang implementasi kurikulum pada madrasah MI Ma'arif Polorejo, yang menjadi dasar bagi madrasah dalam menyesuaikan struktur kurikulum, perangkat pembelajaran, serta sistem penilaian Kepala madrasah menetapkan kebijakan internal untuk mulai menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap pada tingkat kelas tertentu. Kebijakan ini disusun berdasarkan arahan regulasi nasional serta kebutuhan madrasah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.¹²²

Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Dalam keputusan tersebut

¹²² Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 Tentang Implementasi Kurikulum Pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

dijelaskan bahwa satuan pendidikan dapat mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai kesiapan sekolah.¹²³ Selain itu, penerapan kurikulum juga merujuk pada kebijakan sebelumnya dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 yang mengatur pedoman implementasi kurikulum pada madrasah.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Ahmad Suyono, S.Pd selaku kepala sekolah MI Ma'arif Polorejo yaitu :

“ Ketika kurikulum yang berlaku itu kurikulum 2013, kita mengikuti kurikulum 2013. Sekarang kan sudah masuk di kurikulum merdeka. Dan untuk akhir tahun ini, tahun ajaran 2025-2026, sudah masuk di kurikulum yang menggunakan metode *deep learning* dan kurikulum berbasis

¹²³ “Kepmendikbud Ristek Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan Guru” (2922), [https://konten.usu.ac.id/storage/year/2025-07/satker/kTQsW/statis/regulation/Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.pdf](https://konten.usu.ac.id/storage/year/2025-07/satker/kTQsW/statis/regulation/Peraturan%20Menteri%20Pendidikan,%20Kebudayaan,%20Riset,%20dan%20Teknologi%20Republik%20Indonesia%20Nomor%2056%20Tahun%202022%20tentang%20Standar%20Pendidikan%20Guru.pdf).

cinta sekarang. Apa saja kurikulumnya, yang penting itu adalah komitmen dari guru. Komitmen guru, para sekolah, dan keluarga madrasah untuk saling mendukung dan meningkatkan kompetensi mereka. Kita kan sering mengikuti diklat, mengikuti perkembangan kurikulum yang penting. Kita tidak ketinggalan. Kita juga sering juga mengundang pengawas atau dari sumber lain untuk mendiklat guru-guru kita, kita datangkan kesini selain kita ikut juga ke program-program pelatihan diluar”¹²⁴

MI Ma’arif Polorejo ini selalu beradaptasi dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan kebijakan kurikulum yang sedang berlaku. Kepala madrasah menjelaskan bahwa saat pemerintah memperkenalkan Kurikulum 2013, madrasah langsung mengadopsi dan menerapkan kurikulum tersebut dalam proses pembelajaran. Kemudian, saat kebijakan mengalami perubahan dan memasuki fase penerapan Kurikulum Merdeka, madrasah kembali menyesuaikan alat dan metode

¹²⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W/MIS/13-XI/2025.

pembelajaran dengan ketentuan yang baru dan begitu juga menyampaikan bahwa menjelang akhir tahun ajaran 2025–2026, terdapat penguatan untuk pendekatan pembelajaran melalui metode pembelajaran mendalam dan konsep Kurikulum Berbasis Cinta. Perubahan ini dianggap sebagai bagian dari perkembangan kebijakan pendidikan yang berlangsung. Oleh karena itu, madrasah berusaha untuk mengikuti semua perubahan kebijakan agar tetap relevan dalam penerapan kurikulum.

Lebih jauh, Kepala Madrasah menekankan bahwa keberhasilan penerapan kurikulum tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ada, tetapi juga pada dedikasi semua pihak yang terlibat. Dedikasi para guru, pimpinan madrasah, serta dukungan dari komunitas madrasah merupakan aspek penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan pengembangan kemampuan siswa. Untuk

meningkatkan kesiapan para guru, madrasah aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pengembangan profesional. Para guru sering mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kemajuan kurikulum. Selain mengikuti pelatihan di luar lingkungan madrasah, pihak sekolah juga mengundang pengawas atau pembicara dari luar untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada guru di dalam madrasah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman guru mengenai perubahan kurikulum serta meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan pengajaran di kelas.

Penerapan kurikulum merupakan proses mengaktualisasikan rancangan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Proses ini tidak hanya mencakup penyampaian materi ajar, tetapi juga bagaimana guru menerjemahkan tujuan pembelajaran,

pendekatan pedagogis, strategi pengajaran, dan mekanisme penilaian ke dalam kegiatan belajar yang relevan dengan kebutuhan peserta didik.¹²⁵

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Ema Fatmawati, M.Pd beliau selaku wakil ketua bidang kurikulum MI Ma'arif Polorejo bahwasanya :

“Kurikulum yang berlaku di madrasah ini telah menggunakan Kurikulum Merdeka. Penerapannya tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan secara bertahap. Alhamdulillah, pada tahun ini seluruh kelas, mulai dari kelas I sampai kelas VI, telah menggunakan Kurikulum Merdeka. Meskipun hampir setiap pergantian menteri diikuti dengan perubahan kurikulum, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Jika perubahan tidak dilakukan, dunia pendidikan akan tertinggal oleh perkembangan zaman. Beliau juga tidak mempermasalahkan perubahan tersebut karena pembaruan kurikulum memang perlu dilakukan seiring dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu, beliau menyampaikan bahwa setiap ada pembaruan kurikulum, pendidik harus terus belajar dan menyesuaikan diri. Apabila tidak mau mempelajarinya, pendidik akan tersisih dan tidak lagi

¹²⁵ Michael G. Fullan, *The New Meaning of Educational Change* (3rd Ed.) (New York, USA: Teachers College Press, 2001), 93.

dibutuhkan. Dengan demikian, menurut beliau, perubahan kurikulum bukanlah beban, melainkan langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pendidikan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman”.¹²⁶

MI Ma’arif Polorejo telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dalam metode pengajaran. Ibu Ema Fatmawati menjelaskan bahwa penerapan kurikulum itu tidak dilakukan sekaligus di semua tingkat kelas, tetapi secara bertahap. Pada fase awal, kurikulum diterapkan pada beberapa tingkat kelas terlebih dahulu, sebelum secara perlahan diperluas hingga mencakup seluruh kelas. Ibu Ema Fatmawati juga menyampaikan bahwa tahun ini semua kelas, dari kelas I hingga kelas VI, telah menerapkan Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran di madrasah. Ibu Ema Fatmawati juga membahas dinamika perubahan kebijakan kurikulum yang

¹²⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/MIS/26-XII/2025

sering terjadi dalam sistem pendidikan di tanah air. Ia berpendapat bahwa pergeseran kurikulum yang sering terjadi, termasuk yang muncul saat terjadi pergantian menteri, adalah hal yang normal dalam sektor pendidikan.

Perubahan ini dianggap sebagai usaha pemerintah untuk menyelaraskan sistem pendidikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan era saat ini. Perubahan dalam kurikulum seharusnya tidak dianggap sebagai beban oleh para pendidik. Sebaliknya, hal tersebut seharusnya menjadi pendorong bagi guru untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuannya. Informan mengungkapkan bahwa setiap kali ada pembaruan kurikulum, pendidik perlu memahami kebijakan dan metode pembelajaran yang baru agar dapat menyesuaikan cara pengajaran di kelas.

Menurut waka kurikulum MI Ma'arif Polorejo guru yang enggan mempelajari perkembangan kurikulum berisiko untuk ketinggalan dan mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan pendidikan yang terus berubah. Oleh karena itu, kemampuan untuk beradaptasi dan keinginan untuk terus belajar sangat penting bagi pendidik dalam menghadapi perubahan kurikulum. Dengan demikian, informan melihat bahwa perubahan kurikulum merupakan langkah yang penting agar sistem pendidikan tetap relevan dan bisa mengikuti perkembangan zaman.

Penerapan kurikulum merupakan proses yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan. Menurut Fullan, implementasi kurikulum tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan tahapan, penyesuaian, dan kesiapan dari

berbagai unsur pendidikan, seperti guru, peserta didik, sarana prasarana, serta budaya sekolah.¹²⁷

Hal ini sejalan dengan kondisi madrasah yang menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap hingga akhirnya dapat diterapkan di seluruh kelas dari kelas I sampai kelas VI di MI Ma'arif Polorejo. Dengan demikian, pembaruan kurikulum tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Menurut ibu Ema Fatmawati, M.Pd bahwasanya dengan kurikulum yang sering berganti itu bukan beban tapi itu harus dilakukan dengan alasan supaya tidak ketinggalan zaman seperti halnya berikut ini :

“Perkembangan zaman yang semakin pesat, khususnya dalam bidang teknologi, menuntut dunia pendidikan untuk terus melakukan penyesuaian.

¹²⁷ Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change Fourth Edition* (New York: Teachers College Press, 2007), 121.

Apabila pendidikan tidak mampu mengikuti perkembangan tersebut, maka akan berpotensi mengalami ketertinggalan. Oleh karena itu, pembaruan kurikulum menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai upaya untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Pembaruan kurikulum tidak seharusnya dipandang sebagai beban, melainkan sebagai proses pembelajaran dan penyesuaian yang perlu dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Dengan demikian, melalui pembaruan kurikulum, pendidikan diharapkan mampu secara aktif merespons perkembangan zaman, sehingga peserta didik dan pendidik tidak tertinggal, melainkan mampu menjadi pelaku yang siap menghadapi perubahan”.¹²⁸

Paparan data dari wawancara menunjukkan bahwa para informan menganggap kemajuan zaman, khususnya di bidang teknologi, sebagai elemen krusial yang mendorong perubahan dalam sektor pendidikan. Mereka menjelaskan bahwa kemajuan teknologi yang begitu pesat memaksa sistem pendidikan untuk terus beradaptasi. Jika dunia pendidikan tidak mengikuti perkembangan ini, ada risiko

¹²⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/W/MIS/26-XII/2025.

pendidikan akan terabaikan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Ibu Fatmawati, M.Pd. juga menekankan bahwa salah satu cara untuk melakukan adaptasi dalam pendidikan adalah melalui pembaruan kurikulum. Mereka berpendapat bahwa peremajaan kurikulum merupakan langkah vital bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikannya dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Kurikulum perlu diupdate secara berkala agar konten pembelajaran, metode pengajaran, dan tujuan pendidikan tetap sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut Fullan, perubahan kurikulum tidak bersifat instan, melainkan memerlukan perencanaan yang matang, kesiapan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana, serta pembentukan budaya sekolah yang adaptif

dan inovatif. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai aktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kurikulum. Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, tetapi juga harus mampu mengembangkan kompetensi profesionalnya secara berkelanjutan agar dapat menghadapi tantangan pembelajaran di era digital.¹²⁹

Dari pemaparan diatas kemudian ditambahkan oleh ibu Ayati Robiah bahwa :

“Seluruh kelas saat ini telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Penerapan kurikulum ini menjadi upaya strategis agar sekolah tidak tertinggal dari sekolah-sekolah di wilayah perkotaan. Pergantian kurikulum bukan merupakan beban bagi pendidik maupun satuan pendidikan, melainkan sebuah kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan daya saing dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang semakin

¹²⁹ Fullan, *The New Meaning of Educational Change*, Fourth Edition.

canggih, dunia pendidikan dituntut untuk beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan dan kemauan untuk terus mempelajari hal-hal baru agar perubahan tersebut tidak menjadi hambatan dalam proses pembelajaran”.¹³⁰

Paparan data wawancara menunjukkan bahwa seluruh kelas di madrasah saat ini telah menerapkan Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran. Informan menjelaskan bahwa penerapan kurikulum tersebut dilakukan sebagai langkah strategis agar madrasah mampu mengikuti perkembangan pendidikan dan tidak tertinggal dari sekolah-sekolah yang berada di wilayah perkotaan. Dengan menerapkan Kurikulum Merdeka pada seluruh tingkat kelas, madrasah berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran serta menyesuaikan diri dengan arah

¹³⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W/MIS/26-XII/2025

kebijakan pendidikan yang sedang berlaku. Ibu Ayati Robiah juga menyampaikan bahwa pergantian kurikulum bukan merupakan sesuatu yang perlu dipandang sebagai beban bagi pendidik maupun satuan pendidikan. Menurutnya, perubahan kurikulum merupakan kebijakan yang wajar dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat daya saing lembaga pendidikan.

Selain itu, beliau juga menekankan bahwa perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat turut mempengaruhi sistem pendidikan. Perkembangan tersebut menuntut dunia pendidikan untuk mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, guru dan pihak sekolah perlu memiliki kesiapan serta kemauan untuk terus

mempelajari hal-hal baru yang berkaitan dengan kebijakan kurikulum maupun metode pembelajaran. Berdasarkan penjelasan Ibu Ayati Robiah tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan Kurikulum Merdeka di madrasah tidak hanya bertujuan untuk mengikuti kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan zaman. Sikap terbuka terhadap perubahan serta kemauan untuk terus belajar menjadi faktor penting agar perubahan kurikulum tidak menjadi hambatan, melainkan dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif.

Penerapan Kurikulum Merdeka pada seluruh kelas merupakan bentuk respons sekolah terhadap kebijakan pendidikan nasional dan tuntutan

perkembangan zaman. Dalam konteks teori implementasi kurikulum, Michael Fullan menegaskan bahwa perubahan kurikulum tidak hanya berkaitan dengan penggantian dokumen kebijakan, tetapi terutama pada proses perubahan yang terjadi pada pelaksana di tingkat sekolah. Fullan menyatakan bahwa “*educational change depends on what teachers do and think*” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat ditentukan oleh kesiapan, pemahaman, serta sikap pendidik dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran.¹³¹

Berdasarkan hasil observasi di madrasah, penerapan kurikulum telah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama

¹³¹ Fullan, *The New Meaning of Educational Change*.

dalam acuan KMA Nomor 450 Tahun 2024 Hal tersebut ditunjukkan oleh kesesuaian dokumen kurikulum madrasah dengan regulasi yang berlaku, seperti penggunaan dokumen Kurikulum Operasional Madrasah (KOM) yang mengacu pada pedoman terbaru dari Kementerian Agama . Selain itu, madrasah secara aktif mengikuti perkembangan dan perubahan kebijakan kurikulum. Bukti observasi menunjukkan bahwa madrasah telah melakukan penyesuaian terhadap perangkat pembelajaran, yang terlihat dari penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Modul Ajar yang selaras dengan struktur kurikulum terbaru. Dalam proses pembelajaran, guru menerapkan pendekatan dan strategi pembelajaran

yang dianjurkan dalam regulasi kurikulum yang berlaku.¹³²

Selain itu peneliti mencoba untuk menggali lebih dalam lagi peneliti menggunakan Teknik dokumentasi dan menghasilkan, bahwasanya MI Ma'arif Polorejo telah menyediakan sarana pembelajaran berbasis digital berupa televisi digital berbasis Android yang ditempatkan di setiap ruang kelas. Hal tersebut dibuktikan melalui dokumen inventaris sarana dan prasarana madrasah yang mencatat kepemilikan dan distribusi perangkat televisi digital sebagai media pendukung pembelajaran ada kurang lebih 100 TV berbasis Android yang terpasang di setiap kelas supaya pembelajaran memperlihatkan pemanfaatan media digital pada berbagai mata

¹³² Lihat Transkrip Observasi Nomor 02/O/MIS/13-XII/2025

pelajaran. Pada mata pelajaran fiqih, dokumen pembelajaran menunjukkan penggunaan media digital untuk menyajikan materi tentang tata cara berwudu dan salat. Sementara itu, pada mata pelajaran IPS, guru menunjukkan pemanfaatan media digital berupa video pembelajaran dari YouTube pada mata pelajaran IPS dan fiqih.

Dokumen pembelajaran mencantumkan penggunaan video sebagai sumber belajar untuk menjelaskan materi tentang konsep magnet pada mata pelajaran IPS serta tata cara solat dan wudu pada mata pelajaran fiqih. Selain itu, dokumentasi pembelajaran menunjukkan bahwa guru mendampingi siswa dalam penggunaan televisi berbasis Android dan memberikan penjelasan lanjutan dengan mengaitkan materi video dengan buku teks. Pendampingan tersebut bertujuan

untuk memperjelas materi pembelajaran dan membantu siswa memahami isi pembelajaran secara lebih sistematis.¹³³

Tahap selanjutnya dalam penelitian ini, kesenjangan implementasi kurikulum dianalisis melalui penyandingan antara standar normatif kurikulum, perangkat pembelajaran, dan tujuan implementasi dengan data empiris hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo. Penyandingan data dilakukan antara dokumen kurikulum, RPP, dan modul ajar dengan praktik pembelajaran yang berlangsung di kelas untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kondisi ideal yang direncanakan dengan implementasi nyata di lapangan. Melalui proses tersebut, penelitian

¹³³ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 06/D/MIS/13-XI/2025

ini dapat menemukan indikator-indikator kesenjangan implementasi kurikulum, baik dalam aspek perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penggunaan media, maupun evaluasi pembelajaran di madrasah.¹³⁴

Melalui proses penyandingan tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan implementasi kurikulum secara umum, tetapi juga mengidentifikasi berbagai bentuk ketidaksesuaian antara kondisi ideal yang tercantum dalam dokumen kurikulum dengan realitas pelaksanaannya di madrasah. Kesenjangan implementasi terlihat ketika perangkat pembelajaran yang telah disusun guru belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik pembelajaran,

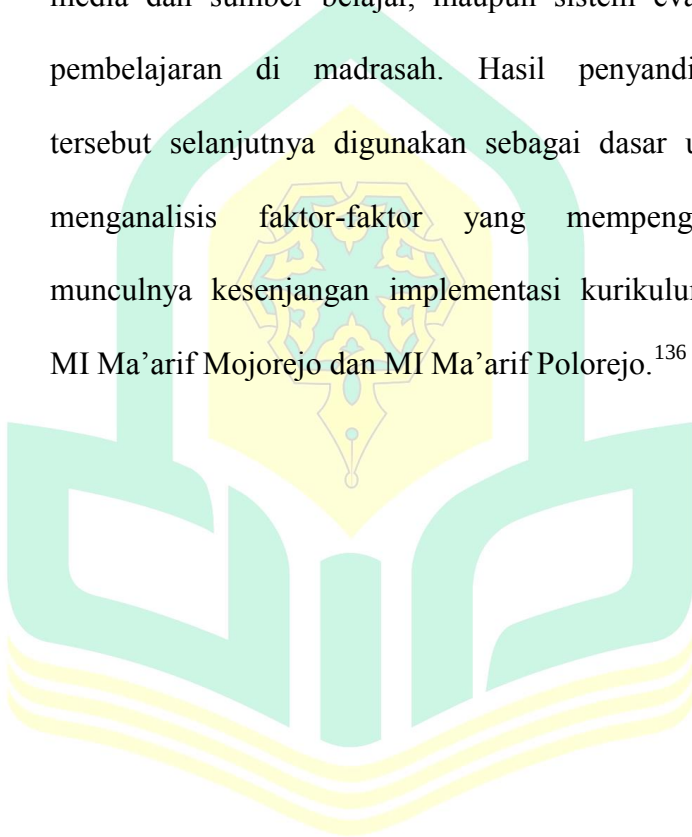
¹³⁴ Jeffrey L. Pressman and Aaron Wildavsky, *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland* (Los Angeles: Universitas Of California Press, 1984), 87-95.

penggunaan metode pembelajaran masih didominasi pendekatan konvensional, pemanfaatan media pembelajaran belum optimal, serta pelaksanaan evaluasi pembelajaran belum sepenuhnya mengacu pada penilaian autentik sebagaimana tuntutan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Selain itu, penyandingan data juga menunjukkan bahwa beberapa guru masih mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran aktif, diferensiasi, dan asesmen pembelajaran sesuai dengan karakteristik kurikulum yang berlaku.¹³⁵

Dengan demikian, proses penyandingan data dalam penelitian ini menjadi langkah penting untuk menemukan indikator-indikator kesenjangan implementasi kurikulum secara lebih objektif dan

¹³⁵ Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change Fourth Edition* (New York: Teachers College Press, 2007), 88-97.

mendalam, baik dalam aspek perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penggunaan media dan sumber belajar, maupun sistem evaluasi pembelajaran di madrasah. Hasil penyandingan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kesenjangan implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo.¹³⁶



¹³⁶ Allan C. Ornstein and Francis P. Hunkins, *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues (7th Ed.* (New York, USA: Pearson, 2018), 35.

BAB V

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESENJANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM DI MA'ARIF MOJOREJO DAN MI MA'ARIF POLOREJO

A. Faktor yang mempengaruhi kesenjangan kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo

1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kesenjangan kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo

Faktor-faktor kesenjangan implementasi kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, salah satunya adalah ketersediaan dan kualitas modul ajar yang digunakan oleh guru. Modul ajar yang belum tersusun secara sistematis, kurang kontekstual, atau tidak sepenuhnya selaras dengan capaian pembelajaran dapat menyulitkan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran faktor-faktor yang akan

mempengaruhi kesenjangan implementasi

kurikulum menurut ibu Jamilatun adalah :

Kesenjangan implementasi kurikulum di madrasah adalah ketidaksiapan modul ajar serta perubahan kebijakan kurikulum yang relatif cepat. Ibu Jamilatu juga menyampaikan bahwa modul ajar belum sepenuhnya tertata dan kurikulum belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih berada dalam tahap penyempurnaan. Kondisi ini diperparah dengan adanya perubahan kebijakan kurikulum meskipun implementasi baru memasuki tahun kedua, sehingga menimbulkan kebingungan bagi guru dalam menentukan acuan pembelajaran yang digunakan. Ketidakstabilan kebijakan tersebut menyebabkan penerapan kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo menjadi kurang maksimal dan berdampak pada terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan kurikulum dan pelaksanaannya di kelas.¹³⁷

Kesenjangan implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo terlihat dari kesiapan perangkat pembelajaran serta dinamika kebijakan kurikulum

¹³⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/MIS/13-XI/2025

yang terjadi dalam waktu relatif singkat. Hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum masih menghadapi beberapa kendala teknis. Dari hasil wawancara dengan Ibu Jamilatun, S.Pd terungkap bahwa salah satu kendala utama dalam menjalankan kurikulum adalah ketidaksiapan modul pengajaran. Modul pengajaran yang digunakan oleh guru belum sepenuhnya disusun dengan baik. Beberapa guru masih berada di tahap penyusunan dan penyesuaian dengan kebutuhan pembelajaran di kelas. Keadaan ini membuat proses pembelajaran tidak berjalan secara maksimal karena guru harus melakukan penyesuaian ulang pada materi dan kegiatan yang akan dilaksanakan.¹³⁸

¹³⁸ Gene E. Hall and Shirley M. Hord, *Implementing Change:*

Selain itu, perubahan kebijakan kurikulum yang cepat juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum. Menurut Ibu Jamilaton, kurikulum yang diterapkan di madrasah sudah berlangsung sekitar dua tahun. Namun, dalam periode itu, sejumlah penyesuaian kebijakan muncul yang harus dilakukan oleh para guru. Perubahan ini menyebabkan kebingungan bagi guru dalam menentukan acuan pembelajaran yang akan digunakan. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan pembelajaran di kelas. Perencanaan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya sering kali harus disesuaikan kembali dengan kebijakan terbaru. Akibatnya, terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan kurikulum dan pelaksanaan

pembelajaran di kelas sehingga implementasi kurikulum di madrasah belum berjalan secara maksimal.

Dari wawancara kami dengan Ibu Jamilatun, S.Pd telah di temukan sebuah temuan dari penelitian yang menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kesiapan perangkat pembelajaran dan stabilitas kebijakan kurikulum diantaranya sebagai berikut :

Pertama, kesiapan alat bantu belajar, khususnya modul ajar, masih belum memadai. Modul ajar adalah elemen krusial dalam perencanaan pengajaran karena berfungsi sebagai pedoman bagi guru selama proses belajar mengajar. Ketidaklengkapan modul ajar membuat guru harus

melakukan penyesuaian langsung saat pelaksanaan pembelajaran. Kondisi ini mengakibatkan proses belajar menjadi kurang teratur, dan tujuan pendidikan tidak selalu dapat tercapai dengan baik,¹³⁹

Kedua, perubahan kebijakan kurikulum yang terjadi dalam waktu singkat menimbulkan tantangan bagi para guru dalam beradaptasi. Guru perlu waktu untuk memahami ide dari kurikulum yang baru, menyusun alat bantu belajar, dan menyesuaikan metode pengajaran dengan karakteristik siswa. Apabila perubahan kebijakan kurikulum terjadi sebelum proses adaptasi tuntas, guru akan kesulitan

¹³⁹ George J. Posner, *Analyzing the Curriculum 2nd Ed* (New York: McGraw Hill, 1995), 95.

untuk menemukan pedoman pembelajaran yang konsisten.¹⁴⁰

Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara kebijakan kurikulum yang ditentukan di tingkat nasional dengan persiapan pelaksanaannya di tingkat sekolah. Perbedaan ini berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan kurikulum di madrasah, terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan proses belajar mengajar.

Temuan dari studi ini sejalan dengan teori pelaksanaan kebijakan pendidikan yang menyebutkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kurikulum sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya, kejelasan dalam kebijakan, dan stabilitas regulasi yang mengawasi pelaksanaannya.

¹⁴⁰ Fullan, *The New Meaning of Educational Change*, Fourth Edition, 132.

Pelaksanaan kurikulum tidak semata-mata tergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kemampuan guru untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam proses belajar-mengajar di kelas.

Di lingkungan madrasah, pelaksanaan kurikulum juga ditentukan oleh berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Kebijakan tersebut mencakup Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pelaksanaan Kurikulum di Madrasah, yang menjadi landasan untuk penerapan Kurikulum 2013 di madrasah. Kemudian, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 yang memberikan panduan untuk penerapan Kurikulum Merdeka di madrasah sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Perkembangan kebijakan kurikulum tersebut selanjutnya dikuatkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025, yang mengatur perbaikan pelaksanaan kurikulum madrasah agar lebih responsif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan ini menyoroti pentingnya pengembangan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, jalur tujuan pembelajaran, serta perencanaan pembelajaran yang terstruktur. Akan tetapi, hasil riset menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini di tingkat madrasah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kesiapan perangkat pembelajaran dan adaptasi guru terhadap perubahan kebijakan. Ini mengindikasikan bahwa suksesnya implementasi kurikulum tidak hanya bergantung pada kebijakan

yang berlaku, tetapi juga pada sejauh mana madrasah mampu menerapkan kebijakan tersebut dalam proses pembelajaran.¹⁴¹

Sehingga, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa adanya kesenjangan dalam pelaksanaan kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo disebabkan oleh perbedaan antara kebijakan kurikulum yang terus berkembang dan kesiapan guru untuk menerapkan kurikulum tersebut di lingkungan pendidikan.

Hal tersebut juga disampaikan oleh waka kurikulum ibu Ria Widayati yakni :

“Faktor utama yang mempengaruhi kesenjangan implementasi kurikulum di madrasah adalah perubahan kebijakan kurikulum yang terjadi secara berkelanjutan dan relatif cepat. Kurikulum Merdeka yang belum sepenuhnya mapan dalam pelaksanaannya kemudian diikuti dengan kebijakan Kurikulum Berbasis Cinta dan

¹⁴¹ Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

model pembelajaran *deep learning* yang harus diintegrasikan ke dalam kurikulum madrasah yang telah disusun, sehingga menimbulkan kebingungan di tingkat satuan pendidikan dan menuntut penyesuaian berulang, baik dalam penyusunan Dokumen satu maupun dalam praktik pembelajaran. Selain itu, perubahan pola pelaksanaan program pembelajaran, seperti integrasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) ke dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari, membutuhkan waktu adaptasi, pemahaman, dan kesiapan pendidik, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan antara kurikulum yang direncanakan dan yang dilaksanakan di lapangan”.¹⁴²

Faktor dari kesenjangan dalam pelaksanaan kurikulum dipengaruhi oleh perubahan kebijakan kurikulum yang terjadi dengan sangat cepat. Kepala madrasah Ibu Jamilatun, S.Pd mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan saat ini masih berada dalam proses penyesuaian terhadap Kurikulum Merdeka, sementara pada saat yang bersamaan, ada

¹⁴² Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/MIS/ 20-XI/2025.

kebijakan baru yang harus diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Kepala Madrasah MI Ma'arif Mojorejo menyatakan bahwa perubahan dalam kebijakan kurikulum mengharuskan madrasah untuk melakukan penyesuaian berulang-ulang pada dokumen kurikulum. Ia menjelaskan bahwa kurikulum yang telah disusun sebelumnya perlu diperbarui ketika ada kebijakan baru dari kementerian. Dia menambahkan bahwa keadaan ini mengakibatkan guru harus menyesuaikan kembali alat ajar seperti modul ajar/RPP dan dokumen kurikulum untuk tingkat satuan pendidikan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Khoirul Muntari salah satu guru MI Ma'arif Mojorejo. Beliau menjelaskan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka masih dalam tahap pemahaman

oleh para guru, namun sudah ada kebijakan tambahan seperti Kurikulum Berbasis Cinta dan pendekatan pembelajaran *deep learning*. Beliau juga menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak menghapus kurikulum yang lama, melainkan harus diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Keadaan ini mengharuskan guru untuk menyesuaikan kembali rencana pembelajaran yang sudah ada.¹⁴³

Berdasarkan paparan data diatas dapat diketahui bahwa perubahan kebijakan kurikulum yang berlangsung secara berkelanjutan menuntut madrasah untuk melakukan penyesuaian secara berulang. Kondisi ini berdampak pada penyusunan

¹⁴³. Lihat Transkrip Dokumentasi, Nomor 07/D/MIS/20-XI/2025

dokumen kurikulum serta pelaksanaan pembelajaran di kelas.

Faktor kesenjangan implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo juga bisa dipengaruhi oleh keterbatasan sarana prasarana, hal ini disampaikan oleh Ibu Khoirul Muntari adalah sebagai berikut :

Keterbatasan sarana dan prasarana membuat guru belum dapat mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran sebagaimana dianjurkan dalam kurikulum, namun guru tetap berupaya mengimplementasikan prinsip pembelajaran Kurikulum Merdeka yang berpusat pada peserta didik dan bersifat kontekstual. Pada mata pelajaran IPS, khususnya materi budidaya ikan, hewan, dan fotosintesis, guru mengajak siswa melakukan observasi langsung di lapangan, seperti ke kolam ikan, kandang, dan sawah, sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman belajar nyata. Dalam kegiatan tersebut, guru berperan sebagai fasilitator dengan memberikan pendampingan dan arahan agar siswa memahami konsep secara lebih konkret

meskipun dalam kondisi keterbatasan sarana dan prasarana.¹⁴⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Khoirul Muntari menyampaikan bahwa kurangnya fasilitas dan perlengkapan masih menjadi hambatan dalam penggunaan media pembelajaran di MI Ma'arif Mojorejo. Situasi ini menyebabkan para guru belum bisa memanfaatkan berbagai media pembelajaran dengan semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan dalam Kurikulum Merdeka. Namun, para guru tetap berusaha melaksanakan pembelajaran yang fokus pada siswa dan menghubungkan materi dengan kondisi di sekitar mereka agar proses belajar tetap relevan dan memiliki arti bagi para siswa. Beliau juga

¹⁴⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/MIS/12-XII/2025.

menjelaskan bahwa dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, khususnya mengenai budidaya ikan, hewan, dan proses fotosintesis, para guru memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber untuk belajar.

Para guru mengajak siswa untuk melakukan kegiatan observasi langsung di lapangan, seperti melihat kolam ikan, kandang hewan ternak, dan area persawahan yang ada di sekitar madrasah. Dengan cara ini, siswa dapat mengamati secara langsung objek yang sedang dipelajari sehingga pemahaman mereka mengenai konsep menjadi lebih jelas. Dalam pelaksanaan tersebut, guru berfungsi sebagai pembimbing yang memberikan petunjuk dan

dukungan selama observasi. Guru membantu siswa untuk melihat objek, mengajukan pertanyaan, dan mengaitkan hasil pengamatan tersebut dengan konsep yang sedang dibahas. Dengan pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya terjadi secara teoritis di ruang kelas, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada siswa meskipun dalam keadaan terbatasnya sarana dan prasarana dari keterbatasan sarana dan prasarana inilah yang menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi kesenjangan implementasi kurikulum.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa guru telah melakukan penyesuaian materi ajar dengan kondisi dan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran.

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan awal siswa, namun tetap mengacu pada materi pokok yang telah ditetapkan dalam Kurikulum Merdeka. Dalam praktiknya, guru berupaya mengkolaborasikan kebutuhan belajar siswa dengan tuntutan pencapaian materi, mengingat adanya standar kompetensi yang harus dipenuhi.

Meskipun Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada guru dalam menentukan target pembelajaran, guru tetap menetapkan standar materi tertentu agar selaras dengan kebutuhan evaluasi dan ujian yang harus diikuti oleh siswa.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Lihat Transkrip Observasi Nomor 04/O/MIS/20-XII/2025.

Hasil dari operasi yang dilakukan peneliti di kelas menunjukkan bahwa guru telah menyesuaikan materi pengajaran dengan kondisi belajar para siswa. Ketika proses belajar mengajar berlangsung, guru terlebih dahulu mengevaluasi kemampuan awal siswa melalui pertanyaan lisan dan diskusi singkat. Langkah ini diambil untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa sebelum memulai materi utama. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru tidak langsung menyampaikan semua materi sekaligus, tetapi memilih bagian-bagian materi yang dinilai paling sesuai dengan kemampuan siswa.

Materi yang diajarkan tetap merujuk pada topik yang terdapat dalam perangkat pembelajaran seperti modul ajar yang disusun berdasarkan Kurikulum Merdeka. Peneliti juga mencatat bahwa

guru seringkali memberikan contoh-contoh sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar materi lebih mudah dipahami.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan kurikulum di MI Ma'arif Polorejo

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan implementasi kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, salah satunya adalah kesiapan guru dalam menghadapi perubahan kurikulum. Perbedaan tingkat pemahaman dan kompetensi guru dalam menerjemahkan kebijakan kurikulum ke dalam perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan asesmen menjadi faktor utama munculnya kesenjangan implementasi kurikulum menurut bapak Suyono adalah sebagai berikut :

“Kesiapan guru dalam menghadapi perubahan kurikulum. Guru dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan kurikulum baru, seperti

pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil 'Alamin (P5RA), yang memerlukan kesiapan media, peralatan, serta perencanaan pembelajaran yang lebih matang. Persiapan tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sehingga berimplikasi pada keterlambatan penyelesaian materi pembelajaran sesuai target kurikulum. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan kurikulum dan pelaksanaannya di kelas. Selain itu, masih ditemukannya guru yang bertahan pada metode pembelajaran konvensional, seperti ceramah, turut memperlebar kesenjangan implementasi kurikulum. Oleh karena itu, bapak kepala madrasah Bapak Ahmad Suyono, S.Pd menekankan pentingnya pelatihan guru sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan dalam mengimplementasikan kurikulum secara optimal".¹⁴⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala madrasah dan beberapa pengajar di MI Ma'arif Polorejo, didapatkan informasi bahwa adanya perubahan kurikulum memerlukan kesiapan guru dalam berbagai aspek

¹⁴⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/MIS/13-XI/2025.

pembelajaran. Para guru tidak hanya perlu menyesuaikan perangkat pengajaran seperti modul dan ATP, tetapi juga harus mempersiapkan kegiatan belajar yang berbasis proyek melalui pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil ‘Alamin (P5RA). Kepala madrasah Bapak Ahmad Suyono, S.Pd menjelaskan bahwa implementasi program P5RA memerlukan persiapan yang lebih rumit dibandingkan dengan metode pengajaran sebelumnya.

Para guru harus menyiapkan media pembelajaran, alat praktik, serta merancang kegiatan proyek yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Proses ini memerlukan waktu perencanaan yang cukup panjang sehingga dalam beberapa situasi dapat berpengaruh pada

keterlambatan penyelesaian materi pembelajaran yang telah menjadi target dalam kurikulum

Bapak Ahmad Suyono, S.Pd sebagai kepala madrasah juga menyampaikan bahwa modifikasi kurikulum mengharuskan para guru untuk terus belajar dan menyesuaikan cara mengajar. Namun dalam kenyataannya, tidak semua pengajar mampu beradaptasi dengan segera. Beberapa pengajar masih menggunakan metode ceramah sebagai strategi utama dalam proses belajar karena dianggap lebih praktis dan tidak memerlukan banyak persiapan media maupun kegiatan proyek.

Selain itu, para guru juga menyatakan bahwa penyusunan kegiatan P5RA membutuhkan kerjasama antar guru serta ketersediaan fasilitas pendukung yang cukup. Jika perencanaan belum

sepenuhnya matang, pelaksanaan proyek dapat mengurangi waktu yang tersedia untuk mengajarkan materi inti di kelas. Kondisi ini menimbulkan perbedaan antara rencana kurikulum yang telah disusun dalam perangkat pembelajaran dengan pelaksanaan yang sebenarnya di dalam kelas.

Temuan ini sejalan dengan teori kesenjangan kurikulum yang dikemukakan oleh John I. Goodlad, yang menyatakan bahwa perbedaan antara *intended curriculum* dan *implemented curriculum* sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan pelaksana kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Selain itu, masih ditemukannya guru yang bertahan pada metode pembelajaran konvensional, seperti ceramah, ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan

kurikulum yang menekankan pembelajaran aktif dan praktik pembelajaran di kelas..¹⁴⁷

Oleh sebab itu, Bapak Ahmad Suyono, S.Pd menekankan bahwa pelatihan dan bimbingan untuk para guru itu sangat penting. Guru diharapkan mampu memperdalam pemahaman pengajar mengenai penerapan kurikulum, pengembangan pembelajaran yang berfokus pada proyek, serta penerapan metode pengajaran yang lebih beragam dan efisien.

Hal ini juga disampaikan oleh waka kurikulum Ibu Ema Fatmawati bahwasanya :

“Perubahan kebijakan kurikulum yang terjadi secara relatif cepat menuntut madrasah untuk melakukan penyesuaian berkelanjutan dalam perencanaan, perangkat pembelajaran, dan sistem evaluasi. Perubahan ini tidak dipandang

¹⁴⁷ John I. Goodlad, *Curriculum Inquiry: The Study of Curriculum Practice* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1979), 210-211.

sebagai beban, melainkan sebagai keharusan strategis agar madrasah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tetap memiliki daya saing. Namun, keterbatasan waktu sosialisasi dan pendampingan menyebabkan implementasi kurikulum belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan desain ideal, sehingga masih terdapat kesenjangan antara kurikulum tertulis dan praktik pembelajaran di madrasah”.¹⁴⁸

Perubahan kebijakan kurikulum yang terjadi secara relatif cepat menuntut madrasah melakukan penyesuaian berkelanjutan dalam perencanaan, perangkat pembelajaran, dan sistem evaluasi sebagai langkah strategis agar tetap adaptif dan berdaya saing. Namun, keterbatasan waktu sosialisasi dan pendampingan menyebabkan implementasi kurikulum belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan desain ideal. Berdasarkan teori *Street-Level Bureaucracy (Lipsky)*, guru dan waka

¹⁴⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 05/W/MIS/13-XI/2025.

kurikulum sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lapangan memiliki ruang diskresi dalam menerjemahkan kebijakan sesuai dengan kondisi dan keterbatasan yang dihadapi. Diskresi tersebut memunculkan penyesuaian dalam praktik pembelajaran yang berdampak pada kesenjangan antara kurikulum tertulis dan implementasinya di madrasah.¹⁴⁹

Selain pemaparan dari Ibu Ema Fatmawati dan Bapak Ahmad Suyono ada lagi pemekaran dari ibu Ayati Robiah yang menyatakan :

“Keterbatasan pemahaman dan kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum yang baru belum sepenuhnya optimal. Meskipun telah mengikuti kegiatan sosialisasi atau pelatihan, pemahaman guru terhadap konsep, pendekatan pembelajaran, dan sistem asesmen dalam

¹⁴⁹ Michael Lipsky, *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services* (New York: Russell Sage Foundation, 1980), 5.

kurikulum yang belum merata. sebagian guru masih mengalami kebingungan dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran di kelas. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pembelajaran cenderung menyesuaikan dengan kebiasaan lama, sehingga tujuan dan karakteristik kurikulum yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Mungkin karena hal ini dipengaruhi oleh perubahan kurikulum begitu cepat dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya guru akan mengalami kewalahan meskipun menuntut itu waka kurikulum itu bukan sebagai beban guru tetapi dengan rotasi pergantian kurikulum yang begitu cepat itu akan membuat guru secara tidak langsung akan kewalahan juga .”¹⁵⁰

Keterbatasan pemahaman dan kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum yang baru belum sepenuhnya optimal. Meskipun telah mengikuti kegiatan sosialisasi atau pelatihan, pemahaman guru terhadap konsep, pendekatan pembelajaran, dan sistem asesmen dalam kurikulum yang belum merata. sebagian guru

¹⁵⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 09/W/MIS/ 26-XII/2025.

masih mengalami kebingungan dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran di kelas. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pembelajaran cenderung menyesuaikan dengan kebiasaan lama, sehingga tujuan dan karakteristik kurikulum yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Mungkin karena hal ini dipengaruhi oleh perubahan kurikulum begitu cepat dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya guru akan mengalami kewalahan.

Informasi serupa juga diutarakan oleh Wakil Kepala Madrasah yang bertanggung jawab di bidang Kurikulum. Ia mengungkapkan bahwa pihak madrasah telah berusaha memberikan pemahaman melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Namun, perubahan kurikulum yang

terjadi dengan cepat memaksa para guru untuk terus menyesuaikan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Menurutnya, pergantian kurikulum bukanlah beban bagi guru, tetapi merupakan suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun demikian, perubahan yang terjadi secara berulang tetap membutuhkan kesiapan dan adaptasi guru dalam waktu yang singkat.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman tentang konsep kurikulum, pendekatan pembelajaran, dan sistem asesmen merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum di madrasah. Selain itu, perubahan kurikulum yang berlangsung dengan cepat juga mengharuskan guru

untuk melakukan penyesuaian yang berkelanjutan. Hal ini menyebabkan sebagian guru masih merasa bingung dalam menerapkan kurikulum secara efektif, sehingga pelaksanaan pembelajaran di kelas dalam beberapa keadaan masih beradaptasi dengan kebiasaan belajar yang lama.

Pergantian kurikulum yang berlangsung relatif cepat berdampak pada belum optimalnya implementasi kurikulum di MI Ma'arif Polorejo. Kondisi ini diperkuat oleh temuan dalam dokumen kebijakan serta laporan kegiatan pelatihan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara penetapan kebijakan di tingkat pusat dengan kesiapan pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan. Guru memerlukan waktu adaptasi yang cukup panjang untuk menguasai satu kurikulum, namun perubahan

kebijakan sering terjadi sebelum proses adaptasi tersebut selesai. Selain itu, tuntutan kurikulum yang memerlukan dukungan sarana dan teknologi tertentu belum sepenuhnya didukung oleh kondisi fasilitas madrasah, sehingga memunculkan kesenjangan antara kurikulum tertulis dan kurikulum yang diimplementasikan.¹⁵¹

Pergantian kurikulum yang relatif cepat menyebabkan implementasi kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah belum berjalan optimal. Dokumen kebijakan dan laporan pelatihan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penetapan kebijakan di tingkat pusat dan kesiapan pelaksanaan di tingkat daerah, baik dari aspek waktu adaptasi guru maupun ketersediaan sarana pendukung. Kondisi ini

¹⁵¹ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 07/S/MIS/26-XII/2025.

mencerminkan kesenjangan implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky, yaitu ketika kebijakan yang dirumuskan tidak sepenuhnya selaras dengan kapasitas dan sumber daya pelaksana di tingkat satuan pendidikan.¹⁵²

Berdasarkan hasil studi dokumentasi diatas pergantian kurikulum yang berlangsung relatif cepat menyebabkan implementasi kurikulum di MI Ma'arif Polorejo belum berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kurikulum ideal dan kurikulum tertulis, serta antara kurikulum tertulis dan kurikulum yang diimplementasikan, sebagaimana dikemukakan oleh

¹⁵² Pressman and Wildavsky, *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*, 6.

Van den Akker. Dokumen kebijakan dan laporan pelatihan memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan tidak selalu diiringi dengan kesiapan guru dan dukungan sarana yang memadai. Akibatnya, kurikulum yang dirancang secara konseptual tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik pembelajaran di kelas.¹⁵³

Kurikulum yang dirancang secara konseptual tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik pembelajaran karena adanya perbedaan antara kebijakan dan kondisi nyata di sekolah. Keterbatasan pemahaman guru, proses adaptasi yang belum selesai, dukungan pelatihan yang masih terbatas, serta keterbatasan sarana pembelajaran.

¹⁵³ Akker, *Curriculum Perspectives: An Introduction*, 3.

BAB VI

IMPLIKASI KESENJANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM DI MI MA'ARIF MOJOREJO DAN MI MA'ARIF POLOREJO

Kesenjangan dan dampak implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo sebagaimana dalam Bagan sinkronisasi ini yang menggambarkan keterkaitan antara kebijakan kurikulum madrasah swasta di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo dan proses implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan, serta kesenjangan implementasi yang muncul dalam praktik pembelajaran di madrasah.serta munculnya kesenjangan dalam implementasinya. Pada bagian awal ditunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum di madrasah berlandaskan pada kebijakan kurikulum madrasah yang ditetapkan oleh pemerintah melalui regulasi resmi, yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Struktur Kurikulum

Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab serta Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Kedua kebijakan tersebut menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan kerangka dasar yang kemudian diterjemahkan ke dalam struktur implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan.

Struktur implementasi tersebut mencakup beberapa komponen utama, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Ketiga komponen ini menjadi tahapan penting dalam proses penerapan kurikulum karena menentukan bagaimana kebijakan yang bersifat konseptual dapat diterapkan dalam praktik pembelajaran di kelas. Struktur implementasi kurikulum tersebut kemudian diwujudkan dalam pelaksanaan pendidikan

di madrasah yang dalam penelitian ini difokuskan pada dua lembaga, yaitu MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo. Kedua madrasah tersebut menjadi lokasi penelitian implementasi kebijakan kurikulum sekaligus objek analisis untuk melihat bagaimana kebijakan kurikulum diterapkan dalam praktik pembelajaran. Dalam proses implementasinya, kedua madrasah dianalisis melalui berbagai aspek implementasi yang meliputi pemahaman terhadap tujuan perubahan kurikulum, metode pembelajaran yang digunakan, kondisi lingkungan belajar, kepemimpinan kepala madrasah, kompetensi guru, ketersediaan sarana prasarana, serta kemampuan guru dalam beradaptasi terhadap perubahan kurikulum.

Pada MI Ma'arif Mojorejo, tujuan perubahan kurikulum belum dipahami secara merata oleh seluruh guru sehingga berdampak pada variasi pemahaman dalam

pelaksanaan pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan masih tergolong sederhana dan guru masih mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi. Meskipun demikian, lingkungan belajar di madrasah tersebut cukup kondusif untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Kepala sekolah juga berperan aktif dalam mengontrol berbagai program yang berkaitan dengan implementasi kurikulum. Dari sisi kompetensi, guru memiliki kemampuan pedagogik yang cukup baik, namun kompetensi dalam bidang teknologi informasi masih relatif rendah. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Secara umum, implementasi yang dilakukan di MI Ma'arif Mojorejo diarahkan untuk mewujudkan madrasah yang islami dan berprestasi. Berbeda dengan kondisi tersebut, implementasi kurikulum di MI

Ma'arif Polorejo menunjukkan kesiapan yang relatif lebih baik dalam beberapa aspek.

Tujuan perubahan kurikulum sudah lebih stabil dan telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam KMA 450 Tahun 2024. Dokumen kurikulum yang dimiliki madrasah juga relatif lengkap dan tersusun secara sistematis sehingga memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Selain itu, sarana dan prasarana pembelajaran di madrasah ini tergolong lebih memadai, seperti tersedianya televisi Android, LCD, serta fasilitas lain yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Madrasah juga memperoleh akses pelatihan dan pendampingan dari kepala madrasah maupun pengawas sehingga guru memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Kepemimpinan yang diterapkan bersifat inovatif dan adaptif terhadap perubahan kebijakan

pendidikan. Kondisi tersebut mendorong guru untuk lebih adaptif dalam menghadapi perubahan kurikulum. Dampaknya terlihat pada variasi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru serta berkembangnya pembelajaran berbasis proyek sebagai salah satu pendekatan dalam Kurikulum Merdeka.

Meskipun kedua madrasah telah melaksanakan implementasi kurikulum berdasarkan kebijakan yang berlaku, hasil analisis menunjukkan masih terdapat kesenjangan implementasi dalam praktik pembelajaran. Pada MI Ma'arif Mojorejo, kesenjangan tersebut terlihat dari beberapa kondisi, antara lain pemahaman teknis guru terhadap kurikulum yang belum merata, kesulitan dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi serta penilaian autentik, dan keterbatasan pelatihan yang diikuti oleh guru. Supervisi akademik sebenarnya telah dilaksanakan secara terjadwal dan rutin oleh kepala madrasah, namun upaya pembinaan terhadap guru masih perlu terus

dilakukan agar pemahaman dan keterampilan guru semakin meningkat. Selain itu, kompetensi teknologi informasi guru masih tergolong rendah sehingga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran belum optimal. Pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Guru juga belum berjalan secara maksimal sehingga proses berbagi pengalaman dan peningkatan kompetensi profesional belum berlangsung secara efektif. Kondisi tersebut menyebabkan variasi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru masih terbatas.

Sementara itu, kesenjangan implementasi di MI Ma'arif Polorejo muncul dalam bentuk yang berbeda. Meskipun dokumen kurikulum telah disusun dengan baik, integrasi antara tujuan kurikulum nasional dan tujuan lokal madrasah belum sepenuhnya konsisten dalam praktik pembelajaran. Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan kurikulum dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas.

Pemanfaatan media teknologi informasi juga belum digunakan secara maksimal oleh seluruh guru meskipun sarana pendukung sudah tersedia. Supervisi akademik telah dilaksanakan secara rutin oleh kepala madrasah, namun masih terdapat perbedaan pemahaman guru terhadap konsep kurikulum yang diterapkan. Partisipasi guru dalam pengembangan perangkat pembelajaran juga belum merata sehingga kualitas perangkat pembelajaran yang dihasilkan masih bervariasi. Di samping itu, pelaksanaan proyek pembelajaran sebagai bagian dari pendekatan Kurikulum Merdeka belum memiliki ukuran yang jelas dalam perencanaan maupun evaluasinya.

Oleh karena itu, bagan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kurikulum yang berawal dari kebijakan nasional kemudian diterjemahkan dalam struktur implementasi di madrasah, dilaksanakan dalam berbagai aspek pembelajaran,

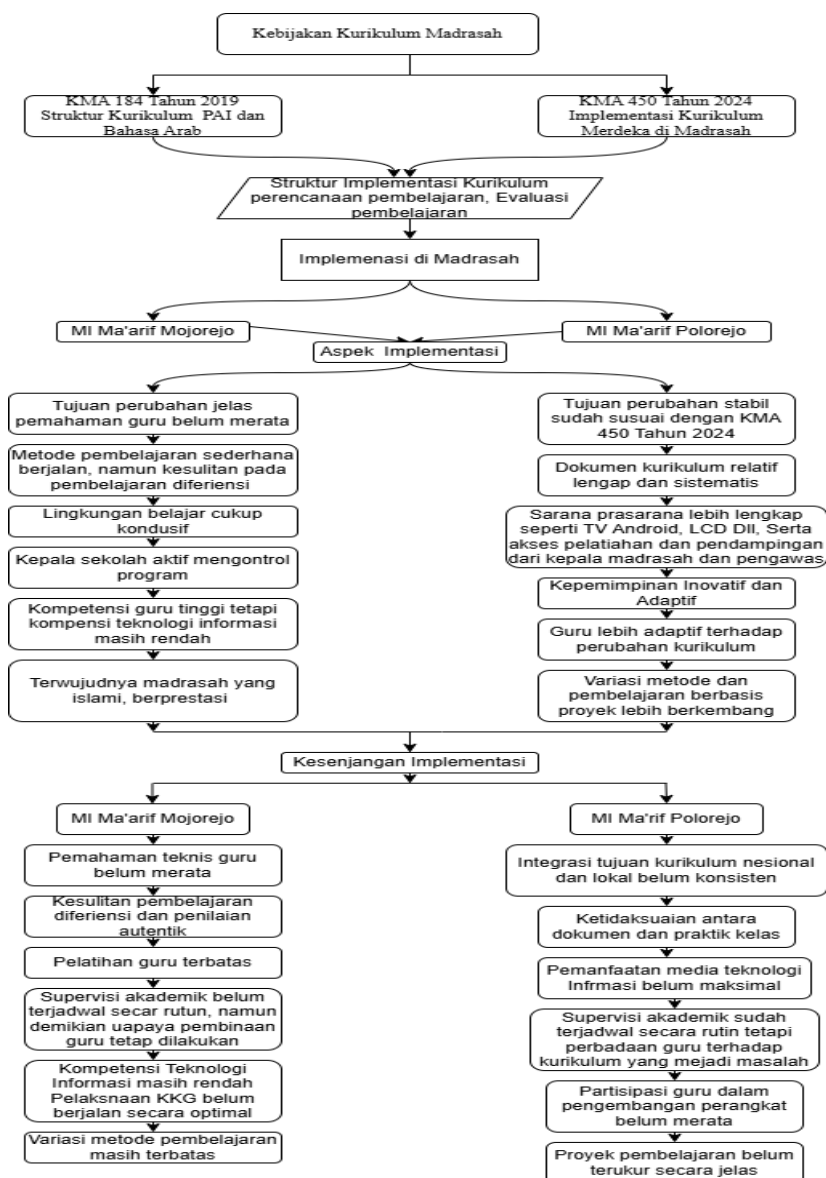
dan pada akhirnya menghasilkan dinamika praktik yang berbeda di setiap madrasah sehingga memunculkan kesenjangan implementasi yang perlu dianalisis dan diperbaiki dalam proses pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan.

Dari pernyataan diatas dapat dideskripsikan bahwa Implementasi kurikulum di madrasah dimulai dari kebijakan yang ditentukan pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 mengenai Struktur Kurikulum PAI dan Bahasa Arab serta Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Penerapan Kurikulum Merdeka di Madrasah. Kebijakan ini kemudian dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembelajaran di madrasah. Hasil dari penerapan di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo memperlihatkan adanya variasi kondisi yang dipengaruhi oleh pemahaman para guru, metode

pengajaran yang digunakan, kompetensi guru, kepemimpinan kepala madrasah, serta ketersediaan fasilitas. Variasi ini menyebabkan pelaksanaan kurikulum belum sepenuhnya sesuai dengan rencana yang tercantum dalam dokumen kurikulum.

Dengan demikian, bagan sinkronisasi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan kurikulum telah disusun dengan teratur, dalam praktiknya masih ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan yang dipengaruhi oleh kesiapan guru serta kondisi madrasah dalam menjalankan proses pembelajaran.

Berikut adalah bagan dari kesenjangan dan dampak kesenjangan implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo.



Berdasarkan bagan diatas telah terdapat kesenjangan implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo diantaranya

1. MI Ma'arif Mojorejo

Di MI Ma'arif Mojorejo, kesenjangan terlihat pada aspek kapasitas dan kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Meskipun tujuan perubahan kurikulum telah dipahami dan lingkungan belajar cukup kondusif, pemahaman teknis guru masih belum merata, khususnya dalam pembelajaran diferensiasi dan penilaian autentik. Selain itu, pelatihan guru yang masih terbatas, supervisi akademik yang belum terjadwal secara rutin, kompetensi teknologi informasi yang relatif rendah, serta belum optimalnya pelaksanaan KKG menyebabkan variasi metode pembelajaran masih terbatas. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan meliputi

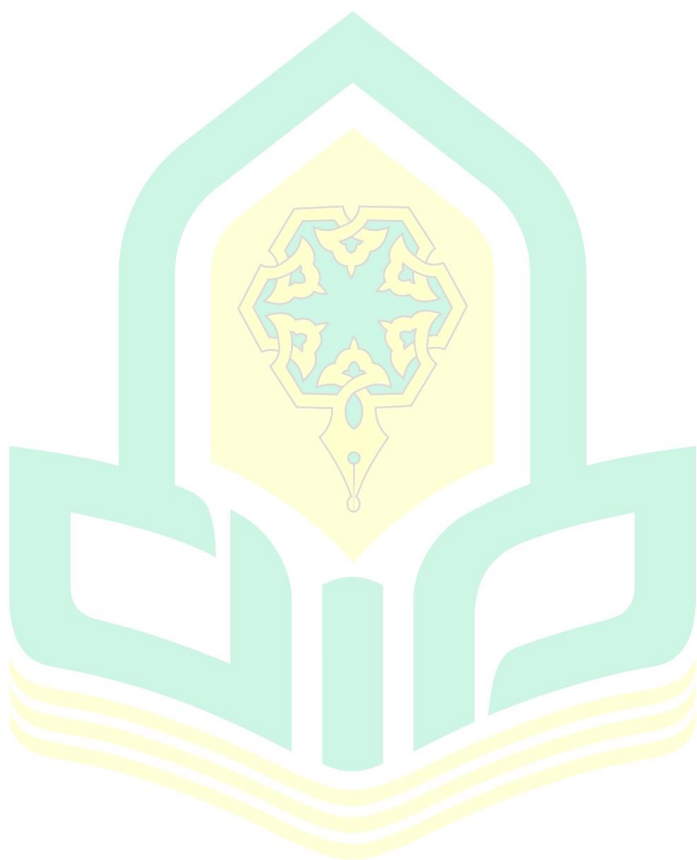
peningkatan pelatihan dan pendampingan guru, penguatan supervisi akademik yang terjadwal, optimalisasi KKG sebagai wadah pengembangan profesional, serta peningkatan kompetensi teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran yang lebih inovatif.

2. MI Ma'arif Polorejo

Di MI Ma'arif Polorejo, kesenjangan lebih banyak ditemukan pada aspek konsistensi pelaksanaan kurikulum. Meskipun dokumen kurikulum telah tersusun relatif lengkap, sarana prasarana memadai, dan guru cenderung lebih adaptif terhadap perubahan kurikulum, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam mengintegrasikan tujuan kurikulum nasional dan kebutuhan lokal madrasah. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan praktik pembelajaran di kelas, pemanfaatan teknologi informasi yang belum maksimal,

perbedaan pemahaman guru terhadap implementasi kurikulum, partisipasi guru dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang belum merata, serta pelaksanaan proyek pembelajaran yang belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan penguatan koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum, peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, penyamaan persepsi guru melalui forum diskusi dan pelatihan.

Dengan demikian, kesenjangan di MI Ma'arif Mojorejo lebih berfokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, sedangkan kesenjangan di MI Ma'arif Polorejo lebih berkaitan dengan konsistensi dan kualitas implementasi kurikulum dalam praktik pembelajaran.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. kebijakan penerapan kurikulum di kedua madrasah pada dasarnya mengacu pada regulasi nasional, yaitu Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka yang ditetapkan pemerintah. Implementasi kurikulum tersebut disesuaikan dengan karakteristik madrasah swasta yang berada di bawah naungan LP Ma'arif NU. Namun dalam praktiknya terdapat perbedaan tingkat keterlaksanaan antara kedua madrasah. MI Ma'arif Mojorejo telah menerapkan kurikulum nasional, tetapi masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait kesiapan perangkat pembelajaran, keterbatasan sarana prasarana, serta proses adaptasi terhadap perubahan kebijakan kurikulum. Sementara itu, MI Ma'arif Polorejo menunjukkan implementasi yang relatif lebih

sistematis karena dokumen kurikulum tersusun lebih lengkap dan didukung oleh sarana prasarana yang lebih memadai sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih sesuai dengan perencanaan kurikulum.

2. kesenjangan implementasi kurikulum di kedua madrasah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi pemahaman guru terhadap konsep dan tujuan kurikulum, variasi kompetensi guru dalam menerapkan metode pembelajaran, kepemimpinan kepala madrasah dalam mengarahkan kebijakan pendidikan, serta ketersediaan fasilitas pembelajaran. Perbedaan kondisi sumber daya manusia dan dukungan fasilitas menyebabkan implementasi kurikulum tidak selalu berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun.

3. Implikasi kesenjangan implementasi kurikulum di kedua madrasah berimplikasi pada belum optimalnya pencapaian tujuan kurikulum madrasah. Namun, karakter implikasinya berbeda. Di MI Ma'arif Mojorejo, implikasi lebih dominan pada aspek **kapasitas pelaksana kurikulum**, yaitu kompetensi dan kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Sebaliknya, di MI Ma'arif Polorejo, implikasi lebih dominan pada aspek **konsistensi implementasi kurikulum**, yaitu kesesuaian antara perencanaan kurikulum dan pelaksanaannya di kelas. Dengan demikian, kesenjangan yang terjadi tidak hanya mempengaruhi kualitas proses pembelajaran, tetapi juga berdampak pada efektivitas pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh madrasah dan kurikulum nasional. Hal ini menguatkan pandangan Pressman dan

Wildavsky bahwa ketika terdapat perbedaan antara kebijakan yang dirancang dan pelaksanaannya di lapangan, maka hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut tidak dapat tercapai secara maksimal.

B. Saran

1. Bagi Pengelola Madrasah (Kepala Madrasah dan Yayasan)

Pihak madrasah disarankan untuk memperkuat perencanaan dan pengelolaan kurikulum melalui penyusunan program yang sistematis, pelaksanaan supervisi pembelajaran secara rutin, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kurikulum. Penguatan manajemen madrasah berbasis sekolah/madrasah perlu dioptimalkan agar pelaksanaan kurikulum dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

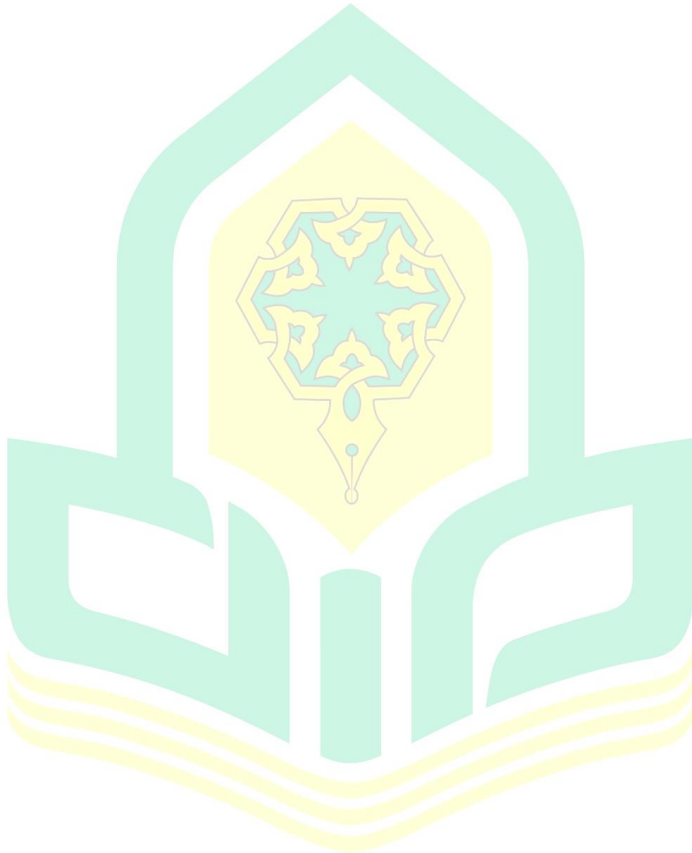
2. Bagi Guru

Guru diharapkan dapat terus mengembangkan kompetensi profesional dan pedagogiknya melalui kegiatan pelatihan, lokakarya, serta keikutsertaan dalam komunitas belajar guru seperti KKG atau MGMP. Pemahaman yang mendalam terhadap kurikulum, penyusunan perangkat pembelajaran, serta penerapan strategi pembelajaran inovatif perlu ditingkatkan guna mengurangi kesenjangan antara kurikulum yang dirancang dengan praktik pembelajaran di kelas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi dan pendekatan metodologis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas

objek penelitian, menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran .



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Makassar: Cv Syakir Media Press, 2021.
- Ainy, Farhany Zahra Qurrata, and Anne Effane. “Peran Kurikulum Dan Fungsi Kurikulum.” *Karimah Tauhid: Karya Ilmiah Mahasiswa Bertauhid* Vol 2 No 1 (2023): 153–156.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7712>.
- Akker, Jan van den. *Curriculum Perspectives: An Introduction*. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2003.
- Alexander, William M., and J Galen Saylor. *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1954.
- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani Mariyani. “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial.” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* Vol 5 No 2 (2020): 146–50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3432>.
- Arikunto, Suharmisi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Babbie, Earl. *The Practice of Social Research*. Canada: Cengage Learning, 2016.
- Batara, Dika Raihan, Ramadhania Ardiansyah, Yoga Bonfilio Brady Yanwas, Nabil Naumi, Rafli Achmad Slamet, and Ahman. “Langkah-Langkah Menentukan Populasi Dan Sampel Yang Tepat Dalam Penelitian.” *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* Vol 4 No 2 (2025): 682 – 689.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpion.v4i2.457>.
- Bogdan, Robert C., and Sari Knopp Biklen. *Qualitative*

- Research for Education: An Introduction to Theory and Methods (2nd Ed.)*. Boston: Allyn and Bacon, 1992.
- Carl, Arend E. *Teacher Empowerment Through Curriculum Development: Theory into Practice*. Cape Town, Afrika Selatan: Juta & Co., Ltd, 1995.
- Citriadin, Yudin. *Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Dasar*. Edited by Lubna. Mataram: Sanabil, 2020.
- Creswell, John W, J. David Creswell. *Qualitative Inquiry, Quantitative, and Research Design Choosing Among Five Approaches*. 3rd Ed. California: SAGE Publications, 2016.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. California: SAGE Publications, 2007.
- Dunsire, Andrew. *Implementation, Control and Change*. Oxford, Inggris: Martin Robertson, 1978.
- Fachreza, Khaidir. "Analisis Komparatif Antara Probability Dan Nonprobability Dalam Penelitian Pemasaran." *MEGA: Jurnal Pendidikan Matematika* Vol 5 No 2 (2024): 751–60.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59098/mega.v5i2.1613>.
- Fullan, Michael. *Successful School Improvement: The Implementation Perspective and Beyond*. Maidenhead, Berkshire, United Kingdom.: Open University Press, 1992.
- . *The New Meaning of Educational Change*. Columbia University, New York: Teachers College Press, 1991.
- . *The New Meaning of Educational Change Fourth Edition*. New York: Teachers College Press, 2007.
- Goodlad, John I. *Curriculum Inquiry: The Study of Curriculum Practice*. New York: McGraw-Hill, 1979.

- . *Curriculum Inquiry: The Study of Curriculum Practice*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1979.
- Hall, George E., and Susan M. Hord. *Change in Schools: Facilitating the Process*. New York: SUNY Press, 1987.
- Hamalik, Oemar. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Edited by Boyke Ramdhani. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Haryono, Eko. “Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.” *Jurnal Ilmiah An-Nuur* Vol 13 No (2023): 1–6.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58403/annuur.v13i2.301>.
- Hasanah, Dwi Umul, Miladina Nur Khasanah, and Desty Putri Hanifah. “Analisis Tantangan Dan Hambatan Penerapan Kurikulum 2013 Di MI Ma’arif Budiluhur Kertek.” *Waspada : Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan* Vol 11 No (2023): 23–29.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61689/waspada.v11i1.404>.
- Hill, Michael, and Peter Hupe. *Implementing Public Policy*. California: SAGE Publications, 2002.
- Huberman, Matthew B. Miles and A. Michael. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. United States of America: SAGE Publications, 2014.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pada Madrasah, Pub. L. No. 184 (2019).
<https://www.mtsypkpsentani.sch.id/read/5/kma-184-tahun-2019-pedoman-implementasi-kurikulum-pada-madrasah>.
- Khojanah, Siti. “Analisis Swot Dalam Pembelajaran Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Di Mi Ma’arif Nu Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga (Tesis, Master).” Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin

Zuhri Purwokerto, 2022.

- Lawton, Denis, Peter Gordon, Maggie Ing, Bill Gibby, Richard Pring, and Terry Moore. *Theory and Practice of Curriculum Studies*. London: Routledge & Kegan Paul, 1978.
- Lincoln, Yvonna S., and Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park: SAGE Publications, 1985.
- Lipsky, Michael. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation, 1980.
- Machi, Lawrence A., and Brenda T. McEvoy. *The Literature Review 3 Rd Ed*. California: Corwin A SAGE Company, 2016.
- Masruhin, Seorang. "Implementasi Kurikulum 2013 Di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Semarang." *Jurnal Pembinaan : Pendidikan Agama Islam* Vol 3 No 1 (2020): 85–109.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37092/ej.v3i1.220>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mubarok, Laeli. "Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Di Mi Maarif Nu Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas (Thesis, Master)." Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: LP2M UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Naldi, Anri, Neng Nurcahyati Sinulingga Lubis, and Putri Handayani. "Analisis Perkembangan Dan Pelaksanaan Kurikulum Di Mis Elsusi Medina." *Paedagoria : Jurnal*

Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan Vol 14 No (2023): 292–300. <https://doi.org/10.31764>.

- Nasir, Muhammad, and Muhammad. “Analisis Perkembangan Kurikulum Di Indonesia : Masa Lalu, Kini, Dan Masa Depan.” *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* Vol 4 No 2 (2024): 228–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/learning.v4i2.2846>
- Nasution, S. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Nur Fajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Muhammad Win Afghani, and Rusdy Abdullah Sirodj. “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol 10 No 1 (2024): 826–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.
- Ornstein, Allan C., and Francis P. Hunkins. *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues (7th Ed.)*. New York: Pearson, 2018.
- Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013, 2013. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud67-2013KD-StrukturKurikulum-SD-MI.pdf>.
- Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013, 2013. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud81A-2013ImplementasiK13Lengkap.pdf>.
- Posner, George J. *Analyzing the Curriculum 2nd Ed.* New York: McGraw Hill, 1995.
- Pressman, Jeffrey L., and Aaron Wildavsky. *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. Los Angeles: Universitas Of California Press, 1984.
- Ramadani, Ulva Putri, Raudhatul Muthmainnah, Nisa Ul

- Hilma, Azzah Wazabirah, Rully Hidayatullah, and Harmonedi Harmonedi. "Strategi Penentuan Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian Pendidikan: Antara Validitas Dan Representativas." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* Vol 3 No 2 (2025): 574–585. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1021>.
- Rangkuti, Ahmad Nizar. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan*. Edited by Mara Samin Lubis. Bandung: Citra Pustaka Media, 2016.
- Rogers, Everett M. *Diffusion of Innovations (5th Ed.)*. New York: Free Press, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- . *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif Dan Konstruktif)*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Suyono, Ahmad. "MI Ma'arif Polorejo," 2022. <https://mipolorejo.maarifponorogo.sch.id/>.
- Tyler, Ralph W. *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. London: The University of Chicago Press, 1949.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>

